

*Pemikiran*  
**GURU BESAR USU**  
*Tentang*  
**PETA JALAN PENDIDIKAN INDONESIA**

Pemerintah Indonesia memiliki visi pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2045 yang dikenal dengan Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Pencapaian visi 2045 ini akan dilakukan dengan strategi transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. Untuk mencapai Indonesia 2045 yang maju Indonesia harus mampu ke luar dari midle income trap ini dengan mengandalkan pembangunan manusia dan penguasaan teknologi. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pembangunan SDM dan penguasaan teknologi yang harus dipersiapkan pada periode ini. Atas dasar ini Presiden telah menetapkan lima arah anutamase sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawa cita dan Pencapaian Visi Indonesia 2045. Kelima arahan ini mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Terciptanya Manusia Indonesia yang Unggul dan Berdaya Saing diharapkan memiliki ciri antara lain pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Karakteristik SDM Indonesia yang seperti ini diharapkan akan mampu membawa Indonesia menuju Visi 2045 dan ke luar dari midle income trap. Atas dasar inilah maka Indonesia telah menyusun rencana pembangunan pendidikan untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045. Peta jalan pendidikan diharapkan akan menyiapkan kebutuhan SDM yang terpelajar, luhur, adaptif, dan kolaboratif. Pemikiran para Guru Besar USU diberikan pada buku ini untuk memberikan masukan dan pengayaan terhadap Peta Jalan Pendidikan Indonesia di Indonesia.

*Pemikiran*  
**GURU BESAR USU**  
*Tentang*  
**PETA JALAN PENDIDIKAN INDONESIA**



**Penyunting:**  
**Gontar Alamsyah Siregar**  
**Tamrin**  
**Himsar Ambarita**  
**Rosnidar Sembiring**  
**Dwi Suryanto**  
**Tengku Siti Hajar Haryuna**  
**Hamdani Harahap**

**2021**

# **Pemikiran Guru Besar USU tentang Peta Jalan Pendidikan Indonesia**

Penyunting:

**Prof. Dr. dr. Gontar Alamsyah Siregar, Sp.PD, KGEH**

**Prof. Dr. Tamrin, M.Sc.**

**Prof. Dr. Eng. Himsar Ambarita, ST, MT**

**Prof. Dr. Rosnidar Sembiring, SH, M.Hum.**

**Prof. Dr. Dwi Suryanto, M.Sc.**

**Prof. Dr. dr. Tengku Siti Hajar Haryuna, Sp.THT KL(K)**

**Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si.**

**USU Press**

*Art Design, Publishing & Printing*

Universitas Sumatera Utara, Jl. Pancasila, Padang Bulan,  
Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

Telp. 0811-6263-737

usupress.usu.ac.id

© USU Press 2021

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang; dilarang memperbanyak menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 978-602-465-358-3

*Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Pemikiran Guru Besar USU tentang Peta Jalan Pendidikan Indonesia /  
Penyunting: Gontar Alamsyah Siregar [et.al] – Medan: USU Press, 2021.

ix, 120. ; illus.: 25 cm

Bibliografi

ISBN: 978-602-465-358-3

Dicetak di Medan



## **SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**Assalamualaikum Wr Wb,**

Sebagai manusia, kita patut bersyukur bahwa Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita mampu menulis pemikiran dalam buku yang diterbitkan Universitas Sumatera Utara tahun 2021 berjudul “Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara tentang Peta Jalan Pendidikan Indonesia”. Meskipun saat masa pandemi buku ini diterbitkan, semoga tidak akan mengurangi semangat kita bersama dalam menyampaikan ide dan gagasan untuk proses pendidikan yang sedang mengalami penyesuaian.

Tema tulisan dari Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara memiliki urgensi yang sangat tepat karena situasi pendidikan kita yang sedang mengalami penyesuaian perubahan sistem pengelolaan bidang keilmuan. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan revolusi industri 4.0 mengharuskan pendidikan dan pengajaran dikelola secara adaptif. Disrupsi yang sedang berlangsung di berbagai proses bisnis masyarakat mengakibatkan perubahan cara berpikir dan bertindak dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola kampus termasuk peran alumni. Sebagai upaya mencari solusi mengatasi hambatan tersebut, maka tulisan dalam buku ini memiliki relevansi yang cukup strategis dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia.

Proses pendidikan yang dirumuskan dalam Peta Jalan Pendidikan di Indonesia, jika kita sederhanakan, setidaknya akan menghasilkan profil sumber daya manusia Indonesia yang memiliki dua keunggulan sekaligus. Pertama, seorang lulusan harus memiliki moral, etika, dan karakter yang kuat melihat ke-Indonesiaan secara utuh serta menghargai perbedaan. Kedua, lulusan memiliki kualifikasi teknis di bidang keilmuan yang adaptif dan berkolaborasi dengan disiplin ilmu lainnya. Kemampuan komunikasi lulusan dalam menyampaikan gagasan menjadi sangat dibutuhkan oleh dunia industri. Persoalan yang selalu disampaikan oleh kebanyakan pengguna lulusan adalah adanya kesenjangan dan ketidaksesuaian antara profil lulusan dengan kebutuhan yang diperlukan. Sehingga, kalangan pendidik perlu melakukan adaptasi dalam proses pembelajarannya mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi.

Kebijakan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di perguruan tinggi merupakan respon untuk mengatasi kesenjangan lulusan dunia pendidikan dengan dunia industri. MBKM memberikan ruang yang

cukup adaptif sebagai respon perubahan yang begitu cepat pada masyarakat industri mengatasi permasalahan sehari-hari. Kesiapan perguruan tinggi melaksanakan MBKM harus diawali oleh pola pikir yang terbuka bahwa keberadaan ilmu tidak lagi mampu merespon secara linearitas, karena perubahan pola kehidupan masyarakat. Ilmu tidak bisa lagi dilihat sebagai sebuah pohon dengan cabang dan ranting serta daunnya, tetapi ilmu lebih dilihat sebagai ekosistem yang berkaitan satu dengan lainnya. Kegiatan untuk mengubah ekosistem ilmu yaitu memberikan kemerdekaan bagi pembelajar, agar bisa mendapatkan ilmu dari mana saja dan dari siapa saja tanpa dibatasi oleh aturan yang mengikat dirinya sendiri. Melakukan dekonstruksi dan relaksasi kurikulum menjadi sangat penting bagi seorang pembelajar karena akan memberikan berbagai perspektif merampungkan *passion* dirinya.

Setelah pola berpikir diadaptasikan sebagai cara merespon perubahan, maka pengelola pendidikan tinggi harus membuat batasan atau rel sebagai cara memberi peta jalan menuju *passion* yang diinginkan pembelajar. Tidak hanya berlaku bagi mahasiswa, tetapi juga dosen dan tenaga kependidikan yang sehari-harinya bertugas menghasilkan lulusan yang kompetitif. Penggunaan teknologi yang sangat cepat berubah mengharuskan kita para pendidik tidak boleh ketinggalan dalam memberikan *performance* terbaik kita bagi mahasiswa dan masyarakat. Sebagai dosen, adaptasi teknologi merupakan bagian yang sangat penting untuk melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi. Komunitas perguruan tinggi harus semakin terbuka dengan cara mengundang praktisi untuk mengajar di kampus. Praktisi diharapkan dapat memberikan *sharing best experience* dari solusi terhadap berbagai masalah yang dialaminya di industri, bahkan bisa dijadikan sebagai *role model* pembelajaran. Beragam perspektif yang mengubah kebiasaan lama dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan menjadi kebiasaan baru, juga bukan sesuatu yang mudah dijalankan. Kemapanan membuat organisasi menjadi sulit merespon perubahan yang cepat. Begitulah perkiraan yang menjadi tantangan dan harus dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi, termasuk kontribusi Dewan Guru Besar mempercepat kelancaran MBKM.

Pemikiran para Guru Besar Universitas Sumatera Utara yang tertulis dalam buku ini, diharapkan memberikan semangat bagi kita semua, menciptakan ruang yang lebih lega, nyaman dan terus menginspirasi segala bentuk kecerdasan yang ada, bagi para dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu rekomendasi bagi pemerintah serta praktisi pendidikan di Indonesia dalam melahirkan kebijakan-kebijakan inovatif baru lainnya di bidang pendidikan. Semoga apa yang dilakukan oleh para anggota Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara menuliskan berbagai sudut pandang ide dan pemikirannya dalam bentuk karya ilmiah di buku ini, dapat memberi masukan berharga dan semakin menyempurnakan strategi pencapaian visi dan misi Universitas Sumatera Utara.

Sekali lagi saya ucapkan SELAMAT kepada Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara. Semoga terbitnya buku ini dapat memotivasi hadirnya buku-buku selanjutnya dengan tema pembahasan yang lebih

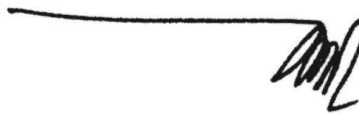
bermanfaat dan menginspirasi dunia akademik. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi segala upaya dan kerja keras kita semua, demi membangun Universitas Sumatera Utara dan memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat Indonesia.

**Terima kasih.**

**Wabillahi Taufik Wal Hidayah.**

**Wassalamualaikum Wr Wb.**

**Medan, Juli 2021**  
**Rektor USU**

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line followed by a stylized, cursive flourish.

**Dr. Muryanto Amin, S.Sos, M.Si**



## **KATA PENGANTAR** **KETUA DEWAN GURU BESAR** **UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**Assalamualaikum Wr Wb,**

Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho dan berkenan-Nya, Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara pada tahun 2021 berhasil merampungkan buku yang memuat pemikiran para Guru Besar yang ada di Universitas Sumatera Utara, bertajuk “Pemikiran Guru Besar Universitas Sumatera Utara tentang Peta Jalan Pendidikan Indonesia”.

Saya, selaku Ketua Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara, menyampaikan ucapan terima kasih kepada para Guru Besar Universitas Sumatera Utara, yang telah berkenan untuk berkontribusi dalam menyumbangkan pemikiran-pemikirannya melalui buku ini. Hal tersebut merupakan sebuah langkah strategis dari para Guru Besar USU, yang tidak hanya ingin dipasung dalam kegiatan akademis rutin belaka, melainkan turut mensosialisasikan buah pikir atau ide-ide progresif yang diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia.

Berbicara tentang Peta Jalan Pendidikan di Indonesia, tentu banyak hal yang perlu kita cermati, dipelajari, dianalisis, disimpulkan dan untuk kemudian diterapkan. Merunut pada perjalanan yang telah ditempuh bangsa ini dalam setiap babak sejarah untuk merumuskan berbagai metode dan sistem pembelajaran, demi mewujudkan bangsa yang cerdas dan maju dengan tidak meninggalkan karakter dan jati diri, maka banyak hal yang telah dan akan segera dilakukan. Khususnya dimulai dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi.

Salah satu yang saat ini tengah hangat dibicarakan dan secara aktif mulai diterapkan tahapan-tahapan implementasinya pada berbagai perguruan tinggi di Indonesia adalah Program Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digaungkan oleh Kemendikbud. Sebagai program yang baru diluncurkan, dengan butir-butir kebijakan serta implementasi yang berbeda jauh dengan sistem pendidikan yang telah dilaksanakan sebelumnya, maka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentu harus dipersiapkan dengan baik dan matang. Kesiapan tidak saja menyangkut pada kesiapan mahasiswa dan dosen, namun juga terkait hal-hal yang lebih krusial seperti payung hukum untuk implementasi butir per butir kegiatan, format pemikiran yang mendetail serta kesiapan sarana dan prasarana di lingkungan perguruan

tinggi tersebut. Selain itu, sejumlah persoalan lain yang lebih bersifat teknis juga harus dipikirkan, dirumuskan dan dilakukan dengan konsep pertimbangan yang matang. Tidak kurang pentingnya adalah kesiapan mental atau psikologis plus material dan keterampilan, baik dari para mahasiswa maupun para dosen.

Persoalan pendidikan di Indonesia sesungguhnya adalah persoalan yang sangat kompleks dan klise. Banyak dari persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hingga hari ini karena kegagalan para praktisi dan pemerhati pendidikan dalam menterjemahkan konsep pendidikan yang ingin diterapkan hari ini dan di masa depan, dengan tidak meninggalkan hal-hal baik yang telah ditorehkan sejarah melalui para pendahulunya. Percepatan teknologi yang telah menjadi keniscayaan digitalisasi dalam berbagai bidang, serta tuntutan untuk bisa beradaptasi dengan cepat, telah memberikan banyak pekerjaan rumah yang harus segera kita tuntaskan, sebelum berubah menjadi benang kusut yang sukar diurai.

Dengan demikian, maka harapan kami, buah pemikiran dari para Guru Besar Universitas Sumatera Utara yang termaktub dalam buku ini, mampu memberikan pencerahan dan semangat bagi kita semua, dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Juga untuk memandu kita semua dalam mewujudkan Universitas Sumatera Utara sebagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi internasional. Semoga pemikiran yang tersaji di dalam buku ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu rekomendasi bagi pemerintah serta praktisi pendidikan di Indonesia dalam melahirkan kebijakan-kebijakan baru di bidang pendidikan yang lebih mendukung peningkatan kecerdasan generasi bangsa.

Semoga hal sederhana yang telah dilakukan oleh para Guru Besar Universitas Sumatera Utara ini dapat memberi sumbangsih berharga dan semakin menyempurnakan strategi pencapaian visi dan misi Universitas Sumatera Utara. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi segala ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih.

**Wabillahi Taufik Wal Hidayah. Wassalamualaikum Wr Wb.**

**Medan, Juli 2021**



**Ketua Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara  
Prof. Dr. dr. Gontar Alamsyah Siregar, Sp.PD, KGEH (K)**



## DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA .....	iii
KATA PENGANTAR KETUA DEWAN GURU BESAR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
1. Kolaborasi Pendidikan Rumpun Kesehatan Arlinda Sari Wahyuni.....	1
2. Peta Jalan Pendidikan Tinggi Bidang Pertanian Ditinjau Dari Ketidakpastian Dunia Kerja Darma Bakti .....	13
3. Peta Jalan Pendidikan Tinggi Menuju Sumber Daya Manusia Unggul Tahun 2035 Erika Revida.....	23
4. Peta Jalan Pendidikan Indonesia Gontar A. Siregar .....	34
5. <i>Link and Match</i> Antara Perguruan Tinggi dan Industri dalam Mewujudkan Program Magang Industri Merdeka Belajar Kampus Merdeka Halimatuddahlia .....	44
6. Pandangan Terkait Urgensinya Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2035 Sejalan Dengan Konsep Tri Darma Perguruan Tinggi Harry Agusnar .....	51
7. Urgensi Muatan Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Nasional Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih Bebas Dari KKN Hasim Purba .....	59
8. Peta Jalan Pembangunan Pendidikan Indonesia 2035; Belajar Dari Sistem yang Terbaik Himsar Ambarita .....	69
9. Implementasi Merdeka Belajar Pada Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan Peta Pembangunan Pendidikan Indonesia Kiking Ritarwan .....	80

10. Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing Sesuai Perubahan Zaman Noverita Sprinse Vinolina .....	86
11. Peranan Agama Dan PKN Dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia yang Beriman dan Bertakwa Pujiati.....	93
12. Peta Perubahan Implementasi Pendidikan Kedokteran di Indonesia Sarma N Lumbanraja .....	109



# Kolaborasi Pendidikan Rumpun Kesehatan di Masa yang akan Datang

Arlinda Sari Wahyuni

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

## 1. Latar Belakang

Kolaborasi yang efisien efektif antara profesional kesehatan dalam memberikan pelayanan menjadi kebutuhan utama pasien dan keluarganya. Namun fakta menunjukkan tim profesional di pelayanan kesehatan tidak melakukan kolaborasi dengan baik yang mengakibatkan terjadinya kasus *medical error*. Kejadian *medical error* menjadi penyebab kematian urutan ke-5 di USA, dilaporkan 120.000 orang meninggal di rumah sakit karena *medical error*. Data lainnya ada 1 diantara 300 pasien meninggal disebabkan *medical error* (New York Times, 2004 dalam Dwiprahasto, 2011). Selain itu 96% kejadian *medical error* di unit rawat khusus ICU/ICCU dan *Medical Error* juga dilaporkan terjadi di unit pelayanan primer Puskesmas pada 80% kasus (Bali Post, 1997 dalam Dwiprahasto, 2011; WHO, 2010).

Saat ini seorang tenaga kesehatan diminta untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Pelayanan yang bermutu tersebut dapat diperoleh dari kolaborasi kerja sama seluruh pihak tenaga kerja kesehatan antar profesi seperti dokter, perawat, dan apoteker dalam kerja sama tim rumah sakit. Permasalahan pasien yang kompleks tidak dapat ditangani hanya oleh satu profesi medis, melainkan harus melibatkan berbagai profesi. Dalam dunia kesehatan, praktik kolaborasi sangatlah penting sehingga diperlukan adanya suatu metode pembelajaran yang terintegrasi antar profesi kesehatan (WHO, 2010). Namun, pada praktik kolaborasi antar tenaga kesehatan sering terjadi masalah seperti ketidakseimbangan wewenang, peran yang timpang tindih, serta adanya perasaan superior dan inferior (Sulsilaningsih, 2011). Oleh karena itu, *World Health Organization* (WHO) menawarkan metode *Interprofessional Education* (IPE) demi mendukung kolaborasi sehingga tercipta kerja tim yang baik dan siap untuk menghadapi masalah kesehatan (WHO, 2010).

Program IPE merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang diikuti oleh dua atau lebih profesi kesehatan yang belajar tentang, dari, dan dengan satu sama lain sebagai bekal untuk berkolaborasi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas (*Royal College of Nursing*, 2006). IPE akan membantu mahasiswa terlatih untuk mengambil bagian di dalam sebuah tim, bagaimana bisa berkontribusi, mendengarkan pendapat, berdiskusi demi sebuah tujuan, menumbuhkan rasa saling percaya, bukan hanya dengan mahasiswa jurusan yang sama tetapi juga dengan mahasiswa program

kesehatan yang lain melalui IPE. IPE juga dapat mengubah sikap mahasiswa kesehatan untuk menurunkan stereotip antar profesi (WHO, 2010).

Pada tahun 2013, WHO mengeluarkan *Framework for Action on Interprofessional Education and Collaboration Practice* sebagai bentuk dukungan terhadap IPE. Program IPE dinilai dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan pasien (WHO, 2010). Pengalaman *interprofessional* melalui IPE akan membantu mahasiswa kesehatan belajar keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi bagian dari praktik kolaboratif tenaga kesehatan yang nantinya mampu terlibat dan berkontribusi aktif dalam *Interprofessional Collaboration* (IPC). Keberlangsungan IPC akan lebih baik apabila seluruh tenaga kesehatan memahami peran, kompetensi inti, dasar bahasa dan pola pikir dari tenaga kesehatan lain serta mengembangkan sikap dan perilaku yang baik (Soemantri *et al.*, 2014).

Di Indonesia, IPE sudah dijadikan sebagai bagian dari kurikulum sehari-hari, seperti di Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjajaran (UNPAD) Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dan Universitas Islam Indonesia (UII). Di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UMY, 4-6 mahasiswa dari empat program studi yang berbeda melakukan diskusi bersama setiap hari minggu. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa FKIK UMY tahap profesi memiliki persepsi yang baik terhadap IPE (Sundari, 2013). Penelitian lain menunjukkan bahwa 97,21% mahasiswa FKIK Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang terdiri dari Program Studi Ilmu Keperawatan, Farmasi, Kesehatan Masyarakat, dan Kedokteran mempunyai persepsi baik terhadap IPE (Kesuma, 2015).

Konsep IPE dan IPC sendiri belum banyak diketahui di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU). Menurut penelitian Indah (2021) Sebagian besar mahasiswa P3D FK USU memiliki persepsi yang baik terhadap IPE dan IPC yakni sebesar 80% walaupun masih ada 20% mahasiswa yang memiliki persepsi cukup. Sebagian besar mahasiswa P3D yang merasa perlu akan penerapan metode pembelajaran IPE dan IPC memiliki persentase sebesar 87% , tetapi ada beberapa mahasiswa yang merasa tidak perlu akan penerapan metode pembelajaran IPE dan IPC dengan persentase 13%.

Oleh karena itu, diharapkan agar Universitas Sumatera Utara dapat memulai penerapan kurikulum IPE di fakultas masing-masing, khususnya Fakultas rumpun bagian kesehatan seperti: Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi , Fakultas Keperawatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Farmasi. Kegiatan penerapan metode pembelajaran IPE bisa dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan IPC, serta mahasiswa diharapkan untuk lebih memahami konsep dan implementasi tentang IPE dan IPC. Hal ini sangat di perlukan untuk mencapai mutu pelayanan kesehatan yang baik di rumah sakit (Indah, 2021).

## 2. Masalah

Saat ini tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas semakin meningkat. Masyarakat juga sudah mulai kritis terhadap pelayanan kesehatan yang didapatkan. Tenaga kesehatan tidak mungkin bekerja sendirian untuk memberikan pelayanan secara optimal. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, diperlukan sebuah sistem kerja kolaborasi antar profesi kesehatan. Salah satu upaya dalam mewujudkan kolaborasi yang efektif antar profesi adalah dengan diadakannya praktik kolaborasi sejak dini melalui proses pembelajaran. Kemampuan bekerjasama secara interprofesi tidak muncul begitu saja, melainkan harus dilatih, IPE dicetuskan sebagai sistem pendidikan yang terintegrasi untuk menyiapkan praktik kolaborasi. Inti dari suatu hubungan kolaborasi adalah adanya perasaan saling ketergantungan (interdefensasi) untuk bekerjasama (Sedyowinarso *et al.*, 2011).

Menurut *American College of Clinical Pharmacy (ACCP)* (2009) hambatan-hambatan yang mungkin muncul adalah penanggalan akademik, peraturan akademik, struktur penghargaan akademik, lahan praktek klinik, masalah komunikasi, bagian kedisiplinan, bagian profesional, evaluasi, pengembangan pengajar, sumber keuangan, jarak geografis, kekurangan pengajar interdisipliner, kepemimpinan dan dukungan administrasi, tingkat persiapan peserta didik, logistik, kekuatan pengaturan, promosi, perhatian dan penghargaan, resistensi perubahan, beasiswa, sistem penggajian, dan komitmen terhadap waktu.

Selain itu, menurut Sedyowinarso *et al.*, hambatan-hambatan yang mungkin muncul adalah dari ego masing masing profesi, beragamnya birokrasi dan kurikulum di tiap institusi pendidikan profesi kesehatan, fasilitas fisik dan konsep pembelajaran yang belum jelas, paradigma terhadap profesi kesehatan, kekaburan identitas dan peran masing-masing profesi.

## 3. Strategi Pemecahan Masalah

*Canadian Interprofessional Health Collaborative* (2009) memaparkan bahwa kolaborasi terjadi ketika pemberi pelayanan kesehatan bekerja bersama dengan rekan seprofesi, dengan rekan selain profesinya, dan dengan pasien dan keluarganya. Kolaborasi yang efisien dan efektif antar profesional kesehatan akan memberikan perawatan kesehatan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan utama pasien dan keluarganya (Wahyuni *et al.*, 2020).

*Interprofessional education (IPE)* adalah metode pembelajaran yang interaktif, berbasis kelompok, yang dilakukan dengan menciptakan suasana belajar berkolaborasi untuk mewujudkan praktik yang berkolaborasi dan untuk menyampaikan pemahaman mengenai interpersonal, kelompok, organisasi,

dan hubungan antar organisasi sebagai proses profesionalisasi (*Royal College of Nursing*, 2006). IPE dapat terjadi ketika dua atau lebih mahasiswa dari program studi kesehatan yang berbeda belajar bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan kualitas pelayanan kesehatan (CAIPE, 2002).

WHO (2010) menyatakan bahwa banyak sistem kesehatan di negara-negara di dunia yang sangat terfragmentasi pada akhirnya tidak mampu menyelesaikan masalah kesehatan di negara itu sendiri. Hal ini kemudian disadari karena permasalahan kesehatan sebenarnya menyangkut banyak aspek dalam kehidupan, dan untuk dapat memecahkan satu persatu permasalahan tersebut atau untuk meningkatkan kualitas kesehatan itu sendiri, tidak dapat dilakukan hanya dengan sistem uniprofesional. Kontribusi berbagai disiplin ilmu ternyata memberi dampak positif dalam penyelesaian berbagai masalah kesehatan.

Manfaat yang penting adalah mahasiswa dapat belajar bagaimana untuk bekerja dalam lingkungan kelompok. Mereka belajar bagaimana manajemen konflik dan belajar saling melengkapi sebagai sebuah tim sehingga menyelesaikan masalah lebih efisien dan efektif. Mahasiswa yang telah mengikuti program IPE melaporkan terjadi peningkatan keterampilan pribadi, mereka belajar lebih hormat, sabar, dan fleksibel. Mereka juga melaporkan bahwa para mahasiswa dapat menjadi pendengar yang lebih baik dan lebih mampu untuk berkomunikasi dalam kelompok. Mereka belajar bagaimana menangani perbedaan yang timbul antara orang-orang karena budaya atau kepribadian (Illingworth & Sonya, 2007).

Para mahasiswa dapat berinteraksi lebih luas dalam lingkungan fakultas sebagai suatu lingkungan kerja, bukan hanya dalam hal akademik saja, sehingga para mahasiswa dapat belajar untuk menghargai profesi lainnya. Salah satu hasil yang signifikan dilaporkan oleh pelajar di area perkembangan profesional. Mahasiswa melaporkan bahwa mereka menjadi lebih jelas mengenai peran mereka masing-masing dan profesi lain. Selain itu mereka merasa lebih efektif dalam melakukan tindakan. Mereka dapat menilai masalah dari wilayah disiplin mereka sendiri dan disesuaikan dari segi kolaborasi sehingga mereka mampu memperluas pandangan mereka dari profesi lainnya (Illingworth & Sonya, 2007).

Melalui program IPE mahasiswa dapat belajar untuk bekerja di berbagai kelompok budaya dan langsung terlibat dalam berbagai kelompok. Belajar untuk menghormati dan memahami profesi lain dalam menentukan intervensi. Kelompok yang terdiri dari berbagai budaya melatih mahasiswa untuk menghargai budaya lain, misalnya dalam hal mengemukakan pendapat saat berdiskusi tanpa melibatkan rasisme, masalah budaya, kepercayaan dan etnis (Illingworth & Sonya, 2007).

WHO (2010) menyajikan hasil penelitian di 42 negara tentang dampak dari penerapan *collaborative practice* dalam dunia kesehatan. Hasil dari penelitian ternyata sangat menjanjikan bukan hanya bagi negara terkait, namun juga apabila digunakan di negara-negara lain. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa *collaborative practice* dapat meningkatkan:

Keterjangkauan serta koordinasi layanan kesehatan, Penggunaan sumber daya klinis spesifik yang sesuai, *Outcome* kesehatan bagi penyakit kronis, Pelayanan serta keselamatan pasien. WHO (2010) juga menjelaskan *collaborative practice* dapat menurunkan: Total komplikasi yang dialami pasien. Jangka waktu rawat inap. Ketegangan dan konflik di antara pemberi layanan (*caregivers*), Biaya rumah sakit. Rata-rata *clinical error*. rata-rata jumlah kematian pasien.

Strategi pembelajaran IPE dapat mengimprovisasi persepsi siswa menuju perawatan kesehatan ke arah yang lebih positif. Strategi tersebut dapat digunakan untuk mengimprovisasi aspek profesionalisme di masa yang akan datang dan diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif (Wahyuni *et al.*, 2020).

Kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa dengan metode pembelajaran IPE adalah kemampuan untuk mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk berkolaborasi.

Menurut Barr (1998) kompetensi kolaborasi yaitu:

1. Memahami peran, tanggung jawab dan kompetensi profesi lain dengan jelas,
2. Bekerja dengan profesi lain untuk memecahkan konflik dalam memutuskan perawatan dan pengobatan pasien,
3. Bekerja dengan profesi lain untuk mengkaji, merencanakan, dan memantau perawatan pasien,
4. Menoleransi perbedaan, kesalahpahaman dan kekurangan profesi lain,
5. Memfasilitasi pertemuan interprofesional, dan
6. Memasuki hubungan saling tergantung dengan profesi kesehatan lain.

Freeth (2005) mengungkapkan bahwa staff pendidik harus mengenali dan menyadari potensi pembelajaran dalam dinamika kelompok *interprofessional*. Hal ini sangat sesuai dengan tanggung jawab staff pendidik untuk memberikan kesempatan yang sama demi pembelajaran individu yang efektif bagi masing-masing anggota kelompok.

Kompetensi pengajaran IPE menurut Freeth (2005)

1. Sebuah komitmen terhadap pembelajaran dan praktek *interprofesional*
2. Kepercayaan dalam hubungan pada *focus* tertentu dari pembelajaran *interprofessional* di mana *staff* pendidik berkontribusi
3. Model peran yang positif
4. Pemahaman yang dalam terhadap metode pembelajaran interaktif dan percaya diri dalam menerapkannya
5. Kepercayaan dan fleksibilitas untuk menggunakan perbedaan profesi secara kreatif dalam kelompok
6. Menghargai perbedaan dan kontribusi unik dari masing-masing anggota kelompok
7. Menyesuaikan kebutuhan individu dengan kebutuhan kelompok



8. Meyakinkan dan memiliki selera humor dalam menghadapi kesulitan

Mahasiswa harus mampu memahami konsep IPE sedini mungkin untuk dapat bersama-sama memecahkan masalah kesehatan di kemudian hari. IPE harus menjadi bagian dari partisipasi dosen dan mahasiswa terhadap sistem pendidikan ilmu kesehatan. Dosen dan mahasiswa merupakan elemen penting dalam IPE serta modal awal untuk terjadinya *collaborative practice* di suatu negara. Oleh karena itu, sebagai sesuatu hal yang baru, IPE haruslah pertama-tama dipahami konsep dan manfaatnya oleh para dosen yang mengajar mahasiswa agar termotivasi untuk mewujudkan IPE dalam proses pendidikannya (HPEQ-Project, 2011).

Untuk mampu terlibat dalam IPE dalam pendidikan kesehatan di Indonesia, dosen setidaknya memahami elemen-elemen yang diperlukan dalam pelaksanaan IPE sehingga mampu membekali dirinya dengan elemen-elemen tersebut.

Kesiapan IPE dapat dilihat dengan tiga domain umum yaitu:

1) Identitas profesional

Identitas profesional merupakan suatu hal yang penting karena hal ini menjadi ciri khas profesi yang akan membedakan dengan profesi lain. Fauziah (2010) menjelaskan identitas profesi adalah komponen kunci dari sebuah profesionalisme yang merupakan bagian integral dari filosofi pelayanan kesehatan. Identitas profesi harus dikembangkan seiring perkembangan zaman. Ini dapat dilakukan melalui interaksi dengan profesi lain untuk membentuk dasar pemahaman mengenai *interprofesional* antar tenaga kesehatan.

2) *Teamwork*

*Teamwork* dalam kolaborasi merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa dalam IPE. Kompetensi *teamwork* meliputi: Kekompakan tim, yaitu kekuatan tim yang membuat anggotanya untuk tetap setia menjadi bagian sebuah tim yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi sebuah tim. Saling percaya, yaitu sebuah sikap positif dari anggota tim terhadap anggota yang lainnya, meliputi perasaan, mood dan lingkungan internal kelompok. Berorientasi kolektif, sebuah keyakinan bahwa pendekatan secara tim merupakan cara yang lebih kondusif dari pendekatan secara personal dalam menyelesaikan persoalan. Mementingkan kerja sama, yaitu sikap positif yang ditunjukkan anggota tim dengan mengacu pada bekerjasebagai tim (ACCP, 2009).

3) Peran dan tanggung jawab.

Peran merupakan pemahaman terhadap peran masing-masing terbentuk jika masing-masing individu menjalankan perannya secara konsisten. Peran dosen dalam IPE diharapkan mampu membentuk peserta didik yang dapat memahami tugas dan kewenangan masing-masing profesi

sehingga akan muncul tanggung jawab yang sesuai dalam penyelesaian suatu masalah. Ketiga domain ini saling berhubungan dalam membangun kesiapan untuk penerapan IPE (Lee, 2009).

Pendekatan belajar mengajar yang sudah ada disesuaikan dan dikembangkan sebagai metode belajar baru sebagai penarik perhatian belajar peserta didik dan inovasi baru dari pengajar. Tidak satu pun metode yang menjadi pilihan utama, metode pengalaman mengajar dari pengajar dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebutuhan belajar peserta didik dan bagaimana cara pengajar untuk menjaga perhatian peserta didik terhadap pelajaran. Metode-metode belajar yang ada dapat saling memperkuat, tidak berdiri sendiri. Pendekatan belajar mengajar yang dapat diterapkan dalam IPE yaitu *exchange-based learning*, *action-based learning*, *practice-based learning*, *simulation-based learning*, dan *observation-based learning* (Sedyowinarso *et al.*, 2011).

*Exchange-based learning* merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memungkinkan para peserta mengungkapkan perasaan, membandingkan pandangan pertukaran pengalaman. Debat tentang masalah etika dapat mengekspos nilai yang mendasari perbedaan antara profesi. Permainan yang memainkan hubungan kerja antara profesi dan antara organisasi dapat meringankan belajar tetapi tetap berisi konten serius. Studi kasus dapat meningkatkan peran aktif peserta dari profesi yang berbeda untuk memperkenalkan pemahaman yang berbeda dan menyarankan intervensi berbeda sebagai kelompok kerja terhadap respon kolaboratif (Sedyowinarso *et al.*, 2011).

*Action-based learning*, atau *problem-based learning* (PBL) sejak tahun 1970 telah menjadi rekomendasi WHO sebagai metode pembelajaran untuk *interprofessional*. Bukti menunjukkan bahwa PBL mendorong kebebasan, kerja tim, ilmu pengetahuan yang lebih terintegrasi, dan pembelajaran mendalam. PBL efektif dalam mencapai tujuan IPE seperti belajar tentang peran dan meningkatkan keterampilan komunikasi *interprofessional*. (Freeth, 2005).

*Interprofessional practice-based learning* merupakan pembelajaran terkait untuk peserta didik secara bersamaan pada penempatan di tempat kerja yang berdekatan, penempatan bersama di pengaturan yang sama dan tujuan yang dirancang untuk lingkungan belajar seperti pelatihan bangsal.

*Simulation-based learning* dapat menggunakan permainan peran yang diadaptasi untuk memaparkan hubungan kerja antara profesi, peserta berperan sebagai klien, pemberi pelayanan atau praktisi dari diri mereka sendiri atau perspektif profesi lain.

*Observation-based learning* pelajar secara sederhana diminta untuk mengamati pertemuan tim multidisiplin dengan menggunakan metode studi observasional.

Topik pembelajaran yang dapat diterapkan dalam IPE yaitu etika dan kode etik serta ilmu komunikasi kesehatan. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Sedyowinarso *et al.*, (2011), mengenai topik pembelajaran manakah yang paling sesuai untuk pembelajaran IPE, yakni etika kesehatan, masalah

global kesehatan seperti HIV/AIDS dan TBC, manajemen bencana, dan kasus gawat darurat. Menurut Reeves (2002) topik pembelajaran pada IPE yang direkomendasikan yakni mengenai peran, tanggung jawab dan profesionalisme. Ilmu komunikasi kesehatan menjadi topik yang menarik untuk dibahas dalam IPE agar mahasiswa dapat terlatih untuk menggunakan pola komunikasi yang baik dan efektif kepada pasien, sejawat dan profesi kesehatan lainnya.

Di Universitas Sumatera Utara (USU) program *collaborative practice* sudah dilakukan di Program Pendidikan Profesi Dokter (P3D) mulai dari tanggal 5 April 2021 dan dijalankan selama dua minggu untuk setiap kelompok. Kegiatan yang dilaksanakan berupa diskusi kasus dengan antar profesi seperti dokter, perawat, farmasi, dan ahli gizi. Namun, untuk IPE belum dijalankan di program S1. Program pembelajaran IPE masih baru diterapkan. Hal ini membutuhkan evaluasi pembelajaran serta peningkatan metode pembelajaran yang optimal pada fakultas rumpun kesehatan khususnya di Universitas Sumatera Utara.

#### 4. Rencana Tindak Lanjut

Pengembangan model IPE yang ideal harus dimulai dengan persamaan paradigma bahwa IPE hanyalah langkah awal dari tujuan utama dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien. Pendekatan *interprofessional* akan memfasilitasi dengan lebih baik mahasiswa dari satu disiplin ilmu untuk belajar dari disiplin ilmu lainnya. Pembelajaran bersama antar disiplin ilmu dapat meningkatkan keterampilan baru mahasiswa yang akan memperkaya keterampilan khusus yang dimiliki masing-masing disiplin dan mampu bekerja sama lebih baik dalam lingkungan tim yang terintegrasi. Selama ini penerapan IPE masih tidak konsisten, untuk itu harus dibuat sebuah komitmen sehingga pembelajaran *interprofessional* dapat diterapkan di institusi pendidikan dan diterapkan dalam kurikulum pendidikan di semua program pelayanan kesehatan untuk memastikan keberadaan jangka panjang IPE yang berkelanjutan (ACCP, 2009).

Kompetensi dosen pengajar atau fasilitator yang tepat untuk memfasilitasi pembelajaran IPE yakni dapat menggali kemampuan mahasiswa, telah mengikuti pelatihan fasilitator IPE, dan mampu mengarahkan kasus. Hasil ini sejalan dengan Sedyowinarso *et al.*, (2011) bahwa dosen ideal diharapkan bisa memiliki kemampuan sebagai pemimpin sehingga dapat mengarahkan apabila muncul perbedaan pendapat saat pembelajaran berlangsung. Seorang dosen yang ideal untuk IPE juga harus dapat memahami kemampuan dan kebutuhan kompetensi yang ingin dicapai para pembelajar dengan memahami perbedaan yang ada dari masing-masing profesi (Barr, 2005).

Hal yang penting bagi mahasiswa adalah keterbukaan untuk menerima profesi lain sebagai mitra. IPE datang untuk memberikan pembelajaran dini agar nantinya tidak ada fragmentasi yang signifikan antar sesama profesi

kesehatan. Pembelajaran IPE juga bukan hanya bertujuan agar terciptanya interaksi dan kolaborasi antar profesi kesehatan namun juga bertujuan agar masing-masing individu mampu mengembangkan diri dan profesinya masing-masing. Serupa dengan yang diungkapkan oleh Sedyowinarso *et al.*, (2011) bahwa meskipun IPE dirancang untuk kelompok, pada akhirnya bertujuan untuk pengembangan masing-masing individu. Hal ini sejalan dengan Yuniawan (2013) bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran IPE ini adalah kejelasan standar kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa itu sendiri, sehingga adanya IPE akan memperjelas kontribusi setiap profesi kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan.

Evaluasi proses dan hasil pembelajaran IPE mencakup capaian kompetensi, kemampuan komunikasi/individu dan kemampuan bekerjasama. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sedyowinarso *et al.*, (2011) yang menyebutkan bahwa indikator keberhasilan IPE menurut mahasiswa maupun dosen adalah tercapainya kompetensi mahasiswa baik itu kompetensi mandiri profesi maupun kompetensi kolaboratif.

## **5. Kesimpulan dan Saran**

Saat ini tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas semakin meningkat. Pelayanan kesehatan yang bermutu dapat dicapai dengan praktik kolaborasi. WHO telah mendukung IPE karena dianggap sebagai langkah penting dalam meningkatkan pendidikan profesi kesehatan. Mahasiswa harus mampu memahami konsep IPE sedini mungkin untuk dapat bersama-sama memecahkan masalah kesehatan di kemudian hari. Komponen kompetensi yang diharapkan akan dicapai mahasiswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran IPE mencakup kompetensi mandiri, kemampuan bekerjasama, pemahaman terhadap profesi lain, menghargai profesi lain, dan komunikasi efektif.

Strategi pembelajaran IPE dapat mengimprovisasi persepsi siswa menuju perawatan kesehatan ke arah yang lebih positif. Strategi tersebut dapat digunakan untuk mengimprovisasi aspek profesionalisme di masa yang akan datang dan diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang efisien dan efektif.

Diharapkan Universitas Sumatera Utara agar dapat memulai penerapan kurikulum IPE di fakultas masing-masing, khususnya Fakultas rumpun bagian kesehatan seperti : Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Fakultas Farmasi. Kegiatan penerapan metode pembelajaran IPE bisa dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan IPC.

## Daftar Pustaka

- American College of Clinical Pharmacy (ACCP). 2009. Interprofessional Education: Principles and Application. A Framework for Clinical Pharmacy. Pharmacotherapy Vol 29.
- Barr, H. 1998. Competent to Collaborate: Towards a Competency-based Model for Interprofessional Education. Journal of Interprofessional Care Vol 12.
- Barr, H. 2005. Effective Interprofessional Education: Argument, Assumption and Evidence. 1st ed. United Kingdom: Oxford. Blackwell Publishing.
- Canadian Interprofessional Health Collaborative. 2009. What is Collaborative Practice.
- Centre for the Advancement of Interprofessional Education (CAIPE). 2002. Interprofessional education: A definition. London: CAIPE.
- Dwiprahasto, I. (2011). Interprofessional Education: Gajahmada University's Experience. International Conference HPEQ, Nusa Dua, Bali.
- Fauziah, F.A. 2010. Analisis gambaran persepsi dan kesiapan mahasiswa profesi FK UGM terhadap interprofessional education di tatanan pendidikan klinik. Skripsi Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.
- Freeth, D. Hammick, M., Reeves, S., Koppel, I. & Barr, H. 2005. Effective Interprofessional Education: Development, Delivery and Evaluation. 1st ed. Blackwell Publishing: Oxford.
- Health Professional Education Quality (HPEQ) Project. 2011. Persepsi Mahasiswa dan Dosen Pendidik Terhadap Model Pembelajaran Interprofessional Education (IPE). Jakarta: Departemen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI.
- Ilingworth, Paul & Sonya Chelvanayagam. (2007). Benefits of Interprofessional Education in Health care. Journal of Nursing. Vol 16, No 2.
- Indah K. 2021. Persepsi Mahasiswa P3D (Program Pendidikan Profesi Dokter) Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Terhadap Interprofessional Education (IPE) dan Interprofessional Collaboration (IPC).
- Kesuma D. 2016. Persepsi Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap Interprofessional Education. 2015.
- Lee, R. 2009. Interprofessional education: Principles and Application. Pharmacotherapy, Vol 29 Ed.3.
- Reeves, S. 2001. A Systematic Review of The Effects of Education on Staff Involved in The Care of Adults with Mental Health Problems. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing Vol. 8.
- Royal College of Nursing. 2006. The impact and effectiveness of interprofessional education in primary care : An RCN literature review. London: RCN.

- Sedyowinarso, M., Fauziah, F. A., Aryakhiyati, N., Julica, M. P., Sulistyowati, E., Masriati, F. N., Olam, S. J., Dini, C., Afifah, M., Meisudi, R., Piscea, S. 2011. Persepsi dan kesiapan mahasiswa dan dosen profesi kesehatan terhadap model pembelajaran pendidikan interprofesi. Proyek HPEQ- Dikti.
- Soemantri D, Setiawati F, Hariyati RR, Sari S, Martha E. 2014. Buku pedoman kerja mahasiswa.2014;1–15. [https://scele.ui.ac.id/berkas\\_kolaborasi/konten/MKK\\_2014genap/BPKM.pdf](https://scele.ui.ac.id/berkas_kolaborasi/konten/MKK_2014genap/BPKM.pdf).
- Sundari S. 2013. Perbedaan Persepsi Mahasiswa Tahap Profesi di FKIK UMY tentang Interprofessional Education di Asri Medical Center Yogyakarta. Med Educ.
- Susilaningsih FS. Nurse-Physician Collaborative Practice in Interdisciplinary Model of Patient Care. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. 2011;14(02). Available at: <https://jurnal.ugm.ac.id/jmpk/article/view/2593/2324>.
- Wahyuni AS, Karota E, Ardinata D. Health science students perception on professional learning after the application of IPE. Enferm Clin. 2020 Mar;30 Suppl 3:132-135.
- World Health Organization (WHO).2010.'Framework for action on interprofessional education & collaborative practice. Geneva: World Health Organization.
- Yuniawan. 2013. Analisa Persepsi dan Kesiapan Dosen FKIK Unsoed terhadap Interprofesional Education. BIMIKI Vol. 1No. 2.

## Biodata Penulis



**Prof. Dr. dr. Arlinda Sari Wahyuni, M.Kes., FISPH, FISCM**, dosen tetap di Departemen Ilmu kesehatan Masyarakat/Ilmu Kedokteran Pencegahan/Ilmu Kedokteran Komunitas FK USU. Lahir di Lhokseumawe 9 Juni 1969 anak keempat dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Alm. Ali Umar dan Ibu Yuzarni. Menjalani pendidikan dasar di SD Yayasan Pendidikan Harapan Medan, pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Medan, dan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Medan. Pendidikan S1 dan Profesi Dokter

diselesaikan di Fakultas Kedokteran USU pada tahun 1995. Program S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2002 dan menyelesaikan Program Doktor (S3) Ilmu Kedokteran FK USU pada tahun 2012.

Jabatan yang diemban saat ini adalah Ketua Departemen IKM/IKP/IKK (Komunitas) FK USU. Organisasi yang diikuti adalah Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia Sumatera Utara (PDKI), Perhimpunan Dokter Kesehatan Masyarakat Indonesia (PDK3MI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Mengembangkan Komisi Etik Penelitian Kesehatan FK USU-RSUP H. Adam Malik Medan dan organisasi kemasyarakatan Muslimat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Sumatera Utara sejak 2005 s.d sekarang.

Aktif melakukan penelitian penelitian, pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah, pembicara dan mengikuti seminar nasional dan internasional serta berbagai pelatihan. Karya-karya ilmiah dan hasil penelitiannya dipublikasikan dalam jurnal internasional yang bereputasi dan jurnal nasional yang terakreditasi.

Berbagai penghargaan yang diterima seperti Satyalencana Karya Satya X tahun 2017. Fellow of Indonesian Society of Public Health (FISPH) dan Fellow of Indonesian Society of Community Medicine (FISCM) pada tahun 2017 dari BKS IKM/IKP/IKK, presenter terbaik I bidang Health dan Medicine pada seminar ilmiah Dies Natalis USU ke 65, Pin emas 10 tahun membina UKS dan Klinik Ar Rahmah Perguruan Al Azhar Medan, Plakat penghargaan pembina SCORE FK USU, dan Juara Tesis Terbaik II di FKM Universitas Indonesia Jakarta.

# Peta Jalan Pendidikan Tinggi Bidang Pertanian Ditinjau Dari Ketidakpastian Dunia Kerja

Darma Bakti

Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

## 1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan dasar utama dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Setiap bangsa dan negara memiliki keinginan untuk maju sesuai cita cita yang telah digariskan sejak suatu negara itu dinyatakan berdaulat dan merdeka dari segala bentuk penjajahan. Indonesia yang masuk dalam kategori negara berkembang tentu saja berusaha untuk maju sesuai dengan potensi dan cita cita seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke- 4 yang berbunyi melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kita menyadari bahwa selama lebih dari 350 tahun Indonesia dijajah Belanda dan Jepang. Akibat dari penjajahan itu masih terasa pengaruhnya sampai sekarang. Politik pecah belah dan pembodohan merupakan alat yang ampuh untuk menguasai sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Sungguhpun kita sudah memiliki Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa tetapi potensi untuk perpecahan itu tetap masih ada. Apalagi Indonesia terdiri dari banyak Pulau, etnis dan agama, apabila tidak bijak mengelolanya berpotensi menjadikan Indonesia menjadi mainan negara lain. Pendidikan Indonesia selama masa penjajahan Belanda hanya dapat dinikmati oleh segilintir orang, menyebabkan bangsa ini tertinggal dan setiap perlawanan dengan mudah dapat dipatahkan. Setelah Indonesia merdeka, barulah bangsa ini bangkit berdirilah berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Perguruan tertinggi pertama didirikan pada masa Hindia Belanda pada tahun 1851 yang diberi nama *School tot of Leiding van Indische of Artsen* yang akhirnya menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Fakultas Teknik pertama yang diberi nama *Technisce Hooge School* di Bandung pada tahun 1920. Pada tanggal 19 Desember 1949 didirikan Universitas Gajah Mada oleh pemerintah Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta, pada saat itu hanya 2 fakultas yaitu Hukum dan Kesusasteraan. Setelah Indonesia merdeka, maka berdirilah PT seperti jamur di musim hujan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Menurut data yang dirilis dari statistika pada tahun 2020 bahwa Indonesia menempati urutan ke -3 PT terbanyak setelah India dan Amerika Serikat. Ada 2694 kampus PT yang tersebar di seluruh Indonesia dan yang paling banyak terdapat di Pulau Jawa.



Kalau berdasarkan jumlah penduduk dan luasnya Indonesia yang merupakan negara kepulauan, maka kondisi ini menguntungkan untuk pemerataan pendidikan. Namun, karena banyaknya kasus penyalahgunaan ijazah palsu dan penyelenggaraan yang menyalahi aturan sehingga SDM yang dihasilkan PT tidak mampu mengikuti perkembangan dunia yang terus berubah sehingga tidak lenier terhadap peningkatan SDM Indonesia. Oleh karena itulah para penyelenggara Pendidikan dan pemerintah seharusnya mengamati perkembangan zaman yang sangat dinamis ini untuk menentukan kebijakan yang tepat. Setiap kebijakan baru didahului oleh isu strategis yang sedang berkembang dan tantangan yang dihadapi untuk rentang waktu tertentu.

Para pendiri bangsa ini sudah memikirkan seperti apa tujuan dan cita cita yang akan diraih bila kelak negara telah berhasil meraih kemerdekaan. Namun, secara jujur kita mengakui bahwa kemajuan yang kita raih masih jauh dari harapan, terbukti kualitas pendidikan tinggi kita masih jauh tertinggal dari bangsa bangsa lain yang berada di kawasan Asia Tenggara. Negara Singapura dan Malaysia dua negara yang paling dekat dengan Indonesia telah jauh melesat di atas Indonesia. Sebagai contoh Natioanal University of Singapore (NUS) telah menembus pada jajaran 20 Perguruan Tinggi (PT) terbaik dunia. Beberapa PT di Malaysia telah menghantarkan 19 PTnya masuk QS World University Ranking dan salah satu diantaranya University of Malaya berhasil menempati rangking ke 59 dunia sedangkan Indonesia hanya menempatkan 8 PT dan yang terbaik adalah UGM dengan posisi pada urutan yang ke- 254. Kita mengetahui PT Indonesia jauh lebih tua dari semua PT yang ada di Malaysia. Bahkan PT malaysia itu pada awal berdiri banyak dosennya didatangkan dari Indonesia. Tantangan terberat bangsa Indonesia adalah dengan disepakatinya Masyarakat ekonomi Asean yang telah ditandatangani pada tahun 2015. Kerjasama regional ini mencakup bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, politik ,dan keamanan. Kesepakatan ini adalah satu keharusan dalam upaya untuk memajukan kawasan serumpun dan membentengi diri dari persaingan global yang semakin tinggi terutama dari negara negara yang telah lebih dulu membuat organisasi serupa di kawasan fasifik. Indonesia yang berada di daerah tropis dengan tanah yang subur dan iklim yang sangat mendukung untuk pertanian tetapi belum menunjukkan ada tanda-tanda ada kemajuan yang berarti untuk menjadi negara maju berbasis Pertanian. Memang beberapa komoditas penting Indonesia seperti sawit, berhasil menjadi negara terluas kebun sawitnya sungguhpun tanaman itu bukanlah tanaman asli Indonesia. Kopi Indonesia terkenal di mancanegara bahkan terbaik di dunia. Demikian juga bidang peternakan seperti sapi, domba, unggas bahkan perikanan baik laut dan air tawar. Potensi ini sesungguhnya dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan yang dapat menaikkan Indonesia menjadi negara maju. Tulisan ini mencoba membuat peta jalan pendidikan pertanian sehingga SDA yang melimpah ini dapat menghantarkan kemajuan bangsa Indonesia secara berkelanjutan mnimal untuk 25-30 tahun ke depan.

## 2. Masalah

Ada beberapa permasalahan untuk membangun pertanian yang maju. Hal ini menjadi perbincangan dalam diskusi Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Tinggi Indonesia (FKPTPI) sejak tahun 2013 yang lalu:

- A. Posisi Pertanian
  - a. Memiliki daya saing rendah dibanding industri lain,
  - b. Menurunnya lahan subur, akibat pengelolaan yang tidak baik,
  - c. Sedikitnya insentif/keuntungan yang diperoleh dari produksi,
  - d. Menurunnya peran dalam pertumbuhan ekonomi,
  - e. Terjadinya kerusakan lingkungan,
  - f. Timbulnya isu baru dalam kesehatan makanan,
  - g. Berkembangannya pembangunan pada masyarakat desa,
  - h. Minimnya SDM yang terlatih.
- B. Kebanyakan masyarakat masih berpikiran bahwa pertanian sebagai sektor yang penuh risiko, dan kurang menguntungkan.
- C. Kebanyakan masyarakat miskin di Indonesia hidup di pinggiran kota atau desa. Sarana dan prasarana infrastruktur desa dan lemahnya posisi tawar dalam perekonomian serta minimnya kesadaran terhadap aspek kesehatan sehingga kehidupannya menjadi kurang menguntungkan.

Dari kenyataan tersebut, penulis mencoba mengidentifikasi sekaligus memberi solusi langkah langkah strategis yang harus dilakukan dalam upaya untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju dan bermartabat. Ada beberapa tantangan baru yang harus dihadapi dalam membangun pertanian ke depan:

1. Ketahanan pangan dan keamanan pangan, masih belum dapat dicapai dalam keadaan mantap,
2. Energi terbarukan yang berasal dari produk pertanian, merupakan peluang yang harus dimanfaatkan,
3. Perubahan iklim dan daya dukung lingkungan yang sempurna,
4. Berkembangnya pesatnya teknologi digital dan informasi,
5. Munculnya perusahaan perusahaan swasta dan pertanian yang dikelola oleh masyarakat.

Isu di atas telah menjadi fokus perhatian oleh FKPTPI sejak beberapa tahun lalu tetapi masalah dan tantangan ini masih tetap terjadi apalagi di masa pandemik covid 2019 ini.

## Pemecahan Masalah

Untuk memacu pembangunan pertanian, maka diperlukan beberapa hal untuk menjadi pemacu agar Pertanian tumbuh lebih cepat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu :

1. Diperlukannya tenaga tenaga yang tangguh dan berjiwa wirausaha (interpreneur),
2. Adanya nilai tambah pertanian dalam bidang pangan, bio energi, bio farma dan biomaterial,
3. Terciptanya lingkungan yang sehat,
4. Ada pembangunan yang berkelanjutan,
5. Pertanian dapat berperan besar dan memberi nilai tambah untuk menunjang ecotourism.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual/keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk mewujudkan bangsa yang cerdas, maka perlu untuk ditumbuh kembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Lulusan PT pertanian yang dihasilkan harus mampu ikut memecahkan masalah yang sedang dihadapi dunia pertanian Indonesia. Masalah pertanian Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Untuk mendapatkan lulusan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. Untuk itu diperlukan selalu meninjau mata pelajaran yang tersebar pada kurikulum. Kurikulum harus dinamis dan selalu disesuaikan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan tantangan yang dihadapi (Gambar 1)(Anonim 2016b).



Setidaknya ada 4 yang harus diperhatikan untuk merevisi satu kurikulum yaitu 1. Tuntutan kerja, 2. Kemajuan teknologi, 3. Kebijakan pemerintah, dan 4. Terjadinya pergeseran indikator keberhasilan. Disamping itu, pertanian tidak dapat dipisahkan dengan persoalan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Pertanian kaitannya pemenuhan pangan bagi masyarakat merupakan persoalan yang belum pernah terselasaikan. Di samping itu, pertanian juga sebagai sumber energi akibat semakin langkanya sumber energi yang berasal dari fosil dan ini pertanian juga sebagai sumber pemasukan negara.

Untuk mampu menjawab tantangan, maka gambaran profil lulusan PT pertanian, diperlukan lulusan yang memiliki karakter Interpreneur (Agropreneur). Untuk menjadikan mendapatkan ilmu dan kemampuan sesuai profil tersebut perlu mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan saran yang akan dicapai. Mata pelajaran dan pelatihan yang diberikan harus dibuat dalam perencanaan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Kurikulum pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Pasal 35 UU Dikti, 2012)

### **3. Strategi Pemecahan Masalah**

Pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode ke-2 telah diterbitkan oleh Kemendikbud visi pendidikan Indonesia 2035, sesuai draf dokumen Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035, adalah membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Peta jalan Pendidikan yang dibuat oleh Kemendikbud ini mendapat kritik tajam dari masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan yang memiliki banyak sekolah seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU). Keberatan itu didasari hilangnya frasa agama dalam bangunan SDM Indonesia di masa depan. Akhirnya MenDikBud, Nadiem Anwar Makarim berjanji akan merevisi visi pendidikan Indonesia dengan memperhatikan semua masukan dari semua elemen masyarakat.

Dalam tulisan ini, penulis membatasi diri untuk memberikan pemikiran tentang bagaimana gambaran Pendidikan di bidang Pertanian setidaknya untuk 2021-2045. Mengambil batasan dengan rentang waktu 2045, karena pada saat itu usia kemerdekaan Indonesia sudah mencapai 100 tahun. Disamping itu, pada tahun 2016 yang lalu di era masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono telah dibuat buku tentang Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) Indonesia sampai tahun 2045. Sebelumnya telah dibuat Buku Putih Pembangunan Ketahanan Pangan 2005-2025 dan Blue Print Ketahanan Pangan Indonesia. Penulis menganggap cakupan dan rencana serta program yang telah dibuat pada pemerintahan yang lalu belum

dilakukan secara berkesinambungan. Akibatnya target menjadi negara agraris yang mandiri dan tangguh sampai saat ini belum tercapai.

Sebelum membuat kerangka gambaran pendidikan pertanian ke depan, maka perlu diperhatikan :

1. Situasi masa kini dan tantangan masa depan,
2. Pertanian berkaitan dengan sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi dan inovasi,
3. Indonesia berada pada upper middle income sehingga diperlukan satu faktor pengungkit untuk mengejar ketertinggalan agar dapat mengejar ketertinggalan dari negara lain khususnya negara tetangga,
4. Penduduk Indonesia yang hampir mencapai 270 juta sedang menikmati bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Oleh karena itu peluang ini harus dimanfaatkan dengan sebaik baiknya untuk menghasilkan generasi yang tangguh, berkarakter baik, maju dan bermartabat.
5. Gambaran pendidikan tinggi pertanian masa depan Indonesia juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah sesuai dengan visi dan misi pemerintah dalam rentang waktu 25 tahun ke depan.

#### **4. Rencana Tindak Lanjut**

Peta jalan pendidikan pertanian dimulai kondisi pertanian saat ini dan tujuan akhir yang ingin dicapai. Untuk membuat satu perencanaan yang baik tentu saja harus dimulai dengan kondisi pertanian saat ini dan tantangan yang dihadapi saat ini dan 25 tahun ke depan. Pertanian Indonesia masih belum maju, karena belum menggunakan teknologi yang baik sebagai mana pertanian di negara lain. Produksi dan ketersediaan pangan belum stabil sehingga kita belum mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangan. SDM pertanian yang ada saat ini belum mampu menjawab tantangan dan enggannya generasi muda pertanian untuk terjun di bidang pertanian khususnya pertanian pangan. Untuk itu, maka profil lulusan yang ingin dicapai adalah agroprenuer yang memiliki karakter sebagai pencipta kerja (*Job seeker*). Pendidikan pertanian masa depan adalah bagaimana mengubah tantangan menjadi peluang. Seorang intreprenuer menurut seorang Mc. Clelland (1917-1998) adalah personal yang mampu menerima tantangan dan berusaha untuk mencapainya dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Menurutnya idealnya satu bangsa akan maju bila jumlahnya intreprenuer paling sedikit 2% dari jumlah populasi. Sementara Indonesia menurut Ciputra (2010) baru mencapai 0,18%, bandingkan dengan Singapura 7,2% apalagi Amerika Serikat 11,5% dari total jumlah penduduk. Ciputra merupakan Intreprenuer Indonesia yang telah berhasil mengembangkan sayap usahanya ke Manca Negara seperti Hawaii, Cina dan negara kawasan Asean lainnya. Beliau menerjemahkan interprenur adalah orang yang mampu mengubah

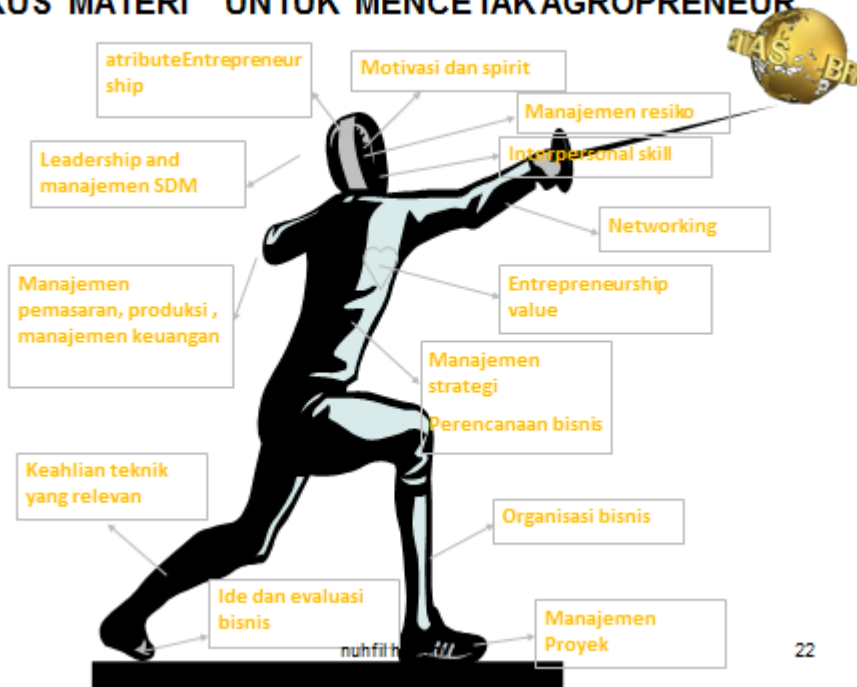
sampah dan barang rongsokan menjadi emas. Untuk itu seorang intrepreur harus berusaha menjadi kreatif, navigator, motivator dan inspirator.

Iklim Indonesia yang berada di daerah tropis merupakan modal utama bagi bangsa ini untuk menjadi negara maju berbasis pertanian. Untuk itu diperlukan SDM unggul yang dengan cepat dan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan siap menghadapi tuntutan keadaan yang begitu cepat berubah. Untuk itu diperlukan kurikulum yang mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap terjun menghadapi tantangan persaingan baik dalam negeri maupun luar negeri. Pendidikan tidak bisa lagi menutup diri terhadap arus perubahan dengan membuat sendiri perencanaan tanpa memperhatikan keadaan di dunia luar. Untuk itu diperlukan lulusan PT Pertanian yang memiliki karakter wirausaha (agropreneur). Untuk bisa menjadi seorang intreprenur, maka diperlukan karakter sbb : 1. Percaya diri, 2. Berani mengambil risiko, 3. Kreatif dan inovatif, 4. Fleksibel, komitmen tinggi, 5. Ditermintai diri yang kuat, 6. Pencari peluang, 7. Menjawab masalah, 8. Menyukai tantangan, 9. Memiliki leadeship, 10. Keahlian dalam bernegosiasi, 11. Peka terhadap perubahan, 12. dan selalu optimis.

Untuk masuk ke dalam dunia kerja diperlukan keahlian atau keterampilan agar mampu menembus dunia kerja yang penuh ketidak pastian. Dalam kurun waktu 40 tahun kurikulum Pendidikan tinggi mengalami percepatan perubahan. Setidaknya ada 4 tema perubahaahan kurikulum yaitu 1.Link and Match, 2. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), 3.Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKN) dan 4. Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ke empat tema itu tujuan nya adalah bagaimana lulusan PT setelah selesai dapat masuk dunia kerja dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan pasar. Padahal lulusan berkualitas, kurikulum tidak menjadi satu satunya penentu mutu lulusan. Namun, ini menjadi faktor pembuka untuk menguatkan kurikulum agar tercapai lulusan yang diinginkan. Untuk bisa bisa masuk ke dunia kerja selain memiliki karakter juga harus memiliki keahlian/ keterampilan. Keterampilan ini menjadi penting karena berhubungan dengan kemampuan mengekspresikan ilmu yang dimiliki untuk bisa mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dinamakan dengan kompetensi. Setidaknya ada beberapa keterampilan/skill yang harus dimiliki seseorang agar mampu masuk ke dunia kerja yaitu : 1. Academic skill, 2. Vocasional skill, 3. Personal skill, 4. Intellectual skill dan 5. Emotional skill. Gabungan dari pembelajaran dan kompetensi ini dinamakan dengan hasil pembelajaran (capaian pembelajaran atau *outcome*). Perguruan Tinggi Pertanian telah banyak melakukan terobosan agar minat para generasi muda mau masuk ke dunia pertanian. Karena di awal reformasi minat para lulusan SMU masuk pertanian sangat rendah, sehingga berimbas pada pekerja atau SDM pertanian khususnya pangan diisi oleh lulusan sekolah Dasar atau sederajat. Oleh karena itu lahirlah SK Dirjen Dikti no 163 tahun 2007 perubahan nomenklatur Program studi yang sangat berimbas pada pada penggabungan beberapa Prodi menjadi satu prodi. Perubahan ini didasarkan pada situasi kesempatan kerja yang tidak menentu sehingga perodi yang selama ini berbasis keilmuan seperti Ilmu Tanah, Ilmu Pemuliaan yang sangat spesifik ilmu kurang bisa

diterima di dunia kerja. Beberapa organisasi perhimpunan seperti di bidang itu melakukan protes karena para lulusan tidak lagi memiliki ilmu yang dalam untuk menguasai ilmu tertentu. Melalui pembahasan yang panjang sampailah pada kesimpulan, maka lulusan yang bisa menjawab tantangan ke depan khususnya bidang pertanian menjadi seorang Agroprenuer (.Anonim 2016b)

## FOKUS MATERI UNTUK MENCETAK AGROPRENEUR



Seorang Agroprenuer harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mampu menjawab tantangan dan mengisi kesempatan meraih peluang di era yang penuh ketidak pastian. Profil lulusan ini yang harus dihasilkan oleh setiap PT Pertanian. Untuk terciptanya Agroprenur yang tangguh diperlukan kurikulum, akademik atmosfer dan sarana serta fasilitas yang mendukung agar tujuan ini tercapai. Kampus merdeka adalah bagian dari kebijakan Merdeka belajar yang dicanangkan oleh Kementerian pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk didukung penuh dan merjemahkan sesuai kondisi yang terus berubah. Merdekan belajar pada dasarnya adalah memberikan kesempatan seluas luasnya kepada mahasiswa unuk mengasah kemampuan dan bakat serta minatnya untuk dapat terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan untuk mengejar karir yang diinginkannya. Agar program ini berhasil, maka fokus pembelajaran dimulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi harus berorientasi pada Student centered learning.

## 5. Kesimpulan dan Saran

1. Peta jalan pendidikan, pendidikan pertanian selalu mengikuti perkembangan dunia di luar kampus khususnya dunia kerja. Oleh karena itu diperlukan penelusuran dan kajian yang mendalam seperti apa jenis pekerjaan yang tersedia dan terbuka peluangnya bagi lulusan perguruan tinggi.
2. Masa era digitalisasi yang memiliki dua sisi yaitu membuat semua serba cepat dan akurat sesuai dengan yang diinginkan manusia. Namun, di sisi lain tatkala semuanya sudah internet of thing bahkan pekerjaan yang biasanya dikerjakan secara konvensional akan kalah bersaing dan bahkan pada satu saat nanti sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu di era industri 4.0, maka pekerjaan dalam bidang pertanian mengharuskan untuk mengikutinya bila produk kita agar mampu bersaing di pasar global karena mutunya baik dan harganya lebih murah.
3. Agar lulusan perguruan tinggi pertanian dapat mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia dan sekaligus agar sektor pertanian dapat berkontribusi dalam pembangunan Indonesia, maka profil lulusan pertanian saat ini di masa mendatang harus memiliki berjiwa dan berkemampuan sebagai agropreneur.

## Daftar Pustaka

1. Anonim, 2014. Strategi Induk Pembangunan Pertanian Indonesia 2015-2045, Pertanian-Bio-Industri Berkelanjutan. Solusi Pembangunan Indonesia Masa Depan. Kementerian Pertanian Indonesia, Jakarta.
2. Anonim, 2016a. Pokok Bahasan Forum Perguruan Tinggi Pertanian (FKPTPI) Indonesia, tentang Pemetaan keunggulan PT Pertanian Indonesia,
3. Anonim, 2016b. Pokok Bahasan tentang Perubahan Kurikulum untuk menyiasati perubahan dunia kerja di bidang Pertanian. Oleh Forum Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI). Ciputra, 2010. Indonesia negara Intreprenuer. Guru guru keluhuran. Rekaman Monumental Mimpi anak tiga zaman. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
4. IN.Thut dan Don Adams, 2005. Pola Pola Pendidikan dalam Masyarakat Kontemporer terjemahan dari "*Educational Patters in Contemporary Societies*". Pustaka Pelajar, Jakarta.
5. Permendikbud No3. Tahun 2020. Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud No 5 tahun 2020. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Surat keputusan Dirjend Dikti No 163 tahun 2007. Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.
8. Undang-Undang no 12. Tentang Perguruan Tinggi.



## Biodata Penulis



**Darma Bakti** dilahirkan di Tanjung balai pada tanggal 22 Januari 1956. Di kota inilah beliau menyelesaikan pendidikannya dari SD, SMP dan SMA. Setelah tammat pendidikan menengah atas pada akhir tahun 1976, beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Pertanian USU dan memilih jurusan Proteksi Tanaman dan selesai pada bulan Desember 1982. Pada tahun 1983 sampai tahun 1985 bekerja sebagai peneliti di Balai Penelitian Tanaman Pangan (Balittan) Sukarami, Padang dan berhenti pada akhir tahun 1985. Sejak Januari 1986 beliau menjadi Staf pengajar tetap di Fakultas

Pertanian USU hingga sekarang. Pada tahun 1988 mengikuti pendidikan Pasca Sarjana (S2) jurusan ilmu Hama tanaman di UGM dan selesai tahun 1991. Pada tahun 1995 kembali melanjutkan studinya Pada Program Doktor di UGM bidang ilmu Pertanian dan selesai pada tahun 2002. Penulis pernah menjadi Rektor Universitas Asahan selama 2 periode sejak tahun 2003-2007 dan 2007-2010. Disamping itu, juga pernah menjadi Dekan Fakultas Pertanian USU, 2010- 2016 dan Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) USU tahun 2016.

Setelah menyelesaikan studinya di Program Doktor, beliau aktif memberikan pelatihan, penceramah dan pemakalah di berbagai forum. Selain sebagai dosen yang mengajar baik pada jenjang S1 maupun S2 dan S3, beliau juga rajin mengikuti diskusi dan pelatihan baik formal maupun informal dan non formal. Pada tahun 1988 mengikuti pelatihan *Ecology and Management of Vertebrate Pest* di Biotrop Bogor dan Ekologi Air dan Manajemen Lingkungan di Pusat Penelitian Analisis Dampak Lingkungan (PusLitDal), UnPad, Bandung pada tahun 1992. Ketika mengikuti pelatihan Biologi Air, beliau tertarik mempelajari Biota Air termasuk berbagai Jenis Ikan. Saat ini, beliau dipercaya sebagai Ketua Komisi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan memasuki periode ke-3 dan Ketua Dewan Riset dan Inovasi Daerah (DRIn) dan Anggota Tim Ahli Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara sampai sekarang ini memasuki periode ke-2. Saat ini lagi giat mulai mengembangkan ayam Buras unggul dan domba.

# **Peta Jalan Pendidikan Tinggi Menuju Sumber Daya Manusia Unggul Tahun 2035**

**Erika Revida**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

## **1. Latar Belakang**

Mendapatkan pendidikan yang berkualitas adalah hak setiap warga negara Indonesia di manapun berada. Dalam Undang-undang Dasar 1945 (Indonesia, 2002) pasal 31 tertulis bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan atau menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang berkualitas yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tilaar (2002) menyatakan bahwa hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia mengandung arti proses humanisasi melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya. Di sisi lain, Trahati (2015) mendefinisikan pendidikan sebagai kegiatan yang dilakukan manusia secara sadar dan terprogram guna membangun personalitas yang baik dan mengembangkan kemampuan atau bakat yang ada pada diri individu manusia agar mencapai tujuan atau target tertentu dalam menjalani hidup. Selanjutnya, dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 (Indonesia, 2003) tertulis bahwa pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajardan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh manusia untuk menjadikan dirinya menjadi lebih baik dari sebelumnya yang diperoleh melalui proses belajar.

Adapun tujuan pendidikan pada dasarnya adalah untuk mencerdaskan masyarakat agar menjadi lebih baik dari sebelumnya terutama dalam menjalani kehidupannya. Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 (Indonesia, 2003) tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Demikian halnya dengan tujuan pendidikan tinggi adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas manusia dalam rangka mencapai tujuan hidupnya yaitu lebih sejahtera. Tujuan pendidikan tinggi ini

akan tercapai melalui peta jalan pendidikan yang baik yaitu pendidikan di masa lalu, masa kini dan di masa yang akan datang sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia unggul tahun 2035.

## **2. Masalah**

Walaupun peta jalan pendidikan Indonesia telah dirumuskan sejak tahun 2020, namun dalam kenyataan masih memiliki kendala atau hambatan tertentu dalam implementasinya. Ada beberapa hal yang harus dijadikan pedoman dalam menyusun peta jalan pendidikan tinggimenuju Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yaitu dosen, kurikulum, pendidikan tinggi, anggaran pendidikan tinggi, dan sarana prasarana pendidikan tinggi. Dengan demikian rumusan masalah dalam hal ini adalah bagaimana peta jalan pendidikan tinggi menuju sumber daya manusia unggul tahun 2035.

### **Pemikiran Pemecahan Masalah**

Siapapun manusia di dunia ini pasti mengakui dan menyadari bahwa sumber daya manusiaunggul adalah merupakan unsur yang sangat penting dan menentukan dalam membangun suatu bangsa, masyarakat dan negaradalam rangka mencapai tujuan negara. Hal ini bukan saja berlaku di negara maju saja, akan tetapi juga di negara-negara sedang berkembang dan terutama di negara-negara yang terbelakang.

Sumber daya manusia adalah subjek dan objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, sumber daya manusia adalah pelaku atau pelaksana serta motor dari terlaksananya suatu pembangunan, sedangkan sebagai objek, sumber daya manusia adalah fokus atau sasaran dari pembangunan yaitu terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan sumber daya manusia.Oleh karena itu baik sebagai objek dan subjek pembangunan, kualitas sumber daya manusia harus selalu ditingkatkan menuju sumber daya manusia unggul di tahun 2035.

Sesungguhnya sumber daya unggul sesuai dengan Visi Pendidikan tahun 2020-2035 (Dewanti, 2020) yaitu Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.

Sumber daya manusia unggul adalah sumber daya manusia yang mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu dari sumber daya manusia lainnya. Menurut Tilaar (1997) ciri-ciri sumber daya manusia unggul adalah memiliki dedikasi dandisiplin, jujur, inovatif, tekun, dan ulet. Ciri-ciri ini akan selalu ada pada sumber daya manusia unggul. Lebih lanjut, Tilaar (1997) menambahkan bahwa sumber daya manusia unggul identik dengan sumber daya yang berkualitas yaitu sadar akan identitasnya dan sadar akan wawasan nusantara. Dengan demikian sumber daya manusia unggul adalah sumber daya manusia yang setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peta jalan pendidikan adalah arah pendidikan yang sudah pernah dilakukan, saat ini dilakukan dan akan dilakukan dimasa yang akan datang. Peta jalan pendidikan mengandung arti adanya keterkaitan atau saling hubungan serta keberlangsungan suatu model pendidikan dengan model pendidikan lainnya di masa lalu, saat ini dan di masa yang akan datang sehingga menjadi linier dengan pencapaian tujuan pendidikan yaitu sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Humas Setkab RI, 2020) ada 4 (empat) hal yang harus diperhatikan dalam menyusun peta jalan pendidikan di Indonesia yaitu:

- a) Melakukan *benchmarking* ke negara-negara yang telah berhasil melakukan adaptasi sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perubahan di masa depan, seperti Australia untuk pendidikan anak usia dini, Finlandia untuk pendidikan dasar dan menengah, di Jerman untuk pendidikan vokasi, dan di Korea Selatan untuk perguruan tinggi.
- b) Membentuk SDM yang berkarakter, berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai Indonesia dan Pancasila.
- c) Mempunyai target-target yang terukur seperti angka target angka partisipasi untuk pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.
- d) Melakukan reformasi pendidikan oleh semua pihak atau unit kerja.

Adapun tujuan dari *benchmarking* dalam hal ini adalah untuk melihat dan mempelajari serta bertukar informasi tentang keberhasilan sistem pendidikan yang dilakukan oleh negara lain untuk kemudian dijadikan dasar dalam memperbaiki sistem pendidikan di negara Indonesia dalam rangka membentuk SDM yang berkarakter, berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai Indonesia dan Pancasila dengan menggunakan target-target tertentu yang terukur seperti angka target angka partisipasi untuk pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi sehingga dapat diketahui capaian peta jalan pendidikan yang sedang berjalan. Demikian halnya dengan reformasi pendidikan yang dilakukan oleh semua pihak atau unit kerja agar tercapai perubahan ke arah yang lebih baik.

### **3. Strategi Pemecahan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diajukan, maka ada beberapa strategi pemecahan masalah sehubungan dengan peta jalan pendidikan tinggi menuju SDM unggul yaitu dengan meningkatkan kualitas: a) dosen, b) kurikulum pendidikan tinggi, c) anggaran pendidikan, dan d) sarana dan prasarana pendidikan.

#### **a. Kualitas Dosen.**

Kiranya tidak ada yang bisa menyangkal bahwa dosen adalah salah satu penentu utama dalam meningkatkan sumber daya manusia unggul di perguruan tinggi. Hal ini disebabkan tugas pokok dan fungsi dosen adalah

sebagai *transfer of knowledge* kepada mahasiswa yang pada akhirnya akan membentuk sumber daya manusia unggul pada generasi masa depan. Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 (Indonesia, 2005) tertulis bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu, tugas pokok dan fungsi dosen adalah melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian peta jalan pendidikan berkaitan dengan dosen harus mengacu pada tri dharma perguruan tinggi tersebut. Tingkat pendidikan dosen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas "*transfer of knowledge*" dosen kepada mahasiswa. Semakin tinggi tingkat pendidikan dosen, maka kualitas "*transfer of knowledge*" yang diberikan oleh dosen akan lebih berkualitas yang pada akhirnya akan membentuk sumber daya manusia unggul. Namun dalam kenyataannya jumlah dosen yang berpendidikan Doktor (S3) masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan jumlah dosen yang sudah bergelar Doktor (S3) di luar negeri. Jehamun (2020) menyatakan bahwa masih 14,5 persen dari total jumlah dosen di Indonesia yang bergelar Doktor (S3). Idealnya di suatu perguruan tinggi jumlah dosen yang bergelar Doktor (S3) haruslah minimal mencapai 50% dari total jumlah dosen. Oleh karena itu, peta jalan pendidikan tinggi harus merumuskan sebanyak 50% jumlah dosen sudah berpendidikan Doktor (S3) pada tahun 2035. Tri dharma yang kedua yaitu penelitian. Dosen harus selalu melakukan penelitian yang relevan dengan bidang ilmunya. Melalui hasil penelitian dosen akan menemukan teori-teori atau ilmu pengetahuan baru yang akan ditransferkan kepada mahasiswa. Hasil penelitian dosen juga disebarluaskan ke jurnal-jurnal internasional bereputasi yang akan menaikkan akreditasi perguruan tinggi. Demikian halnya dengan tri dharma yang ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat, peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen haruslah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen sehingga teori yang sudah teruji berdasarkan hasil penelitian betul-betul dapat diterapkan oleh masyarakat.

b. Kualitas Kurikulum Pendidikan

Kurikulum pendidikan adalah seperangkat mata ajar yang merupakan satu kesatuan yang akan diajarkan oleh dosen di lembaga pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Sukmadinata (2009) menyatakan bahwa kurikulum adalah salah satu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum adalah suatu rencana yang dijadikan sebagai pedoman atau pegangandalam kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya, dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 (Indonesia, 2003) tertulis bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi kurikulum merupakan pedoman mengenai serangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Hamalik (1990) menyatakan ada 3 (tiga) peranan penting kurikulum dalam lembaga pendidikan yaitu:

- Peranan konservatif. Dalam hal ini kurikulum pendidikan menjadi sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya lama yang masih relevan dengan masa kini dan diharapkan masih sesuai dengan masa yang akan datang.
- Peranan kreatif, yaitu kurikulum harus dapat menciptakan iklim untuk tumbuhnya kreativitas di kalangan mahasiswa agar mahasiswa memiliki budaya untuk menciptakan hal-hal yang baru yang selanjutnya menciptakan sumber daya manusia unggul
- Peranan kritis dan evaluatif. Kurikulum pendidikan tinggi harus memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menilai atau mengkritisi. Oleh karena itu kurikulum pendidikan tinggi harus selalu dievaluasi dan dikritisi agar sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks).

Kurikulum pendidikan tinggi adalah jantungnya pendidikan tinggi. Tanpa kurikulum, maka pendidikan tidak akan berjalan dengan baik. Kurikulum pendidikan tinggi harus dikelola dengan baik melalui manajemen kurikulum yang dimulai dari perencanaan kurikulum, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kurikulum. Oleh karena itu dalam peta pendidikan tinggi harus tersusun peta jalan kurikulum pendidikan tinggi yang baik sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia unggul 2035.

c. Kualitas Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan tinggi menjadi penentu berjalannya sistem pendidikan tinggi dengan baik dan lancar, tanpa anggaran yang memadai, maka pelaksanaan pendidikan tinggi tidak akan berjalan seperti yang diharapkan dan tujuan untuk menciptakan sumber daya manusia unggul pun akan sulit tercapai. Mulyasa (2002) menyatakan bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu sumber yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu diperlukan manajemen anggaran pendidikan tinggi yaitu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi serta pengawasan anggaran pendidikan tinggi. Peta jalan anggaran pendidikan tinggi harus disusun dengan baik agar anggaran pendidikan tinggi selalu tersedia dengan baik dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pendidikan tinggi untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul 2035. Di sisi lain, ketercukupan anggaran pendidikan suatu perguruan tinggi merupakan ukuran utama keberhasilan perguruan tinggi dalam menjalankan manajemen perguruan tinggi, tanpa dukungan anggaran pendidikan maka perguruan tinggi akan sulit mencapai tujuannya sesuai dengan yang

diharapkan. Namun yang menjadi masalah adalah seringkali perguruan tinggi belum memiliki ketercukupan anggaran pendidikan yang signifikan sehingga pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi belum memenuhi seperti yang diharapkan. Bowen (1981) menyatakan bahwa ada hukum biaya perguruan tinggi yang berlaku yaitu peningkatan mutu suatu perguruan tinggi selalu diiringi dengan peningkatan anggaran pendidikan. Peningkatan mutu dosen, pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tenaga kependidikan yang berkualitas, perpustakaan, sarana prasarana pendidikan lainnya semuanya memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu diperlukan peta jalan anggaran pendidikan tinggi yang baik agar kebutuhan akan anggaran pendidikan selalu tersedia dengan baik. Sangat diperlukan peningkatan atau perluasan sumber-sumber anggaran pendidikan, bukan saja hanya mengharapkan anggaran dari pemerintah dan dana masyarakat saja, akan tetapi sudah selayaknya setiap perguruan tinggi mempunyai sumber dana yang *ajeg* dan tetap.

d. Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Sarana dan prasarana pendidikan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi. Mulyana (2002) mendefinisikan sarana pendidikan yaitu peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, mejakursi, serta alat-alat dan media pembelajaran, adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas belajar yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah yang digunakan sekolah untuk pengajaran pendidikan lingkungan hidup, halaman sekolah sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan prasarana pendidikan. Di sisi lain, Rohman dan Amri (2012) menyatakan bahwa sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan sarana prasarana pendidikan adalah segala sesuatu peralatan atau perlengkapan yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dibutuhkan dalam proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Semakin baik kualitas sarana dan prasarana pendidikan, maka proses belajar mengajar menjadi lebih baik dan menyenangkan dan sebaliknya.

#### 4. Rencana Tindak Lanjut

##### a. Kualitas Dosen.

Terkait dengan masih minimnya jumlah dosen yang berpendidikan Doktor (S3). maka rencana tindak lanjut peta jalan pendidikan dosen haruslah memasukkan unsur-unsur sebagai berikut:

- Memotivasi dosen agar mau studi lanjut program Doktor (S3) dengan menyediakan dana pendidikan penuh untuk studi lanjut Doktor (S3) khususnya untuk dosen tidak mendapatkan beasiswa.
- Memotivasi dosen agar melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun dengan dana yang tersedia di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan perguruan tinggi masing-masing
- Melakukan *workshop* tentang penulisan artikel pada jurnal internasional bereputasi secara periodik diikuti dengan pendampingan penulisan artikel jurnal internasional bereputasi.
- Meningkatkan insentif penulisan jurnal dan buku, hak kekayaan intelektual dan hasil karya dosen lainnya.

##### b. Kualitas Kurikulum Pendidikan

Beberapa rencana tindak lanjut berkaitan dengan peta jalan pendidikan perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

- Merevisi kurikulum secara periodik sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) dengan mengundang para dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan dan *stakeholders* lainnya.
- Sejak tahun 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Oleh karena itu kurikulum pendidikan tinggi harus merevisi kurikulum pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka antara lain dengan menjalin kerja sama dengan program studi atau perguruan tinggi lainnya agar mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan tiga semester di luar program studinya.

##### c. Kualitas Anggaran Pendidikan

Johnson, dkk (1995) menyatakan 2 (dua) cara yang dapat dilakukan perguruan tinggi untuk meningkatkan anggaran pendidikan yaitu melalui diversifikasi pendapatan atau menggali kesempatan sumber-sumber pendapatan baru dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang telah ada. Rencana tindak lanjut peta jalan pendidikan anggaran pendidikan yang perlu dilakukan adalah:

- Meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang dapat menambah anggaran pendidikan antara lain dengan meningkatkan pendapatan asli perguruan tinggi (PAPT) baik melalui kerja sama dengan lembaga lainnya, koperasi maupun badan usaha perguruan tinggi lainnya.



- Komersialisasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen di perguruan tinggi.
  - Meningkatkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan industri antara lain dengan melakukan penelitian-penelitian dan sebagainya
  - Sumbangan sukarela yang tidak mengikat.
- d. **Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan**
- Ishaq (2006) menyatakan sarana dan prasarana pendidikan antara lain terdiri ruang kuliah, renovasi dan rehabilitasi ruang belajar beserta perangkat pendukungnya, ruang laboratorium, perpustakaan, komputer, pusat sumber belajar, dan termasuk rumah dosen/guru, pimpinan, penjaga, WC dosen dan mahasiswa. Sedemikian pentingnya sarana prasarana dalam mendukung proses belajar mengajar di perguruan tinggi dalam rangka mencapai tujuan yaitu menciptakan sumber daya manusia unggul. Oleh karena itu peta jalan pendidikan sarana prasarana pendidikan yang perlu disusun dan dilakukan berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan tinggi antara lain yaitu dengan melakukan perencanaan, pengelolaan atau pemanfaatan serta perawatan sarana prasarana pendidikan tinggi dengan baik, menyediakan ruang kuliah yang cukup, laboratorium dan lainnya sehingga mendukung proses belajar mengajar dengan baik.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan latar belakang, masalah, pemikiran pemecahan masalah, strategi pemecahan masalah, dan rencana tindak lanjut, maka dapat dirumuskan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

- a. Dosen adalah unsur yang sangat penting dalam peta jalan pendidikan tinggi menuju sumber daya manusia unggul tahun 2035. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kualitasnya antara lain dengan memberikan insentif yang signifikan pada setiap karya yang dilakukan oleh dosen sehingga dosen lebih bersemangat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu menciptakan sumber daya manusia unggul 2035, melakukan *workshop* dan pendampingan tata cara penulisan artikel jurnal internasional bereputasi.
- b. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat unsur-unsur yang menjadi pedoman di perguruan tinggi dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yaitu menciptakan sumber daya manusia unggul. Oleh karena itu kurikulum pendidikan tinggi harus selalu dievaluasi secara periodik dengan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pasar, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni (ipteks) serta kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka.
- c. Implementasi pendidikan tinggi memerlukan dana/anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu diperlukan terobosan baru untuk meningkatkan sumber-sumber dalam rangka meningkatkan anggaran pendidikan baik

berupa pendapatan asli perguruan tinggi (PAPT) baik dalam bentuk kerja sama, kopersi maupun badan usaha lainnya, sehingga setiap perguruan tinggi mempunyai kebebasan finansial dalam meningkatkan tri dharma perguruan tinggi. Komersialisasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen di perguruan tinggi. Demikian halnya dengan meningkatkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan industri antara lain dengan melakukan penelitian-penelitian dan sebagainya, dan sumbangan sukarela yang tidak mengikat.

- d. Sarana dan prasarana pendidikan sangat diperlukan dalam implementasi pendidikan tinggi, mulai dari sarana prasarana pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan tinggi yaitu sumber daya manusia unggul tahun 2035. Oleh karena itu peta jalan pendidikan sarana dan prasarana pendidikan perlu dilengkapi dan ditingkatkan kualitasnya mulai dari perencanaan, pengelolaan, dan perawatan sarana prasarana pendidikan tinggi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi yaitu menciptakan sumber daya manusia unggul 2035.

## Daftar Pustaka

- Bowen, H.R. (1981). *The Cost of Higher Education How Much Do Colleges and Universities Spend How Much They Should Spend*. San Francisco: Jossey- Bass Publisher.
- Dewanti, A.K. (2020). *Menyoal Peta Jalan Pendidikan Indonesia*. Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik.
- Hamalik, O. (1990). *Pengembangan Kurikulum: Dasar-Dasar dan Perkembangannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Humas Setkab RI (2020). "Selain Ingin SDM Unggul Berkarakter, Ini 4 Arah Presiden Soal Peta Jalan Pendidikan 2020-2035". <https://setkab.go.id/selain-ingin-sdm-unggul-berkarakter-ini-4-arahan-presiden-soal-peta-jalan-pendidikan-2020-2035/> Diakses 4 Juni 2020.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Indonesia, P.R. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Indonesia, P.R. (2005). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Ishaq, I. (2006). *Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan*. Yayasan Obor Indonesia.

- Jehamun, P. (2020). "Baru 14,5 Persen Dosen di Indonesia yang Bergelar Doktor". <https://bernasnews.com/baru-145-persen-dosen-di-indonesia-yang-bergelar-doktor/> Diakses 22 Desember 2020.
- Mulyasa, E. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Johnson, S.L., Bernard, C.L., Rush, S.C. and Kidwell, J.J. Eds., (1995). *Reinventing The University: Managing and Financing Institutions Of Higher Education* (Vol. 37). John Wiley & Sons Incorporated.
- Rohman, M. & Amri, S. (2012). *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT Prestasi Persada.
- Sukmadinata, N.S., 2002. *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H.A.R. (1997). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi: Visi, Misi, Dan Program Aksi Pendidikan dan Pelatihan Menuju 2020*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tilaar, H.A.R., (2002). *Perubahan Sosial Dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widya Sarana Indonesia Bekerja Sama dengan Center For Education And Community Development Studies.
- Trahati, M.R. (2015). *Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah Dasar Negeri Tritih Wetan 05 Jeruklegi Cilacap*. Basic Education.5 (12).

## Biodata Penulis



**Prof. Dr. Erika Revida, MS** lahir di Simalungun, 21 Agustus 1962. Menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung bidang ilmu Administrasi Publik pada tahun 2005. Pada tahun 1991 menyelesaikan pendidikan Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, dan menempuh pendidikan Sarjana (S1) bidang Ilmu Administrasi Publik pada tahun 1996 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara. Menjadi dosen tetap program studi Ilmu Administrasi Publik FISIP USU Sejak 1 Januari 1987, dan sejak tanggal 1 April 2007 menjadi Guru Besar Ilmu

Administrasi Publik FISIP USU Medan dan pada saat ini menjadi Sekretaris Magister Perencanaan Wilayah dan Perdesaaan Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Penulis banyak menulis artikel pada jurnal nasional dan internasional terutama bidang pemberdayaan birokrasi, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, modal sosial dan pelayanan pariwisata. Email: erikarevida@yahoo.com.

# Peta Jalan Pendidikan Indonesia

**Gontar A. Siregar**

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

## 1. Latar Belakang

Dalam meningkatkan kecerdasan, keterampilan, budi pekerti, memperkuat kepribadian dan menumbuhkan semangat kebersamaan, dibutuhkan Pendidikan sebagai suatu proses yang penting agar dapat membangun diri sendiri dan membangun bangsa.<sup>1</sup> Sesuai UU No. 20 tahun 2003, Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.<sup>2</sup> Jika ditinjau dari undang-undang tersebut, maka akan didapati bahwa tujuan pendidikan nasional tidak hanya sebatas untuk mencerdaskan anak secara intelektual semata, namun juga mengembangkan kepribadian mereka secara utuh. Ini sejalan dengan tantangan kehidupan global yang membutuhkan sumber daya manusia dengan kepribadian, kemandirian, kreativitas, dan motivasi (semangat) untuk beradaptasi dan perubahan kehidupan.<sup>3</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang sejarah, aspek pendidikan merupakan satu hal melekat dengan kelangsungan hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Kita masih dapat menemukan beragam karya besar peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sampai saat ini hingga saat ini tidak lepas dari pengaruh pendidikan pada masa kala. Indonesia banyak mengalami perubahan dalam hal Pendidikan dari waktu ke waktu, mulai dari hanya diperuntukkan untuk kalangan agamawan dan bangsawan, hingga pendidikan yang merata untuk semua kalangan.

Agama Islam juga mempengaruhi pola dan sistem pendidikan yang sudah lama berjalan. Pendidikan mengalami perubahan mulai dari yang sangat eksklusif dan hanya ditujukan bagi kalangan bangsawan untuk melegitimasi kekuasaan Raja pada masa Hindu-Budha, menjadi pendidikan untuk seluruh masyarakat, tetapi masih mengikuti pola padepokan yang sudah berjalan sejak masa Hindu-Budha yang kemudian berkembang menjadi sistem pesantren.

Pendidikan berjalan dengan pola atau tujuan penyebaran agama selama masa penjajahan VOC di nusantara. Misi penyebaran agama menjadi prioritas dalam pelaksanaan pendidikan saat itu. Pola pendidikan mulai berubah ketika memasuki awal abad ke-20, dimana pada masa ini pendidikan mulai memiliki tujuan lain. Pemerintah kolonial Belanda yang mulai mengembangkan industrialisasi banyak membutuhkan tenaga kerja terdidik. Maka, sistem pendidikan pada masa itu mulai ditujukan untuk membentuk tenaga kerja yang bisa digaji dengan murah. Orientasi pendidikan di masa adalah untuk

sekedar memperoleh status pegawai pemerintah (ambtenaar). Orientasi pendidikan pada masa penjajahan Jepang adalah kebutuhan mereka untuk memenangkan perang dan membentuk persatuan Asia Timur Raya, sehingga pendidikan yang dijalankan berprioritas pada pendidikan militer dan penekanan pada wajib militer. Pada masa penjajahan, pemuda-pemuda pribumi mendapatkan pendidikan dari penjajah justru berbalik menyusun kekuatan untuk memerdekakan bangsanya. Kemudian setelah merdeka, ada sistem pendidikan penjajah ditinggalkan dan ada yang masih dipertahankan.<sup>2</sup>

Setelah Kemerdekaan, rumusan tujuan pendidikan nasional yang dimiliki Indonesia sangat ideal dan komprehensif, yaitu untuk memberikan suasana kebatinan dan semangat serta motivasi bagi setiap komponen manusiawi yang terkait dan terus berusaha untuk mencapai cita-cita yang ideal itu. Dijelaskan pula dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1, butir 1, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, menurut amanat UU No. 20 Tahun 2003 ini, peserta didik harus didorong untuk aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mampu mengendalikan diri, memiliki kepribadian yang kuat, akhlak yang mulia serta keterampilan-keterampilan yang diperlukan yang dampaknya pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **2. Masalah**

Banyak permasalahan pendidikan di Indonesia yang ditemukan tiap tahunnya. Mulai muncul permasalahan dari input, proses, sampai output. Ketiganya saling berhubungan satu sama lain. Input mempengaruhi keberlanjutan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran sedikit banyak turut mempengaruhi hasil output. Kemudian output akan kembali berlanjut ke input dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi atau masuk ke dalam dunia kerja, dimana teori mulai dipraktekkan.<sup>4</sup>

Pemerataan pendidikan merupakan salah satu permasalahan yang terjadi pada pendidikan di Indonesia. Persoalan pemerataan pendidikan setidaknya disebabkan oleh Perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat, Perbedaan fasilitas pendidikan, Sebaran sekolah tidak merata, Nilai masuk sebuah sekolah dengan standart tinggi, Rayonisasi.

Permasalahan lain adalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kapabilitas dan kualitas para pendidik. Kinerja pendidik merupakan serangkaian hasil dari proses dalam menjalankan pekerjaannya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemampuan seorang pendidik untuk menciptakan model pembelajaran baru atau memunculkan kreasi baru akan membedakan dirinya dengan pendidik lain.<sup>1</sup> Hal ini menuntut para pendidik harus mempunyai kreativitas agar didapatkan mutu yang baik

dan berpengaruh positif terhadap pembelajaran, kecepatan daya tangkap suatu ilmu yang akan dicerna oleh peserta didik juga akan dipengaruhi selama proses pembelajaran.

Selanjutnya adalah masalah efisiensi dan efektivitas pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga dan biaya tepat sasaran, dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Kurangnya kualitas Pendidikan yang diperoleh di Indonesia kemungkinan merupakan penyebab tingginya pengangguran di Indonesia. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang dijalani. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan dimana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana / program yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan pendidikan tidak efektif jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan pendidik tidak terlaksana dengan sempurna. Ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sehingga, lulusan yang tidak kompeten yang akan dihasilkan. Keadaan ini akan menghasilkan masalah lain seperti pengangguran.

Pendidikan juga dipengaruhi oleh Laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan yang sangat pesat akan berdampak terhadap masalah pemerataan serta mutu dan relevansi pendidikan. Pertumbuhan penduduk akan berpengaruh terhadap jumlah peserta didik. Semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak dibutuhkan sekolah-sekolah untuk menampungnya. Jika daya tampung suatu sekolah tidak memadai, maka akan banyak peserta didik yang terlantar atau tidak bersekolah. Hal ini akan menimbulkan masalah pemerataan pendidikan.

Pada masa pandemi COVID-19, permasalahan yang muncul di sektor pendidikan berupa pembelajaran jarak jauh dan tekanan finansial yang terjadi di berbagai institusi termasuk institusi pendidikan. Banyak sekolah dan universitas menghadapi tekanan keuangan, sebagian karena orang tua dan siswa meminta pengurangan biaya dan mendorong institusi untuk menurunkan biaya kuliah.

### **3. Strategi Pemecahan Masalah**

Seperti yang telah diketahui, permasalahan pendidikan merupakan suatu penghambat keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Maka dibutuhkan strategi untuk memecahkan permasalahan pendidikan. Dalam usaha pemerataan pendidikan, diperlukan pengawasan yang serius oleh pemerintah. Selain itu, perluasan kesempatan belajar di jenjang pendidikan tinggi juga penting untuk pemerataan pendidikan. Pendidikan dalam usaha pengendalian laju pertumbuhan penduduk sangat diperlukan. Pelaksanaan program ini dapat ditingkatkan dengan mengkampanyekan program KB dengan sebaik-baiknya hingga pelosok negeri ini.

Peran pendidik tidak bisa lepas dari karakteristik pekerja profesional, dengan demikian pekerjaan pendidik akan dapat dilakukan dengan baik dan benar apabila seseorang telah melewati suatu proses pendidikan yang dirancang untuk itu. Kapasitas pendidik harus terus ditingkatkan. Peningkatan kualitas pendidik sangat tergantung pada keinginan dan upaya pendidik itu sendiri. Artinya, pendidik tidak harus didikte dan diberi berbagai arahan dan instruksi. Yang penting adalah perlu disusun standar profesional pendidik yang akan dijadikan acuan pengembangan mutu pendidik dan pembinaan pendidik diarahkan pada sosok pendidik pada era globalisasi ini. Sosok pendidik ini penting karena pendidik merupakan salah satu bentuk soft profession bukannya hard profession seperti dokter atau insinyur. Yang pasti, pendidikan dan konseling pendidik akan berbeda dengan dokter atau insinyur. Karena hakikat kerja dua bentuk profesi tersebut berbeda. Rendahnya kualitas pendidik, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai pendidik melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas pendidik.

Kementrian pendidikan dan kebudayaan menyusun 10 strategi utama dalam rangka menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia, Strategi tersebut berupa:<sup>5</sup>

1. Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antarsekolah (TK-SD-SMP-SMA, informal): sekolah penggerak, program pembelajaran sebaya, pengelolaan administrasi bersama, pendidikan informal yang berbasis nilai.
2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah: memperbaiki sistem rekrutmen, meningkatkan kualitas pelatihan, penilaian, serta mengembangkan komunitas/platform pembelajaran.
3. Membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi : yang berpusat pada siswa, interdisipliner, relevan, berbasis proyek, dan kolaboratif.
4. Memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian: penyederhanaan konten materi, fokus pada literasi dan numerasi, pengembangan karakter, berbasis kompetensi, dan fleksibel.
5. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata: bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui pendekatan yang bersifat personal dan konsultatif serta memberikan penghargaan berdasarkan prestasi.
6. Membangun sekolah/lingkungan belajar masa depan: aman dan inklusif, memanfaatkan teknologi, kolaboratif, kreatif, dan sistem belajar berbasis pengalaman.
7. Memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan: dana CSR, insentif pajak, kemitraan swasta publik, otonomi, dan keuntungan yang lebih besar.
8. Mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi: pihak industri atau asosiasi terlibat dalam penyusunan kurikulum, mendorong



- pembelajaran, dan pembiayaan pendidikan melalui sumbangan sektor swasta atau CSR.
9. Membentuk pendidikan tinggi kelas dunia: diferensiasi misi pendidikan tinggi sebagai pusat-pusat unggulan serta mempererat hubungan dengan industri dan kemitraan global.
  10. Menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih: bersifat suka rela, berbasis data, merujuk pada praktik terbaik tingkat global, serta pelibatan industri atau komunitas

#### **4. Rencana Tindak Lanjut**

Masa globalisasi banyak menuntut perbaikan sistem pendidikan nasional serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Salah satu cara yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikannya terlebih dahulu. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam segala bidang di dunia internasional.<sup>6</sup>

Dari segi ekosistem, pendidikan sekarang memiliki ciri sekolah sebagai tugas, pimpinan sebagai pengatur, sistem tertutup (pemangku kepentingan berjalan sendiri), lebih banyak sumber daya didedikasikan untuk pelajar yang lebih dewasa, benturan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, infrastruktur sekolah yang tidak memadai, manajemen sekolah terlalu administratif dan terisolasi, dan orang tua/ komunitas sebagai peserta yang pasif. Dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan maka arahan bentuk pendidikan di masa depan berupa sekolah sebagai kegiatan yang menyenangkan, pimpinan memberikan pelayanan, sistem terbuka (berbagai pemangku kepentingan berkolaborasi), lebih banyak sumber daya didedikasikan untuk pelajar yang lebih muda, mendapat dukungan dari pemerintah daerah, infrastruktur sekolah yang memadai dan mendukung pembelajaran, manajemen sekolah yang kolaboratif dan kompeten, dan menjadikan orang tua/ komunitas lebih terlibat.

Pada masa sekarang, guru berperan sebagai pelaksana kurikulum, di masa depan guru sebagai pemilik dan pembuat kurikulum. Guru berperan sebagai sumber pengetahuan satu-satunya pada pendidikan saat ini, hal ini mengakibatkan peserta didik menjadi cenderung pasif. Rencana untuk masa depan guru diberikan peran sebagai fasilitator dari berbagai sumber pengetahuan, dengan ini diharapkan para peserta didik dapat lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Saat ini kualitas seorang guru ditentukan oleh kualifikasi, di masa depan kualitas seorang guru bergantung pada kompetensi dan tujuannya. Pelatihan yang didapatkan para guru saat ini berdasarkan teori, sedangkan di masa depan pelatihan berdasarkan praktik. Kinerja guru dinilai berdasarkan daftar persyaratan/ administratif pada sistem pendidikan saat ini, ke depan kinerja para guru akan dinilai secara holistik.

Dari sudut pandang pedagogi, pendidikan saat ini yang menggunakan pendekatan standardisasi akan dirubah menjadi menerapkan pendekatan heterogen. Siswa berperan sebagai penerima pengetahuan pada pendidikan saat ini, rencana di masa depan siswa ikut menentukan kegiatan belajar. Sistem pembelajaran berdasarkan sistem yang diterapkan pada saat ini akan dirubah menjadi system pembelajaran berorientasi pada siswa. Fokus kegiatan pendidikan saat ini adalah kegiatan tatap muka, sementara di masa depan pembelajaran memanfaatkan teknologi. Saat ini mengajar sebagai kegiatan individualis dan pengajaran berdasarkan pembagian umur, di masa depan akan diterapkan penggunaan kegiatan kelompok dalam pengajaran dan pengajaran berdasarkan level kemampuan siswa.

Kurikulum pendidikan saat ini bersifat memiliki perkembangan yang linear , kurikulum berdasarkan konten, kurikulum diwajibkan, fokus kepada kegiatan akademik, dan pelatihan vokasi dipimpin oleh pemerintah. Di masa depan kurikulum pendidikan akan diarahkan menjadi memiliki perkembangan yang fleksibel, kurikulum berdasarkan kompetensi, kurikulum sebagai kerangka/ menu, fokus kepada keterampilan lunak (soft skill) dan pengembangan karakter, pelatihan vokasi dipimpin oleh industri. Sistem penilaian yang bersifat sumatif/ menghukum, dan menerapkan standardisasi penilaian pada pendidikan saat ini akan dirubah menjadi penilaian bersifat formatif/ mendukung penilaian berdasarkan portofolio.

1. Siswa ikut menentukan kegiatan belajar
2. Pembelajaran berorientasi pada siswa
3. Pembelajaran memanfaatkan teknologi
4. Penggunaan kegiatan kelompok dalam pengajaran
5. Pengajaran berdasarkan level kemampuan siswa

Dalam masa Pandemi, perubahan struktural yang terjadi akan semakin mendorong percepatan pelaksanaan beberapa inisiatif, yaitu:<sup>5</sup>

1. Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antarsekolah (TK-SD-SMP-SMA, informal.)
2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah.
3. Membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi.
4. Memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian.
5. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata.
6. Membangun sekolah/lingkungan belajar masa depan.
7. Memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan.
8. Mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi.
9. Membentuk pendidikan tinggi kelas dunia.
10. Menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Dalam perjalanannya terdapat banyak permasalahan pendidikan di Indonesia tiap tahunnya. Mulai muncul permasalahan dari input, proses, sampai output. Ketiganya saling berhubungan satu sama lain. Input mempengaruhi keberlanjutan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran pun turut mempengaruhi hasil output. Seterusnya, output akan kembali berlanjut ke input dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi atau masuk ke dalam dunia kerja, dimana teori mulai dipraktekkan. Permasalahan terjadi dari segi pemerataan pendidikan, mutu pendidikan, kualitas pendidik hingga laju pertumbuhan penduduk juga berperan dalam permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Pada masa pandemi covid 19, permasalahan yang muncul di sector pendidikan berupa pembelajaran jarak jauh dan tekanan finansial yang terjadi di berbagai institusi termasuk institusi pendidikan. Banyak sekolah dan universitas mendapatkan tekanan finansial, salah satunya karena orang tua dan siswa meminta rabat dan mendorong institusi untuk menurunkan biaya kuliah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan strategi dan rencana tindak lanjut terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Kementerian pendidikan dan kebudayaan menyusun 10 strategi utama dalam rangka menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia, Strategi tersebut berupa:

1. Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antarsekolah (TK-SD-SMP-SMA, informal.)
2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah.
3. Membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi.
4. Memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian.
5. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata.
6. Membangun sekolah/lingkungan belajar masa depan.
7. Memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan.
8. Mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi.
9. Membentuk pendidikan tinggi kelas dunia.
10. Menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih.

## Daftar Pustaka

1. Saptono, A. 2017. Pengaruh Kreativitas Guru Dalam Pembelajaran Dan Kecerdasan Emosional Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Pada Siswa Kelas X Di Sma Negeri 89 Jakarta. *Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan*, 14(1), 105– 112.
2. Sugiyono et al. Peta Jalan Pendidikan Indonesia. TIM UNY.
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 20. Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Megawanti, P. 2012. Permasalahan Pendidikan Dasar Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 2(3), 227–234.
5. Kemendikbud. 2020. Peta Jalan Sistem Pendidikan 2020-2035
6. Mastuhu. 2003. Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Abad 21. Yogyakarta: Safiria Insania Press.

## Biodata Penulis



**Prof. Dr. dr. Gontar Alamsyah Siregar, Sp.PD, K-GEH**, Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Lahir di Sipirok pada tanggal 20 Februari 1954. Penulis memperoleh Gelar Dokter pada tahun 1980 pada Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Menyelesaikan pendidikan Spesialis Ilmu Penyakit Dalam pada tahun 1991 di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Meraih Brevet Konsultan dalam Bidang Gastroentero-Hepatologi pada tahun 2003 dan gelar Doktor dalam Ilmu Kedokteran di Universitas Padjadjaran pada tahun 2018.

Penulis juga menyelesaikan beberapa program pendidikan pada tahun 2000 *Fifteenth International Workshop on Therapeutic Endoscopy (Hongkong)*, *Observer Training Attachment in the Department of Gastroenterology (Singapore General Hospital/Post Graduate Medical Institute, Singapore)*, *Advanced Clinical Training in Gastroenterology and Endoscopic Retrograde Pancreatography (ERCP) procedures (Mounth Elisabeth Hospital, Singapore)*. Pada tahun 2002 J.I.C.A. (Japan International Cooperation Agency) : *Training Course Detection of Early Gastrointestinal Cancer and Related Digestive Tumors* dan *Training Course of Diagnostic and Therapeutic Procedures in the Endoscopy Division (Tokyo, Japan)*.

Berawal dari tahun 1980-1981, bertugas sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Kaban Jahe Kab. Karo, Sumatera Utara, pernah menjabat antara lain Kepala Puskesmas Kec.Tiga Binanga, Kab. Karo, Sumatera Utara (1981-1985). Konsultan Penyakit Dalam di RSU Karang Baru, Kab. Aceh Timur (1989), Ahli Penyakit Dalam RSU Kaban Jahe (1991-1996), Staf Dept.I. Penyakit Dalam FK USU /RSUP H. Adam Malik (1996-1998), Staf Div Gastroentero-Hepatologi – Dept. Ilmu. Penyakit Dalam FK USU/RSUP H. Adam Malik Medan(1999-sekarang), Kepala Ruangan Dept I. Penyakit Dalam RSU. Tembakau Deli (2003), Ketua UPIM FK USU dan anggota UPP FK USU (2003-2005), Koordinator Seksi Pendidikan Dept. I . Penyakit Dalam FK USU (2003-2004), Anggota Team Pembentukan USU PT. BHMN (2004-2006), Redaksi Pelaksana MKN FK USU (2004-2008), Anggota Senat Non-Guru Besar USU (2004-2009), Pembantu Dekan I FK USU (2005-2007), Ketua Departemen Ilmu Keperawatan USU (2007-2008), Dekan Fakultas Kedokteran USU pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2016. Sebagai Ketua Perkumpulan Gastroenterohepatologi Indonesia (PGI), Perhimpunan Endoskopi Gastrointestinal Indonesia (PEGI), Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia (PPHI) Cabang Sumatera Utara pada tahun 2015 sampai dengan sekarang. Sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang menjadi Kepala Divisi Gastroentero-Hepatologi FK USU/RSUP H. Adam Malik, dan sejak tahun 2016-2020 penulis menjadi Staf Ahli Rektor Bidang Akademik Universitas Sumatera Utara dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Guru Besar USU Periode 2018-2023.

Penulis telah banyak menerbitkan karya ilmiah/publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional dan Artikel Ilmiah Jurnal Internasional yang terindeks Scopus, pada tahun 2016 menerbitkan artikel dengan topik 1. *Serum TNF-a ,IL-8,VEGF levels in Helicobacter pylori infection and their association with degree of gastritis* (Q3); 2.

*Serum IL-10, MMP-7, MMP-9 levels in Helicobacter pylori infection and correlation with degree of gastritis (Q3). Tahun 2017 menerbitkan artikel dengan judul : 1. Serum VEGF levels in Helicobacter pylori infection and correlation with Helicobacter pylori cagA and vacA genes (Q3); 2. The comparison of the effect between alginate-based raft-forming liquid and Alginate liquid on gastroesophageal reflux disease and gastric ulcer in rat (Q3). Tahun 2018 menerbitkan artikel dengan judul : 1. Association between vegf-634g>c gene polymorphism with gastric premalignant lesions and serum vegf levels in helicobacter pylori gastritis patients (Q3); 2. Risk factors of gastric premalignant lesion in gastritis patients (Q2); 3. Glutathione peroxidase level in patients with Helicobacter pylori-associated gastritis. Tahun 2019 menerbitkan artikel dengan judul: 1. Alternative Eradication Regimens for Helicobacter Pylori Infection In Indonesian Regions With High Metronidazole And Levofloxacin Resistance (Q1); 2. The Difference of Serum Gastrin-17 Level Based on Gastritis Severity and Helicobacter Pylori Infection (Q3); 3. Analysis of Risks of Gastric Cancer by Gastric Mucosa Among Indonesian Ethnic Groups (Q1); 4. Management of severe acute pancreatitis (Q3). Tahun 2020 menerbitkan artikel dengan judul: 1. Serum pepsinogens as a gastric cancer and gastritis biomarker in South and Southeast Asian populations (Q1); 2. The effect of bay leaf extract syzygium polyanthum (Wight) walp. on C-reactive protein (CRP) and myeloperoxidase (MPO) level in the heart of rat model of myocardial infarction (Q3); 3. Interleukin-8 heterozygous polymorphism (-251 T/A and +781 C/T) increases the risk of Helicobacter pylori-infection gastritis in children: a case control study (Q3); 4. The effect of roselle flower petals extract (Hibiscus sabdariffa Linn.) on reducing inflammation in dextran sodium sulfate-induced colitis (Q3); 5. The effect of bay leaf extract (Syzygium polyanthum) on vascular endothelial growth factor (VEGF) and CD31 (PECAM-1) expression in acute coronary syndrome (Q3). Tahun 2021 menerbitkan artikel dengan judul : 1. The Difference of Hypoxic Inducible Factor-1 $\alpha$ , Vascular Endothelial Growth Factor, and Transforming Growth Factor- $\beta$ 1 Based on Liver Fibrosis Severity in Patients with Chronic Hepatitis B (Q3); 2. CYP2C19 Polymorphisms in Indonesia: Comparison among Ethnicities and the Association with Clinical Outcomes (Q1). Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) and Neopterin Levels in Children with Steroid-sensitive and Steroid-resistant Nephrotic Syndrome (Q3)*

*Di tengah kegiatannya, penulis juga aktif menjadi Pembicara dan Moderator dalam Simposium Nasional dan Internasional; Juri Presentasi Oral dan Poster dalam Simposium Nasional dan Internasional dan Reviewer jurnal pada Arab Journal of Gastroenterology; Malaysian Journal of Medical Sciences; The Indonesian Journal of Gastroenterology, Hepatology, and Digestive Endoscopy; Jurnal Anestesi Perioperatif dan Molecular Biology Reports.*

*Penghargaan yang pernah diterima penulis adalah Satyalancana Karya Satya XX Tahun pada tahun 2010, penghargaan dari Ikatan Dokter Indonesia tahun 2013 serta dari BPJS Kesehatan tahun 2015.*

# ***Link and Match* Antara Perguruan Tinggi dan Industri dalam Mewujudkan Program Magang Industri Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

**Halimatuddahlia**

Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara

## **1. Latar Belakang**

Perubahan konsep dunia pendidikan sedang terjadi secara global dan sangat cepat belakangan ini. Otomatisasi, konektivitas 5G, disrupsi teknologi yang semuanya berdampak pada sektor-sektor pekerjaan, perubahan demografi, profil sosio-ekonomis serta perubahan lingkungan. Sementara itu, kondisi pandemi akibat merebaknya virus COVID-19 juga telah mendorong terjadinya perubahan dalam dunia pendidikan dan dunia kerja. Hampir semua jenjang pendidikan (Paud/SD/SMP/SMA/vokasi/ perguruan tinggi) melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Indonesia telah mengalami perubahan dan peningkatan, kesenjangan yang tersisa berada di tingkat prasekolah dan pendidikan tinggi yang disebabkan rendahnya kesadaran dan terbatasnya kesetaraan akses pendidikan prasekolah dan pendidikan tinggi. Untuk jenjang prasekolah permasalahan utama yang timbul berhubungan dengan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini dan masih kurangnya pendidikan prasekolah di pedesaan. Sedangkan untuk jenjang perguruan tinggi selain rendahnya kesadaran/persepsi, kurangnya kesetaraan akses juga menjadi permasalahan utama (1).

Sementara itu, di dunia kerja perubahan yang sangat jelas terjadi pada digitalisasi yang tumbuh hampir semua industri dan sektor lainnya, sehingga para pekerja harus menyesuaikan diri dengan cara kerja yang baru untuk tetap kompetitif. Kemampuan memecahkan masalah sosial, proses, dan sistem adalah salah satu keterampilan yang akan paling dicari sebagai keterampilan inti di tempat kerja. Disisi lain para pelaku wirausaha akan lebih giat dalam menciptakan inovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar tetap dapat bersaing dan produknya diakui. Delapan indikator kinerja utama (IKU) dalam transformasi pendidikan tinggi yang telah disusun yaitu (1):

1. Lulusan mendapat pekerjaan layak,
2. mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus,
3. dosen dapat berkegiatan di luar kampus,
4. praktisi mengajar di dalam kampus,
5. hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan mendapat pengakuan internasional,
6. program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia,
7. kelas yang kolaboratif dan partisipatif, dan
8. program studi berstandar internasional.

Strategi utama dalam mewujudkan kedelapan indikator tersebut adalah dengan membentuk pendidikan tinggi kelas dunia melalui kemitraan yang berkembang, hubungan industri, dan otonomi dengan tata kelola berbasis output yang kuat. Industri merupakan partner perguruan tinggi dalam menyiapkan lulusan yang profesional dan lebih tanggap dengan permasalahan di lapangan. Sudah sepatutnya Industri terlibat dalam pengembangan kurikulum, pendanaan, kolaborasi dalam penelitian, dan penempatan magang serta penyerapan kelulusan. Selama ini permasalahan umum pendidikan tinggi di Indonesia terkait hubungan dengan industri adalah masih sedikit perguruan tinggi yang melibatkan industri dalam penyusunan kurikulum serta rendahnya kesempatan mahasiswa untuk magang di suatu industri. Masalah dari kalangan dunia usaha (industri) adalah kualitas lulusan perguruan tinggi yang tidak sesuai kebutuhan di lapangan. Selain itu, banyak materi kuliah dari kampus yang tidak sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sehingga Perguruan tinggi harus semakin adaptif.

*Link and Match* secara umum bertujuan untuk meningkatkan relevansi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia industri. Kebijakan *link and match* merupakan pendalaman dan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri sehingga orientasi pendidikan tidak lagi *supply minded* tetapi menjadi *demand minded*. Konsep *link and match* mengupayakan integrasi hubungan antara dunia pendidikan dengan industri sehingga keberhasilan sistem pendidikan mampu meningkatkan kualitas industri dan sebaliknya industri berpartisipasi dalam pendidikan. Kebijakan *link and match* juga diharapkan dapat menekan jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi. Salah satu implementasi nyata dari kebijakan *Link and Match* ini adalah program magang. Magang sebagai upaya untuk memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Program magang ini sesuai dengan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang telah dicanangkan oleh pemerintah dimana mahasiswa memiliki hak maksimum 3 semester belajar di luar program studi (2).

Secara khusus bagi mahasiswa program magang ini membuka peluang yang lebih besar untuk diterima sebagai karyawan di tempat magang (terbangun keberlanjutan karir). Melalui magang, peserta juga terlibat langsung dan mendalam pada kegiatan industri sehingga pengalaman kerja yang berharga tersebut dapat digunakan setelah lulus dari Perguruan Tinggi. Peserta magang juga berkesempatan memperoleh pengetahuan tentang praktik terbaik dalam industri dan sektor yang diminati sehingga walaupun belum selesai masa studinya peserta sudah mendapatkan gambaran nyata dunia kerja. Hal yang sangat penting lagi terjalannya *network* dan hubungan dalam industri tempat magang untuk memperluas koneksi. Bagi Perguruan Tinggi sendiri konsep *link and match* melalui program magang tentunya dapat meningkatkan kerjasama / hubungan baik antara universitas dengan perusahaan tempat mahasiswamagang. Disamping itu juga, peningkatan kualitas lulusan juga dapat dicapai dengan pengalaman kerja magang yang



dimiliki oleh peserta/mahasiswa. Manfaat yang besar juga diperoleh Industri dengan program magang yaitu adanya audit industri *non cost* yang secara tak langsung diperoleh dari laporan kegiatan magang, tambahan tenaga kerja dari peserta/mahasiswa yang melakukan magang, terciptanya hubungan dan kerjasama yang baik dengan perguruan tinggi sehingga industri dikenal di kalangan akademik dan dunia pendidikan.

## 2. Masalah

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa telah terjadi *education- job mismatches* antara pendidikan dan kebutuhan industri. Mismatch ini mengakibatkan beberapa masalah yaitu tingkat pendapatan yang rendah, kepuasan/hasil kerja yang rendah, tingkat perputaran karyawan (*labor turnover*) yang tinggi (3,4,5). Industri berkembang pesat setiap waktu namun dilain pihak berkewajiban pula untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal lapangan pekerjaan. Hal ini menuntut lulusan perguruan tinggi yang berkompeten yang dapat diterima oleh industri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

## 3. Strategi Penyelesaian Masalah

Beberapa strategi yang dapat dilakukan berkaitan dengan *link and match* perguruan tinggi dan industri dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Keterlibatan industri dalam pengembangan kurikulum

Dapat dilakukan dengan menciptakan kolaborasi yang baik antara perguruan tinggi dan industri dengan jalan menjalin komunikasi yang intensif terkait kurikulum/struktur mata kuliah yang dilaksanakan di Program Studi. Salah satunya melalui *Focus Group Discussion* (FGD) tentang penyelarasan kurikulum sesuai kebutuhan industri. Dengan adanya FGD diharapkan program studi dapat menyusun kurikulum sesuai kebutuhan kerja dan menghasilkan materi uji kompetensi dan perangkat uji sesuai dengan harapan industri. Untuk mengakomodir hal ini, sebaiknya uji kompetensi dan perangkat uji dibuat oleh kedua belah pihak. Selain FGD, perguruan tinggi dalam hal ini program studi, harus mempunyai peta tentang berapa dan seperti apa tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri, sehingga dapat dikembangkan kurikulum yang sesuai terkait kebutuhan industri. Pemetaan juga ditujukan agar program studi mengetahui keahlian dan kompetensi apa yang paling dibutuhkan di industri.

### 2. Penguatan kompetensi berlaku untuk semua program studi

Penguatan kompetensi baik dosen maupun mahasiswa tidak hanya terbatas pada program studi dan universitas tertentu. Penguatan ini berupa peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran serta

mengembangkan/pemutakhiran komunitas/*platform* pembelajaran. Penguatan sarana dan prasarana serta pemutakhiran *platform* pembelajaran umumnya disebabkan kendala dana yang tersedia dan kurangnya kompetensi dosen/mahasiswa dalam memperoleh kesempatan untuk dapat *mengupgrate* sarana/prasarana yang ada. Hal ini mengakibatkan dunia pendidikan tidak dapat melakukan penyesuaian dengan cepat terhadap perubahan dan perkembangan industri yang jauh lebih cepat berkembang. Kompetensi yang diharapkan agar *link and match* terwujud adalah kompetensi akademik, kompetensi profesional, kompetensi menghadapi perubahan, kompetensi kecendikiaan dan kompetensi nilai-nilai dan sikap (7).

### 3. Peningkatan program magang/magang bersertifikat

Magang/magang bersertifikat kampus merdeka merupakan program yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Magang dapat diikuti oleh semua mahasiswa dari semua jurusan pada jenjang S1 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia yang terdaftar pada PDDikti Mahasiswa akan mendapatkan pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata selama 1-3 semester. Mahasiswa bebas mendaftar pada lowongan magang yang diminati dan sesuai arahan capaian yang diinginkan. Dengan pembelajaran langsung di tempat kerja mitra magang (*hard skills* maupun *soft skills*) untuk memasuki dunia kerja dan karirnya. Magang sendiri bertujuan agar mahasiswa mengaplikasikan semua ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dan mempelajari detail tentang seluk beluk standar kerja yang profesional. Dengan menjadi peserta magang maka mahasiswa akan mendapat kesempatan untuk mengetahui dinamika dunia kerja dan berpengalaman. Pengalaman ini kemudian menjadi bekal dalam menjalani jenjang karir yang sesungguhnya. Perjanjian magang antara peserta magang dan industri, sekurang-kurangnya harus memuat hak dan kewajiban peserta magang dan industri, pembiayaan, jangka waktu, jenis program dan jumlah peserta magang. Berdasarkan Permenaker 6/2020 beberapa persyaratan bagi perusahaan/industri yang ingin melaksanakan magang yaitu legalitas/izin dalam pelaksanaan magang dari Kemendikbud (magang bersertifikat) antara lain adalah memiliki MOU atau kerjasama dengan universitas terkait, bergerak dibidang yang sesuai/terkait dengan Program Studi. Selanjutnya sarana dan prasaranaberupa ruang tempat praktik dan teori, kelengkapan alat kesehatan dan keselamatan kerja(K3) dan format log book kegiatan. Pembimbing industri (mentor) juga harus dipersiapkan oleh industri. Mentor lapangan ditunjuk oleh pimpinan indsutri dan mempunyai tugas memberi informasi tentang perusahaan dan data yang dibutuhkan oleh mahasiswa, mendampingi mahasiswa selama program berlangsung, menegur mahasiswa jika melakukan kesalahan selama kegiatan, memberi evaluasi dan penilaian kepada mahasiswa magang. Mentor/ intruktur juga dapat memberi masukan, saran dan kritik kepada program studi (5,6).

Bagi peserta magang beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah mahasiswa aktif program studi dan telah menyelesaikan mata kuliah yang disyaratkan oleh program studi, mahasiswa berbadan sehat, bersedia mematuhi tata tertib yang dibuat oleh industri dan menjaga nama baik program studi dan industri, serta mengikuti arahan dosen pembimbing dan mentor lapangan, mahasiswa membuat catatan harian (logbook) selama kegiatan, membuat laporan akhir kegiatan dan mempresentasikannya pada saat evaluasi dengan industri dan dosen Prodi (dosen pembimbing) serta mengikuti uji kompetensi. Peserta magang berhak mendapat sertifikat baik dari industri maupun dari lembaga yang ditunjuk Kemendikbud apabila telah menyelesaikan program magang. Peserta mendapatkan perlindungan asuransi kecelakaan kerja, kesehatan, kematian sesuai ketentuan yang berlaku. Peserta mendapatkan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) selama program. Peserta mendapatkan uang saku dan transport (optional) sesuai kesepakatan. Peserta mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan pengakuan kualifikasi kompetensi.

Dosen pembimbing yang ditunjuk program studi mempunyai tugas memberi pengarahan kepada mahasiswa peserta magang dalam persiapan dan pelaksanaan program magang, berkomunikasi dengan mentor lapangan, melakukan monitoring di tempat magang minimal sekali dalam periode magang, memberi informasi kepada industri tentang program yang akan dilaksanakan, menjaga hubungan baik dengan industri, melakukan evaluasi dan memberi penilaian program bersama dengan mentor lapangan.

#### **4. Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi**

Dalam melanjutkan konsep *link and match* perguruan tinggi dan industri melalui program magang industri, beberapa pendekatan dalam mewujudkan keberhasilan program tersebut antara lain:

1. Perguruan Tinggi dan Industri membuat kesepakatan (MoU/MoA) dengan industri. Realisasi kesepakatan yang akan dibuat maupun yang telah ada harus gerak cepat dan berkomitmen untuk melaksanakannya, agar terlaksana secara konkret.
2. Setiap program studi memetakan industri-industri yang terkait dengan capaian pembelajaran yang telah disusun sehingga sesuai dengan kompetensi dan kurikulum yang dibuat/dimutakhirkan. Kurikulum yang disusun seharusnya berorientasi pada kebutuhan industri/pasar.
3. Setiap program studi mempersiapkan secara matang peserta yang akan mengikuti program magang mulai dari persyaratan sampai kompetensi yang diharapkan tercapai, sehingga pelaksanaan magang berjalan lancar dan hasil yang diperoleh maksimal
4. Membina dan meningkatkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri menyangkut penyusunan kurikulum dan program magang. Pakar/praktisi dari industri juga dapat memberikan kuliah di perguruan tinggi.

5. Industri membuka peluang sebesar-besarnya kepada peserta magang untuk mengeksplor kegiatan di Industri agar peserta dapat secara pengalaman riil dan skill sesuai kompetensi yang diharapkan

## 5. Kesimpulan dan Saran

Konsep *link and match* perguruan tinggi dan industri merupakan salah satu upaya dalam menciptakan tenaga muda terampil dalam dunia industri yang memungkinkan persaingan tenaga kerja masa kini dan nanti. Peserta magang (dalam hal ini mahasiswa) memperoleh pengalaman aktual, empirik dan nyata dalam proses belajarnya sehingga setelah lulus dari perguruan tinggi memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan/industri.

Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud, Perguruan Tinggi dan Industri sudah selayaknya secara serius menjaga iklim keterkaitan dan mekanisme implementasi ilmu dari perguruan tinggi ke industri sehingga semakin mampu memberi manfaat bagi semua pihak.

## Daftar Pustaka

1. [http://eng.unila.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/5.a-Peta-Jalan-Sistem-Pendidikan-2020-2035\\_Kemendikbud.pdf](http://eng.unila.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/5.a-Peta-Jalan-Sistem-Pendidikan-2020-2035_Kemendikbud.pdf)
2. <http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020>
3. Holzer, H.J. (2013). Skill Mismatches in Contemporary Labor Markets: How Real? And What Remedies? School of Public Policy, 1(2), 1-10
4. McGowan, M.A., & Andrews, D. (2015). The Future of Productivity: Main Background Papers Labour Market Mismatch and Labour Productivity: Evidence From Piacca Data. Economics Department Working Papers No 1209, 27(1), 1-51
5. [https://jdih.kemnaker.go.id/data\\_puu/Permen\\_6\\_2020.pdf](https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/Permen_6_2020.pdf)
6. <https://culinary.uad.ac.id/wp-content/uploads/PANDUAN-PROGRAM-MAGANG-INDUSTRI-BISMA.pdf>
7. Sudarsono, F.X (1995). Beberapa Pemikiran “Link And Match” Perguruan Tinggi Khussunya LPTK FIP IKIP. *Dinamika Pendidikan*, No. 2 Tahun II.

## Biodata Penulis



**Prof. Dr. Halimatuddahlia, ST, M.Sc**, Guru Besar Tetap Bidang Teknik Kimia di Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Lahir di Medan pada tanggal 8 April 1973. Penulis menyelesaikan menyelesaikan strata 1 (S1) pada tahun 1997 di Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Dari tahun 1998 sampai sekarang penulis menjadi staf pengajar pada Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

Pada tahun 2002 penulis menyelesaikan Program Magister (S2) yang dilanjutkan Program Doktor (S3) dalam bidang Teknologi Polimer pada Universiti Sains Malaysia, dan selesai pada tahun 2006. Bidang keahlian yang ditekuni oleh penulis adalah Teknologi Komposit berbasis Polimer/Biopolimer. Penulis menjadi pengasuh beberapa mata kuliah di Departemen Teknik Kimia untuk jenjang S1, S2 dan S3 seperti Teknologi Polimer, Teknologi Bahan dan Korosi, Metodologi Penelitian, Perpindahan Panas, Teknologi Polimer Lanjut, Ekologi Industri, dan Teknologi Biopolimer. Selain sebagai staf pengajar pada Departemen Teknik Kimia beliau juga mendapat tugas tambahan sebagai Kepala laboratorium Kimia Organik (2017-sekarang). Penulis aktif meneliti dan menulis serta mengikuti seminar-seminar skala International serta berperan aktif membuat pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga merupakan salah satu tim reviewer internal bersertifikat Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara.

# Pandangan Terkait Urgensinya Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2035 Sejalan Dengan Konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi

Harry Agusnar

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara

## 1. Latar Belakang

Peta jalan sangat penting untuk menjadi panduan kebijakan dan pencapaian program kerja bagi peningkatan kualitas pendidikan kita. Upaya untuk peningkatan kualitas dan kemampuan peserta didik dan pendidik, pemutahiran sarana prasarana pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru dan Penguasaan teknologi bagi kemajuan bangsa menjadi point-point penting dalam peta jalan pendidikan. Peta jalan pendidikan merupakan hal yang sangat esensial agar perencanaan pembangunannya tepat, terarah, dan berkelanjutan. Secara konsep kebijakan peta jalan pendidikan perlu menunjukkan upaya untuk menghasilkan SDM yang unggul dan kreatif. Implementasi kebijakan dalam bentuk program kerja perlu dibuat dengan adaptif dan komperhensif. Melalui terobosan-terobosan program kerja maka target perbaikan dan kemajuan mesti menunjukkan pencapaian eksponensial tiap tahunnya (1).

Peta Jalan Pendidikan sudah sejalan dengan konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk perbaikan maka perlu dibangun *center of excellence* dari Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang akan menjadi karakter unggulan bagi tiap universitas dan vokasi. Karakter unggulan tiap institusi ini dibuat dalam klaster regional dan nasional, sehingga sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan industri, yang memiliki tridharma unggulan di sektor pariwisata dan kreatif. Klaster wilayah barat pada industri pengolahan, klaster timur pada budidaya dan komoditas, dsb. Peran perguruan tinggi selalu terkoneksi dengan *triangle academic* yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

Dalam hal ini, pendidikan yang berkolaborasi dengan penelitian, lalu menuju kepada pengabdian atau *entrepreneurship* (kewirausahaan). *Entrepreneur* harus dimaknai sebagai suatu eksploitasi pengetahuan dari pendidikan dan hasil penelitian. "Setiap perguruan tinggi dituntut untuk menetapkan diferensiasi misi, yang mana terfokus dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menuju *center of excellence*. Hal tersebut dilakukan agar diferensiasi misi tersebut akan terdistribusi kepada setiap fakultas, program studi, dan para staf. Dosen dan mahasiswa masing-masing harus memiliki inisiatif untuk memajukan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta memanfaatkan filsafat kebijakan yang sudah diatur

dalam kebijakan Kampus Merdeka. Sinergi antara dosen dan mahasiswa pada akhirnya harus menopang kebijakan kampus dalam menentukan misi diferensiasi perguruan tinggi. Dapat dikatakan bahwa Indonesia masuk pada era fleksibilitas peran antara mahasiswa dan dosen (2).

Berdasarkan hal tersebut, fleksibilitas mahasiswa dapat terwujud dalam menentukan arah pendidikan bagi dirinya sendiri, dengan didorong oleh dosen dan disetujui oleh kampus. Sehingga kebijakan fleksibilitas untuk mengambil peran di luar kampus, harus diapresiasi sebagai bentuk kreasi para mahasiswa.

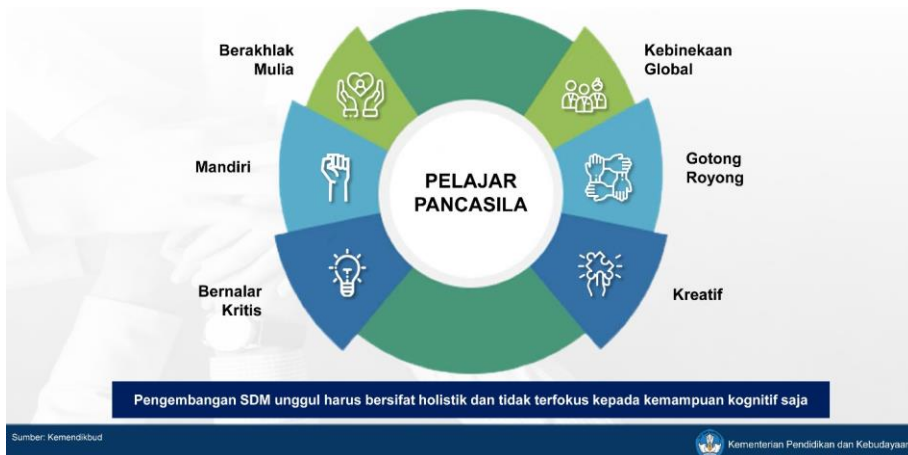
## **2. Masalah**

**Apakah upaya yang perlu dilakukan agar kualitas SDM tenaga dosen di perguruan tinggi meningkat, dengan memperhatikan beberapa bidang :**

1. Bidang / Kelompok Kepakaran Dosen Berbasis Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Penerapan Iptek) menuju Penguasaan Iptek.
2. Dosen /Kelompok Dosen dalam satu PT(Perguruan Tinggi) dan atau Lintas PT(Perguruan Tinggi) Memiliki Mitra Binaan Sesuai Bidang Kepakaran, Memberikan Solusi atas permasalahan Prioritas Daerah untuk mencapai Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Perlu Adanya Skema Khusus Unggulan untuk Penerapan Iptek (Perguruan Tinggi) dalam Menunjang Pencapaian Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Peningkatan kompetensi dan keahlian dosen melalui workshop dan pelatihan untuk peningkatan kualitas pengajaran dan penelitian serta sertifikasi

## **3. Strategi Pemecahan Masalah**

Secara umum harus ada kesiapan, namun tergantung masing-masing institusi dan *leadership* pimpinan Perguruan Tinggi di Indonesia. SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ini adalah seperti ditunjukkan pada gambar 1.



**Gambar 1. Sistem Pendidikan Indonesia Menuju Tahun 2045**

#### 4. Rencana Tindak Lanjut

Kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi berkorelasi dengan mutu dan daya saing perguruan tinggi. Merupakan tujuan mulia perguruan tinggi dengan menghasilkan tenaga kerja terampil dan tenaga kerja ahli yang berkarakter serta memiliki inovasi yang berdaya saing baik di dalam maupun luar negeri.

Karakteristik perguruan tinggi yang berdaya saing diantaranya perubahan dan pembaruan yang mengkombinasikan keunggulan akademiknya, kebutuhan pasar, dan kebutuhan masyarakat; Keunggulan penelitian, kreativitas, dan kegiatan entrepreneurial. Lulusan yang berdaya saing global (*hardskill* dan *softskill*) serta program kerjasama/sinergi dengan industri pemerintah, asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan beberapa keunggulan yang perlu mendapat perhatian.

1. Perlunya penciptaan karakter unggulan pada Perguruan Tinggi dan dosen.
2. Perguruan Tinggi dikluster menjadi:
  - a. *research University*, menitik beratkan pada penelitian dan post-graduate study
  - b. *Teaching University*, menitik beratkan pada kompetensi dan pendidikan dasar tingkat sarjana
3. Dukungan akan diberikan sesuai dengan karakter keunggulan masing-masing pada perguruan tinggi untuk pelaksanaan Tridharma dengan fokus masing-masing. Sehingga tiap universitas atau institusi punya minimum satu keunggulan daya saing masing-masing
4. Bahwa Peta jalan pendidikan harus berbasis kepada *Need and want* dari user, dan *stake holder* dan bukan *top down*.



- 5 Harus tetap di bedakan dengan treatment yang beda antara PT penyelenggara program akademik dan vokasi
- 6 Tidak semua kurikulum harus berbasis pada siap kerja, namun beberapa memang untuk membangun konsep, *critical thinking* dan kebutuhan pemikir

Perguruan tinggi yang dapat meraih peluang-peluang dalam suatu persaingan global nanti ialah mereka yang secara kontinu mengadakan usaha-usaha perbaikan kualitas input dan proses untuk menghasilkan *output* yang diterima pasar. Usaha ke arah itu dapat dilaksanakan melalui manajemen kualitas terpadu (*total quality management*) yaitu perbaikan secara kontinu dari mulai input, proses, serta *output*-nya dalam menekankan bahwa manajemen kualitas terpadu pada institusi pendidikan (perguruan tinggi) dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Efektifitas manajemen kualitas terpadu akan dapat dicapai apabila sumberdaya manusia perguruan tinggi tersebut sadar akan adanya visi, misi, dan sasaran yang harus dicapai sebuah perguruan tinggi sebagai pusat intelektual dan kultural yang dinamis serta mempunyai keunggulan komparatif (2).

#### Upaya yang perlu dilakukan agar kualitas dan kuantitas penelitian di perguruan tinggi meningkat?

1. Mengembangkan skema post dan karir peneliti di Universitas, e.g. *research fellow*, *research associate*, *post-doc*, dsb.
2. Alokasi dana penelitian untuk beasiswa atau pembayaran *tuition fee* bagi mahasiswa S2 dan S3.
3. Mengembangkan universitas riset unggulan (*research university*) dan memperkuat *teaching university*. Dengan pembentukan kluster penelitian dengan beberapa bidang prioritas.
4. Pemutakhiran sarana dan prasarana laboratorium



**Gambar 2. Sistem Pendidikan Indonesia Mengikuti Visi 2045**

Implementasi Tridharma Terpadu dimulai dari perencanaan yang matang untuk masing-masing unsur bahwa penyusunan perencanaan pada perguruan tinggi bersifat integral dan holistik. Perencanaan integral merupakan satu kesatuan perencanaan yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam tridharma perguruan tinggi. Perencanaan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan perencanaan yang utuh dalam mengemban visi dan misi perguruan tinggi. Perencanaan holistik merupakan perencanaan menyeluruh dimana seluruh komponen perguruan tinggi seperti kegiatan administrasi pada perguruan tinggi, rekrutmen dan peningkatan(4).

### **Integrasi Pendidikan dan Penelitian**

Penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dapat berimplikasi pada peningkatan kualitas pelaksanaan tridharma. Dalam unsur pendidikan dan pengajaran, hasil-hasil penelitian dapat dimasukkan sebagai bahan ajar yang menjadi acuan tambahan baik bagi dosen maupun mahasiswa selain teori-teori utama yang diajarkan. Integrasi penelitian dalam pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dengan: (1) Menjadikan hasil penelitian baik berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya sebagai bahan ajar tambahan pada proses perkuliahan; (2) Melibatkan mahasiswa dalam payung penelitian dosen dengan tema yang terkait dengan materi pengajaran sehingga dapat memperkayakhasanah bidang ilmu; (3) Pendidikan berbasis riset dengan cara menugaskan penelitian sebagai bagian dari perkuliahan.

### **Integrasi Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat**

Muara dari ilmu pengetahuan dan proses pembelajaran adalah kebermanfaatn bagi masyarakat luas. Oleh karenanya pengabdian pada masyarakat merupakan aspek yang sangat penting untuk dilaksanakan dan sebagai bagian dari proses pendidikan dan pengajaran. Implementasi unsur tridharma pengabdian dalam pendidikan dan pengajaran dapat diimplementasikan dengan strategi diantaranya: (1) pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa; (2) Aplikasi keilmuan melalui praktek untuk diterapkan dalam pengabdian masyarakat pada setiap mata kuliah yang bersesuaian(4).

### **Integrasi Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat**

Keterkaitan antara unsur tridharma penelitian dan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan melalui riset aksi. Kegiatan penelitian dilaksanakan secara partisipatif dalam suatu masyarakat atau komunitas guna mendorong aksi transformatif untuk mendorong kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Riset aksi merupakan pelaksanaan riset secara kolaboratif yang tidak hanya bersifat kerjasama teknis namun juga menekankan pada kerjasama substantif. Riset aksi diawali dengan mendiskusikan pertanyaan dan signifikansi riset secara bersama-sama dengan tujuan untuk mempertemukan antara kebutuhan penelitian dan kebutuhan pengabdian kepada msayarakat

supaya hasilnya menjadi milik bersama. Riset aksi memiliki 3 komponen utama dalam riset aksi yaitu investigasi, pendidikan, dan aksi. Pelaksanaan integrasi penelitian dan pengabdian dapat dilakukan dengan strategi diantaranya secara bersamaan mahasiswa dan atau dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dalam prosesnya sekaligus dilakukan pengambilan data penelitian secara simultan.

Indonesia akan memanfaatkan kemajuan teknologi bagi pembangunan dengan meminimalkan disrupsi. Beberapa perkembangan teknologi ke depan: perdagangan elektronik mengubah perdagangan konvensional menjadi elektronik; industri 4.0 mengintegrasikan proses produksi secara virtual berbasis siber dan artificial intelligence; blockchain, perpaduan AI, big data, dan IoT, mampu melakukan verifikasi transaksi keuangan real-time, sehingga tidak diperlukan lagi pihak ketiga; dan rekayasa genetika meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan harus mengikuti teknologi yang berkembang semakin cepat dan membawa perubahan pada semua bidang pembangunan dan kehidupan masyarakat. Tren teknologi ke depan: teknologi digital (internet seluler, otomatisasi, dan cloud technology), teknologi yang mengurangi keterbatasan fisik dan jarak (IoT, transportasi dan distribusi, additive manufacturing/3D printing, dan nano technology), teknologi energi terbarukan (surya, angin, nuklir, biomas, dan geothermal), dan teknologi kesehatan (5).

## **5. Kesimpulan dan Saran**

Peningkatan pendidikan dan penyelarasan pengembangan ilmu di perguruan tinggi diarahkan untuk menjawab perubahan struktur ekonomi dengan ditopang oleh kemitraan tiga pihak (pemerintah, perguruan tinggi, dan industri) yang kuat. Sumber Daya Manusia terampil dengan keahlian khusus dan penguasaan bahasa asing menjadi kebutuhan dalam pasar kerja yang kompetitif sesuai dengan perkembangan pendidikan kedepan. Kualitas manusia Indonesia meningkat dengan pendidikan yang semakin tinggi dan merata; kebudayaan yang kuat; derajat kesehatan, usia harapan hidup, dan kualitas hidup yang semakin baik; produktivitas yang tinggi; serta kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas.

## **Daftar Pustaka**

1. Kemendikbud 2020. Draf Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020 -2035
2. Wibawa, Sutisna. (2017). Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat). Makalah Disampaikan dalam Rapat Perencanaan Pengawasan Proses Bisnis Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta,
3. Surata, S.P.K., Arnawa, I.K., Widnyana, I.K. ( 2014). Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Secara Terpadu Melalui Elaborasi Konsep

*Perampian Pura Kehen Bangli – Bali Majalah Aplikasi Ipteks NGAYAH: Volume 5, Nomor 1*

4. Anwar, M.Z., (2016). Sinergi Pengetahuan, Kebijakan, dan Pembangunan: Pengalaman Riset-Aksi *Institute for Research and Empowerment* (IRE) [makalah] dalam Santoso W.M (editor)., (2016). Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
5. Cai, Y., & Yan, F. (2017). Higher Education and University; Pencarian media

## Biodata Penulis



**Prof. Dr. Harry Agusnar. M. Sc., M. Phil** lahir di Langsa (Aceh) pada 17 Agustus 1953. Menyelesaikan pendidikan S3 (Doktor Kimia ) di Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2006. Pada tahun 1990 menyelesaikan S2 Kimia di University Kebangsaan Malaysia (UKM). Pendidikan S1 Kimia di Universitas Sumatera Utara. Menjadi dosen tetap program studi kimia FMIPA USU sejak 1 Maret 1983. Sejak 1 Nopember 2009 ditetapkan menjadi Guru Besar Kimia Universitas Sumatera Utara. Sekarang

sebagai Ketua Umum Himpunan Kimia Indonesia Cabang Sumatera Utara, Ketua Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Wilayah Sumatera utara, Ketua Korpri Universitas Sumatera Utara dan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

# **Urgensi Muatan Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Nasional Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih Bebas Dari KKN**

**Hasim Purba**

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

## **1. Latar Belakang**

Salah satu amanah reformasi adalah reformasi sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR RI<sup>1</sup> birokrasi dan aparatur pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Disamping itu reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan juga dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik *good governance*, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, didukung disiplin, profesionalisme kerja yang bertanggungjawab, serta pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai prinsip *good governance* hanya dapat dijalankan oleh aparatur pemerintah yang bersih bebas dari KKN. Sebagai bentuk paradigma baru dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) maka diharapkan tercipta suatu tatanan birokrasi dalam pemerintahan yang mampu melakukan pelayanan publik (*public services*) secara optimal.

Korupsi menjadi musuh bangsa dan menjadi musuh bagi semua bangsa-bangsa di dunia. Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai “perilaku pejabat publik, baik politikus / politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.”<sup>2</sup>

Sesuai dengan fungsi Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan Tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi harus menghasilkan dua (2) karya besar yaitu<sup>3</sup>

1. Menghasilkan calon pimpinan masa depan, dalam hal ini Perguruan Tinggi menjadi pabrik yang menyiapkan mahasiswanya menjadi calon-calon pemimpin masa depan dengan lulusan yang mempunyai kualifikasi sebagai ilmuwan, sebagai peneliti dan sebagai pengabdian kepada masyarakat,

---

<sup>1</sup>TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

<sup>2</sup>Abdullah Hehamahua, Jihad Memberantas Korupsi, Penerbit EDUNews Publishing, Tangerang Selatan, 2017, Hal 1.

<sup>3</sup>Abdullah Hehamahua. Ibid. Hal: 278-279.

## 2. Menghasilkan Konsep *Good Governance*

Sebagai lembaga yang menghasilkan parasarjana, salah satu fungsi perguruan tinggi yang dilupakan selama ini adalah melahirkan konsep-konsep yang berkaitan dengan Pembangunan Daerah, Pembangunan Nasional dan system pemerintahan di level manapun, itulah antara lain yang disebut *sep good governance*.

Guna mencapai capaian tersebut maka peranan dunia pendidikan dalam pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan perbuatan korupsi dan KKN lainnya perlu dilakukan melalui muatan pendidikan anti korupsi.

Untuk mencapai keinginan mewujudkan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diperlukan perubahan mendasar (fundamental) dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan dari sistem pemerintahan yang semula sentralistik kearah desentralisasi; dari pemerintah yang *top down* kearah *bottom up*, penyelenggaraan birokrasi yang identik KKN kearah Zero KKN; budaya birokrasi yang dilayani menjadi melayani; budaya yang abai hukum menjadi taat hukum; budaya yang tanpa rasa malu (*lack shame*) menjadi punya rasa malu.

## 2. Masalah

1. Bagaimana kaitan pendidikan dalam upaya pencegahan korupsi.
2. Bagaimana upaya efektif dalam pencegahan korupsi yang dilakukan aparatur penyelenggaraan negara.
3. Hal-hal apa saja yang berkaitan dalam upaya pencegahan perbuatan korupsi di kalangan PNS atau Aparatur Sipil Negara.

## 3. Strategi Pemecahan Masalah

### 1. Landasan Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Bebas KKN

Sebagai salah satu amanah reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pelaksanaan pemerintahan yang bersih bebas KKN adalah menjadi tonggak dasar perwujudan tujuan pembangunan nasional. Keinginan dan tekad mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bebas dari KKN, sebenarnya telah direspon secara formal oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Terbitnya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut menjadi bukti dan wujud bahwa persoalan birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan sudah

berada pada titik nadir terendah, sehingga MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara perlu secara khusus turun tangan, memberikan mandat khusus kepada Presiden dan Jajaran Penyelenggara Pemerintahan. Komitmen MPR untuk mendorong perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN semestinya mendapat dukungan dan komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh aparatur penyelenggara negara mulai dari level paling tinggi sampai lini terbawah.

Memang kita harus mengapresiasi Pemerintah dan DPR RI yang menindaklanjuti TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kehadiran TAP MPR dan Undang-Undang tersebut diharapkan dapat segera mengakhiri paling tidak meminimalisir praktik-praktik penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh hampir seluruh lini dan lapisan aparatur penyelenggara pemerintah melalui praktik KKN yang dilakukan antar penyelenggara negara, keluarga, kroni dan para pengusaha serta mapia lainnya.

Mengingat begitu besarnya dampak negatif dan kerusakan yang diakibatkan tindakan penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan oleh aparatur penyelenggara pemerintah, maka sudah seharusnya menjadi suatu program utama dan gerakan nasional untuk penanganannya secara sistematis dan komitmen. Oleh karena itu diperlukan kesamaan visi, persepsi dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan elemen masyarakat bahwa praktik-praktik KKN sesuatu yang diharamkan tanpa adanya toleransi sedikitpun terhadap kejahatan tersebut.

Dalam rangka mewujudkan visi, persepsi dan misi tersebut, maka peranan apartur penyelenggara pemerintah memegang posisi strategis, artinya bahwa performance pemerintahan yang mengelola negara sangat tergantung pada kualitas dari aparatur pemerintahan secara keseluruhan, mulai dari tingkatan tertinggi sampai lapisan terbawah. Hal ini disebabkan pemerintahan itu merupakan suatu organisasi manajemen yang merupakan entitas berbagai unsur (element) yang satu sama lain saling berkaitan, dan salah satu unsurnya adalah keberadaan aparatur pemerintahan itu sendiri.

Secara yuridis pengaturan mengenai aparatur pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (*Pasal 1 butir 2 UU No. 5 Tahun 2014*).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (*Pasal 1 butir 3 UU No. 5 Tahun 2014*). Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat



tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan (*Pasal 1 butir 4 UU No. 5 Tahun 2014*).

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan (*Pasal 1 butir 9 UU No. 5 Tahun 2014*). Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi pemerintah (*Pasal 1 butir 10 UU No. 5 Tahun 2014*). Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu (*Pasal 1 butir 11 UU No. 5 Tahun 2014*). Pejabat fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah (*Pasal 1 butir 12 UU No. 5 Tahun 2014*).

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (*Pasal 1 butir 13 UU No. 5 Tahun 2014*). Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (*Pasal 1 butir 14 UU No. 5 Tahun 2014*).

Dalam rangka mendorong penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari KKN, maka amanah UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme juga telah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, digariskan asas-asas umum penyelenggara negara yang meliputi :

1. *Asas Kepastian Hukum*, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara*, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara.
3. *Asas Kepentingan Umum*, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. *Asas Keterbukaan*, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
5. *Asas Personalitas*, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
6. *Asas Profesionalitas*, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas *Efisiensi*, adalah asas yang mengutamakan kesederhanaan, penghematan, ketepatan dan daya guna yang baik terhadap penggunaan sumber daya.
9. Asas Efektivitas, adalah asas yang mengutamakan keberhasilan tujuan penyelenggaraan negara.

Semua asas-asas yang diamanahkan undang-undang tersebut hanya dapat dipahami dan dilaksanakan oleh aparatur penyelenggaraan negara yang berkualitas dan profesional.

## **2. Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN**

Pemerintah harus dapat menciptakan kondisi yang kondusif, sehingga tumbuh kreativitas seluruh aparatur pemerintah yang mampu untuk melaksanakan tiga fungsi yaitu : fungsi *melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat*. Ketiga fungsi tersebut harus dapat dijalankan secara komprehensif, sehingga sasaran yang dituju dapat tercapai. Komitmen pemerintah sudah jelas bahwa didalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, perlu adanya upaya-upaya yang maksimal dalam mencegah adanya tindakan-tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh segenap penyelenggara negara.

Upaya-upaya tersebut dapat dilihat dengan dimungkinkannya peran serta masyarakat untuk ikut dalam proses penyelenggaraan negara, dalam pengertian peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat dan juga dibentuknya beberapa lembaga yang bertugas mengawasi jalannya penyelenggara negara, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif serta lembaga-lembaga-lembaga quasi negara lainnya. Kehadiran lembaga-lembaga pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan bisa berbentuk internal, eksternal maupun yang bersifat independen.

Fenomena yang membelit birokrasi dan aparatur pemerintah saat ini adalah maraknya perbuatan praktik korupsi, dimana perbuatan korupsi dianggap menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan caya yang luar biasa pula. Penanganan yang dilakukan begitu keras saat ini, ternyata masih belum menghasilkan secara menggembirakan, sebab ternyata fakta menunjukkan kian hari semakin banyak aparatur penyelenggara negara yang terlibat dalam perbuatan kejahatan korupsi tersebut.

Harus dipahami bersama bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Hampir seluruh lembaga negara dan pemerintah mengalami aparturnya yang terlibat dalam perbuatan korupsi baik lembaga eksekutif, pejabat lembaga yudikatif, maupun lembaga quasi negara lainnya serta kalangan pengusaha/ swasta.

Dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, maka peranan penyelenggara negara sangat penting untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, dibutuhkan penyelenggara negara yang tidak saja jujur, tetapi juga harus bersih dan bebas dari KKN, mengingat KKN merupakan perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara.

Tugas sebagai Pejabat Aparatur Penyelenggara Negara adalah tugas profesional yang dilaksanakan pada prinsip :

- a. Nilai dasar.
- b. Kode etik dan kode perilaku.
- c. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab kepada pelayanan publik.
- d. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
- e. Kualifikasi akademik.

#### **4. RencanaTindakLanjut**

##### **Muatan Pendidikan Anti Korupsi UntukSemua Jenjang Pendidikan**

Melihat kasus korupsi di Indonesia yang sudah berurat berakar dan melanda seluruh lini pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan melibatkan berbagai institusi bahkan masyarakat luas maka wabah korupsi yang melanda bangsa ini harus ditangani secara komprehensif. Penanganan dari aspek hukum berupa penindakan dan penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi ternyata belum dapat dijadikan sebagai jurus ampuh dalam menekan atau mengakhiri praktik-praktikkorupsi. Fakta menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan baik oleh KPK, Kejaksaan atau Kepolisian serta Pengadilan Tipikor, ternyata belum mampu menekan tingkat korupsi, malahan yang timbul sebaliknya adalah kasus korupsi semakin merajalela baik yang sudah terbongkar maupun yang belum.

Hal ini memperkuat asumsi kita bahwa untuk menangani kejahatan korupsi tidak bisa hanya aspek penegakan hukum saja, tetapi perlu aspek-aspek lainnya termasuk aspek pencegahan melalui penyadaran seluruh pejabat dan elemen masyarakat untuk mengubah perilaku kebiasaan korup menjadi perilaku yang mengharamkan perbuatan korupsi. Salah satu upaya positif yang dapat dilakukan dalam mengatasi korupsi adalah perubahan sikap dan wawasan seluruh aparatur pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berkomitmen menjadikan perilaku korupsi adalah

perbuatan yang haram, perbuatan yang hina dan perbuatan yang bertentangan dengan perilaku hidup manusia.

Perubahan sikap ini dapat melalui suatu program pendidikan anti korupsi secara dini. Pendidikan anti korupsi terhadap seluruh lapisan masyarakat diperlukan agar seluruh element masyarakat, aparatur pemerintah/ negara, pelaku usaha dapat secara bersama-sama dan berkomitmen bahwa perilaku korupsi adalah musuh bangsa dan musuh seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini, dan pendidikan anti korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah, oleh karena pendidikan anti korupsi harus menjadi budaya dan gerakan yang terus menerus dan berkelanjutan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara ini.

Pendidikan anti korupsi dimulai dari keluarga dengan cara mendidik dan membentuk akhlak anak, mengenalkan prinsip-prinsip kebaikan, kebenaran, kejujuran dan kesalehan hidup kepada anak-anak menjadi tanggung jawab utama orang tua/ keluarga lainnya. Jika orang tua/ keluarga telah menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran pada anak sejak dini, maka saat anak tersebut mulai beranjak dewasa nilai-nilai tersebut akan terpatri dalam jiwa mereka. Oleh karena itu orang tua/ keluarga mempunyai andil besar dalam memberi warna budaya sebuah bangsa, termasuk didalamnya menciptakan budaya anti korupsi.

Sifat dan sikap ketauladanan yang baik dari orang tua/ keluarga seperti ketaatan beribadah, berperilaku sopan santun sesuai budaya bangsa, bertindak jujur dalam perkataan dan perbuatan sangatlah penting ditanamkan sejak usia dini. Disamping itu pemerintah juga harus berperan aktif dalam upaya menciptakan budaya anti korupsi pada anak-anak, misalnya melalui Kementerian Pendidikan Nasional memperbaharui kurikulum sekolah dengan memasukkan mata pelajaran budi pekerti atau akhlak dalam semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi.

Pendidikan anti korupsi yang dilakukan disekolah-sekolah mulai dari jenjang pendidikan terendah (TK, SD) sampai ke jenjang Pendidikan Tinggi harus menjadi materi wajib yang harus dijadikan panduan mendidik masyarakat untuk bersama-sama menjadi perilaku korupsi menjadi musuh bersama. Sebenarnya, bangsa Indonesia sudah sampai pada batas puncak kesabaran dalam mengatasi masalah korupsi yang menggerogoti seluruh aspek kehidupan.

Bahkan untuk menunjukkan perlawanan terhadap korupsi tersebut, maka bangsa Indonesia sudah mencanangkan setiap tanggal 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi (yang dimulai sejak tanggal 9 Desember 2004). Namun yang menjadi ironi adalah korupsi di Indonesia tidak kunjung selesai, bahkan makin banyak praktik-praktik korupsi yang semakin menggurita, ibarat kata pepatah “menyapu lantai dengan sapu kotor”, sebab para penegak hukum kasus korupsi juga ikut berkorupsi (lihat kasus Hakim suap, Jaksa suap, Advokad suap, Polisi suap).

Secara yuridis menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 korupsi diartikan

perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Secara rinci undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menguraikan ada tiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh tindak pidana tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Kerugian keuangan negara.
2. Suap-menyuap.
3. Penggelapan dalam jabatan.
4. Pemerasan.
5. Perbuatan curang.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi.

## **5. Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

1. Untuk mengatasi perbuatan Korupsi dan KKN lainnya di Indonesia, maka tidak cukup hanya dengan melakukan tindakan penegakan hukum saja, tetapi juga harus ada upaya pencegahan (proventif) perbuatan korupsi tersebut melalui program Pendidikan Anti Korupsi secara dini disetiap jenjang pendidikan, mulai Pendidikan Terendah sampai jenjang Pendidikan Tinggi.
2. Salah satu kunci pokok keberhasilan pencegahan perbuatan korupsi adalah peningkatan kualitas sumber daya aparatur agar menjadi aparatur yang profesional, berkualitas dan memiliki kinerja yang optimal, dalam upaya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dengan pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta disiplin kerja yang bertanggung jawab guna pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat.
3. Hal yang tidak kalah penting adalah pola rekrutmen calon PNS, haruslah berasal dari SDM yang memang benar-benar punya komitmen anti korupsi, peningkatan pendidikan dan latihan serta perbaikan kesejahteraan kehidupan aparatur (PNS) beserta keluarganya secara terus menerus.

### **Saran**

1. Mengingat betapa pentingnya pencegahan, pemberantasan dan penindakan perbuatan korupsi yang merugikan bagi keuangan Negara dan hak-hak masyarakat, maka program anti korupsi harus dilembaga dan disosialisasikan bagi seluruh jenjang pendidikan yang ada di Indonesia dengan formasi muatan sesuai dengan jenjang pendidikan penyelenggara.
2. Seluruh masyarakat harus diberikan pemahaman yang utuh tentang bahaya praktek korupsi dan KKN lainnya yang pada akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri.

## Daftar Pustaka

1. Abdullah Hehamahua : *Jihad Memberantas Korupsi*, Penerbit: EDUNews Publishing, Tangerang Selatan, 2017.
2. TAP MPR NOMOR : XI/MPR/ 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Jo UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Biodata Penulis



**Prof. Dr. H. Hasim Purba, S.H., M.Hum,** Lahir di Parbutaran, 3 Maret 1966, Menamatkan Pendidikan Sarjana Hukum (S-1) dari Fakultas Hukum USU tahun 1991. Selanjutnya menempuh Pendidikan Magister Hukum (S-2) pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum USU dan lulus Cumlaude tahun 2001. Pada tahun 2007 melanjutkan pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum (S-3) di Sekolah Pascasarjana Hukum USU dan lulus pada tahun 2010 dengan predikat mendapat pujian (Cumlaude). Sejak tahun 1993 aktif

mengajar di Fakultas Hukum USU sebagai Asisten Dosen dan mendapat pangkat Guru Besar (Profesor) TMT 1 Agustus 2015. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum USU periode tahun 2010–2015, selain mengajar di almamater Fakultas Hukum USU program S-1, S-2, dan S-3 yang bersangkutan juga mengajar pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum di UISU Medan, UMA Medan dan UDA Medan. Selain aktif sebagai Staff Pengajar, penulis juga aktif sebagai narasumber dalam pertemuan Ilmiah Seminar, Simposium, FGD, dan Tim Reviewer/Penguji calon penerima beasiswa S-2–S-3 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta menulis berbagai opini hukum dan sosial di berbagai media massa. Penulis juga aktif dan menjabat pimpinan diberbagai organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Saat ini Penulis telah menghasilkan beberapa buku ajar yang telah diterbitkan melalui penerbit resmi. Aktivitas lainnya, saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Dewan Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2017– 2020 dan Periode 2020 - 2023 dan Ketua Lembaga Etik dan Hukum UISU periode 2016–2019; Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan Periode 2020 - 2023 dan Ketua Umum Majelis Daerah KAHMI Medan. Saat ini dipercaya sebaga Ketua Komisi Monitoring dan Evaluasi Majelis Wali Amanat (MWA) USU.

# **Peta Jalan Pembangunan Pendidikan Indonesia 2035; Belajar Dari Sistem yang Terbaik**

**Himsar Ambarita**

Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara

## **1. Latar Belakang**

Pendidikan adalah bagian yang tidak terlepas dari pembangunan manusia. Pembangunan suatu bangsa pada umumnya dimulai dari pendidikan dan hasil pembangunan selalu diarahkan untuk membangun pendidikan. Dengan kata lain pembangunan pendidikan adalah merupakan subjek dan objek sebuah pembangunan. Merencanakan pembangunan pendidikan dilakukan banyak negara dengan konsep yang selalu menyesuaikan dengan perkembangan dunia. Malaysia merancang pembangunan sistem pendidikannya dengan menerbitkan *Malaysia Education Blueprint* 2013 -2025 [1] pada tahun 2013 yang bertujuan melakukan transformasi sistem pendidikan untuk mengangkat pelajar Malaysia mencapai standard pendidikan internasional, meningkatkan harapan masyarakat dan orang tua terhadap kebijakan pendidikan nasional, dan mempersiapkan putra putri Malaysia untuk siap menghadapi tantangan abad 21. Transformasi ini dibagi atas 11 (sebelas) shift dan 3 (tiga) gelombang. Gelombang pertama (2013 – 2015) fokus pada dukungan terhadap guru meningkatkan kompetensi inti, gelombang kedua (2016 – 2020) percepatan pengembangan, dan gelombang ketiga (2021 – 2025) menuju keunggulan dengan peningkatan fleksibilitas operasional.

Singapura dikenal memiliki salah satu sistem pendidikan yang terbaik yang diakui dunia yang berhasil mengubah negaranya dari negara miskin dan lemah menjadi negara yang maju secara ekonomi dan pendidikan dalam waktu 50 tahun [2]. Sebagian besar kesuksesan Singapura adalah karena penekanannya pada investasi pada sumber daya manusia dan membangun sistem pendidikan kelas dunia. Singapura menjadikan pendidikan sebagai kendaraan dalam pembangunan bangsa dengan menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif dan produktif serta mempromosikan kohesi sosial di antara berbagai kelompok etnis. Tujuan jangka panjang pendidikan di Singapura adalah mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan ekonomi, pengetahuan dan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Singapura. Laporan McKinsey [3] menunjukkan bahwa sistem sekolah berkinerja tinggi seperti Singapura unggul dalam memusatkan perhatian pada tiga faktor keberhasilan mendasar. Pertama: mekanisme yang efektif untuk pemilihan guru; menjadi guru haruslah orang yang tepat. Sistem ini menjadikan guru berada pada kualifikasi tertinggi yang mungkin dicapai sistem itu. Proses seleksi guru ini mensyaratkan kualitas sistem pendidikan



yang dibangun tidak akan melebihi kualitas gurunya. Kedua, proses yang efektif untuk pelatihan dan pengembangan guru dengan memastikan bahwa guru harus dikembangkan secara profesional untuk menjadi instruktur yang efektif. Cara terbaik menghasilkan luaran yang unggul adalah memastikan kemampuan gurunya tetap unggul. Ketiga, menyiapkan sistem yang efektif serta struktur pendukungnya untuk memastikan bahwa setiap siswa akan mendapatkan manfaat dari pengajaran yang terbaik. Cara terbaik sekolah mendapatkan kinerja terbaik adalah meningkatkan standard setiap siswa.

Negara China juga menjadikan pembangunan pendidikan sebagai jalan mencapai kemakmuran. Perencanaan sistem pendidikan China yang terbaru tertuang dalam *China's education modernization plan towards 2035* [4]. Strategi utama yang dicanangkan pemerintah China adalah beralih dari kapasitas ke kualitas "*capacity to quality*" dimana pendidikan diharuskan mendukung kebijakan memodernisasi China. Tujuan modernisasi sistem pendidikan China 2035 fokus kepada 8 hal yaitu: membangun sistem pendidikan modern, mencapai kehadiran universal pada pendidikan pra-sekolah yang berkualitas, memberikan pendidikan wajib yang berkualitas dan seimbang (usia 1 – 9 tahun) 4), mencapai kehadiran maksimum di sekolah menengah atas (usia 10 – 12 tahun), secara signifikan meningkatkan pendidikan vokasi, membangun sistem pendidikan tinggi yang lebih kompetitif, memberikan pendidikan yang memadai bagi anak/remaja penyandang disabilitas, dan membangun sistem manajemen pendidikan baru dengan partisipasi dari seluruh masyarakat atau tidak tergantung hanya dari pemerintah. Salah satu negara yang secara luar biasa menjadikan pendidikan sebagai dasar pembangunan negara adalah Republik Korea. Dimulai dengan partisipasi pendidikan warganya yang minim pada tahun 60 an, pembangunan difokuskan pada pendidikan dan menerapkan standard yang tinggi pada pendidikan [5]. Hasilnya saat ini bisa dinikmati Korea yang dikenal sebagai salah satu negara paling inovatif di dunia.

Pemerintah Indonesia memiliki visi pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2045 yang dikenal dengan Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Pencapaian visi 2045 ini akan dilakukan dengan strategi transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. Untuk mencapai Indonesia 2045 yang maju Indonesia harus mampu keluar dari *middle income trap* ini dengan mengandalkan pembangunan manusia dan penguasaan teknologi. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pembangunan SDM dan penguasaan teknologi yang harus dipersiapkan pada periode ini. Atas dasar ini Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan Pencapaian Visi Indonesia 2045 [6]. Kelima arahan ini mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Terciptanya Manusia Indonesia yang Unggul dan Berdaya Saing diharapkan memiliki ciri antara lain pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

didukung dengan kerja sama industri dan talenta global. Karakteristik SDM Indonesia yang seperti ini diharapkan akan mampu membawa Indonesia menuju Visi 2045 dan keluar dari midle income trap.

Atas dasar inilah maka Indonesia telah menyusun rencana pembangunan pendidikan untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045. Petajalan pendidikan diharapkan akan menyiapkan kebutuhan SDM yang terpelajar, luhur, adaptif, dan kolaboratif. Tujuan dari tulisan ini adalah memberikan masukan dalam pengembangan petajalan pendidikan Indonesia yang sedang dibahas antara pemerintah dan DPR. Pada bagian awal akan dilakukan review singkat tentang petajalan tersebut, kemudian analisis akan diberikan secara umum. Penekanan khusus akan diberikan pada pengembangan sistem pendidikan tinggi pada petajalan tersebut. Hasil dari tulisan ini diharapkan akan memberikan masukan tambahan dalam pengembangan pendidikan menuju Visi Indonesia maju 2045.

## 2. Masalah

Pada bagian ini akan dilakukan review ringkas petajalan pendidikan Indonesia 2035. Petajalan pendidikan Indonesia adalah untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia 2035 yaitu membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. SDM yang unggul yang akan dibangun adalah merupakan pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pengembangan SDM yang unggul ini harus bersifat holistic dan tidak terfokus pada kemampuan kognitif saja. Atas alasan inilah maka dikembangkan konsep pelajar Pancasila yang memiliki 6 (enam) nilai (values) yaitu Berakhlak Mulia, Mandiri, Bernalar Kritis, Kebinekaan Global, Gotong Royong dan Kreatif. Matriks kondisi semula dan kondisi yang ingin dicapai serta strategi yang disusun ditampilkan pada Tabel 1 berikut ini.

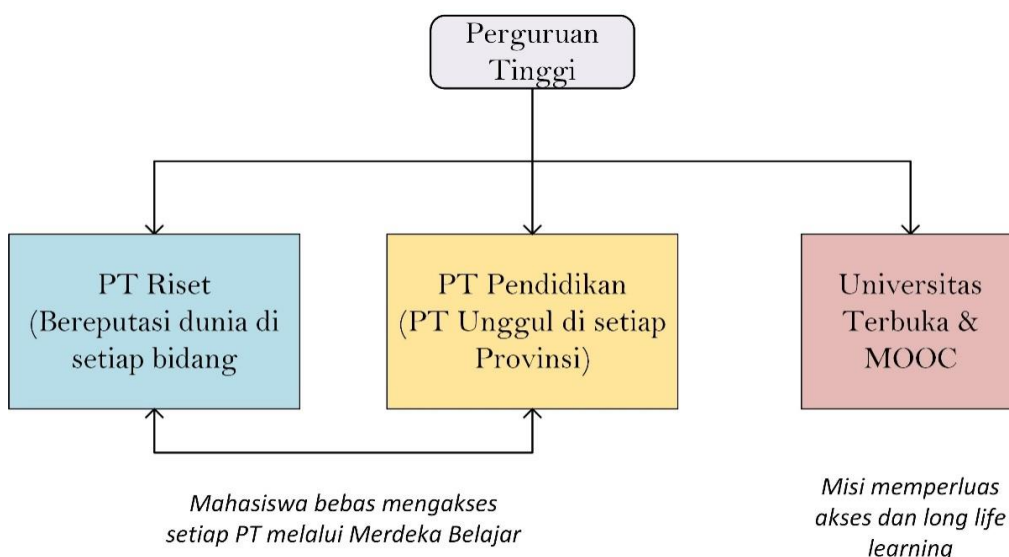
Tabel 1 Strategi Pengembangan Pendidikan Indonesia 2035

Keadaan Semula	Strategi	Keadaan yang diharapkan
Belajar sebagai kewajiban	1. Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah (TK-SD-SMP-SMA, informal)	Belajar menjadi sebuah pengalaman menyenangkan
Sistem yang tertutup (Pemangku kepentingan bekerja dengan sistem mereka sendiri)	2. Meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah (memperbaiki sistem rekrutmen, meningkatkan kualitas pelatihan, penilaian, serta mengembangkan komunitas/platform pembelajaran)	Sistem yang terbuka (Kerjasama antar pemangku kepentingan)
Guru sebagai	3. Membangun platform pendidikan	Guru sebagai

Keadaan Semula	Strategi	Keadaan yang diharapkan
penyampai informasi/pengetahuan	nasional berbasis teknologi yang berpusat pada siswa, interdisipliner, relevan, berbasis proyek, dan kolaboratif	fasilitator dalam kegiatan belajar
Pedagogi berbasis konten, kurikulum, dan penilaian	4. Memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian: penyederhanaan konten materi, fokus pada literasi dan numerasi, pengembangan karakter, berbasis kompetensi dan fleksibel	Pedagogi berbasis kompetensi dan nilai-nilai, kurikulum, dan penilaian
Pendekatan “satu ukuran untuk semua” One size fits all	5. Meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata: bekerjasama dengan pemda melalui pendekatan yang bersifat personal dan konsultatif serta memberikan penghargaan berdasarkan prestasi	Pendekatan berbasis individu dan berpusat pada siswa
Pembelajaran tatap muka/manual	6. Membangun sekolah/lingkungan belajar masa depan: aman dan inklusif, memanfaatkan teknologi, kolaboratif, kreatif, dan sistem belajar berbasis pengalaman	Pembelajaran yang memanfaatkan teknologi
Program-program didorong oleh pemerintah	7. Memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan: dana CSR, insentif pajak, kemitraan swasta publik, otonomi, dan keuntungan yang lebih besar	Program-program yang relevan dengan industry
Administrasi dan peraturan yang membebani	8. Mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi: pihak industri atau asosiasi terlibat dalam penyusunan kurikulum, mendorong pembelajaran, dan pembiayaan pendidikan melalui sumbangan sektor swasta atau CSR	Kebebasan untuk berinovasi
Ekosistem yang didorong oleh pemerintah	9. Membentuk pendidikan tinggi kelas dunia: differensiasi misi pendidikan tinggi sebagai pusat-pusat unggulan serta mempererat hubungan dengan industri dan kemitraan global	Sebagai agen untuk seluruh pemangku kepentingan
	10. Menyederhanakan mekanisme akreditasi dan memberikan otonomi lebih: bersifat suka rela, berbasis data, merujuk pada praktik terbaik tingkat global, serta pelibatan industri atau komunitas	

Khusus pendidikan tinggi, terdapat hal yang sangat spesifik pada strategi ke 9 yaitu untuk membentuk pendidikan kelas dunia dilakukan dengan

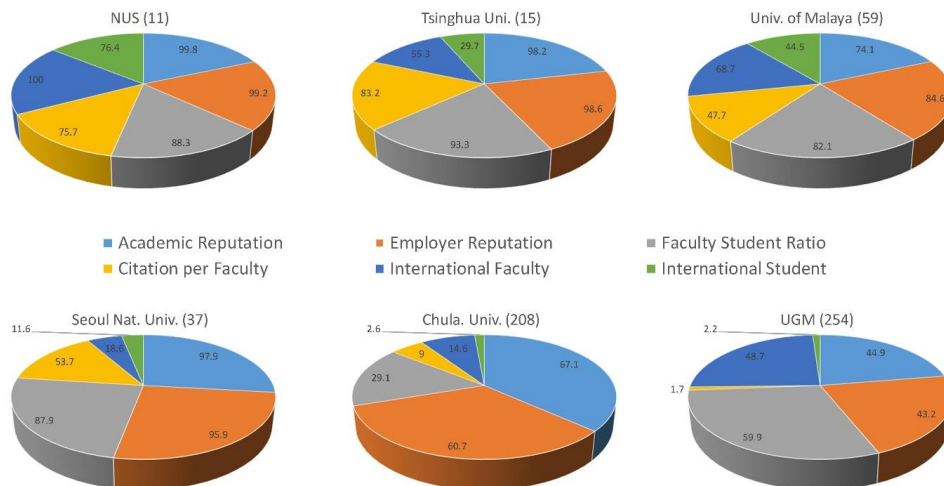
cara differensiasi misi perguruan tinggi. Perguruan tinggi akan dibagi atas Perguruan Tinggi Riset, Perguruan Tinggi Pendidikan, dan Universitas Terbuka & MOOC. Perguruan Tinggi Riset akan dijadikan sebagai Pusat Unggulan Nasional. PT Riset diharapkan menjadi PT bereputasi dunia pada bidang masing-masing dan sekaligus menjadi pusat inovasi untuk daya saing bangsa. Kemudian PT Pendidikan diharapkan akan fokus dalam bidang pendidikan dan menjadi PT unggul di setiap provinsi dan menjadi motor pembangunan daerah dan nasional. Kemudian, Universitas Terbuka & MOOCs akan dipersiapkan menjadi perluasan akses PT dan membentuk ekosistem *life-long learning*. Pembagian ini ditampilkan pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1 Perencanaan Differensiasi Misi Perguruan Tinggi di Indonesia

Strategi pembagian misi perguruan tinggi ini diharapkan akan memberikan akselerasi bagi perguruan tinggi untuk mempersiapkan dirinya dalam menyiapkan SDM yang memenuhi kriteria Indonesia 2045 dan sebagai indikator reputasi diharapkan lebih banyak lagi perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam kelas *Top 500 World Class University*. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan dengan beberapa negara yang telah maju sistem pendidikannya, Pada tahun 2021 ini, Indonesia baru memiliki 3 PT yang masuk dalam Top 500 versi QS-Rank. Sementara negara Malaysia sudah memiliki 8 perguruan tinggi dalam jajaran Top 500 dan Singapura memiliki 2 PT tetapi posisinya sudah sangat prestisius yaitu berada pada urutan 11 dan 13 terbaik dunia. China sudah menempatkan 26 perguruan tingginya yang ada di jajaran Top 500 dunia dan yang cukup luar biasa adalah Korea Selatan yang memiliki 15 perguruan tinggi. Apa sebenarnya permasalahan utama yang dihadapi perguruan tinggi di Indonesia sehingga relatif lebih sulit untuk bersaing dalam mendapatkan pengakuan di tingkat

internasional. Untuk dapat merumuskan masalah ini, maka pada Gambar 2 ditampilkan nilai setiap parameter yang diperoleh oleh setiap universitas terbaik dari negara Singapura, China, Korea, Malaysia, Korea Selatan, dan Indonesia.



Gambar 2 Nilai indikator QS World University Rank universitas terbaik di beberapa negara

Pada gambar dapat dilihat nilai dari setiap indikator WUR pada universitas terbaik di masing-masing negara yang dijadikan pembandingan dengan Indonesia. Singapura diwakili oleh NUS yang berada pada posisi terbaik 11 dunia memiliki nilai yang hampir sempurna pada setiap indikator. Pada international faculty, NUS memiliki nilai sempurna dan yang terendah adalah international student yaitu 76,4. Sementara yang terbaik dari China adalah Tsinghua University yang berada pada peringkat 15 besar dunia. Nilai terendah dari universitas ini adalah pada international student. Tetapi di sisi dampak riset yang dinyatakan dengan *citation per faculty*, Tsinghua masih lebih baik dari NUS. Perbandingan nilai setiap indikator yang ditunjukkan UGM sebagai universitas terbaik dari Indonesia, maka nilai yang paling lemah adalah pada sisi *Citation per Faculty*. Pada indikator ini, 3 (tiga) PT Indonesia yang masuk dalam Top 500 yaitu UI dan ITB masing-masing memiliki nilai sebesar 2,1 dan 4,0. Fakta ini menunjukkan bahwa kelemahan utama universitas dari Indonesia adalah terletak pada kualitas riset yang belum memberikan dampak yang signifikan dibanding universitas terbaik dari negara lainnya. Hal inilah yang perlu segera dicari solusinya.

### 3. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan review yang dilakukan terhadap petajalan pendidikan Indonesia 2020 – 2035, khusus pengembangan perguruan tinggi, salah satu strategi yang digunakan adalah differensiasi misi perguruan tinggi. Pada strategi ini, perguruan tinggi akan dibagi atas 3 kelompok dengan misi yang berbeda, yaitu PT riset, PT pendidikan dan Universitas Terbuka & MOOC. Pembagian ini diharapkan akan memberikan fokus pengembangan pada masing-masing perguruan tinggi sehingga diharapkan akan ada akselerasi peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagai luaran yang diharapkan semakin banyak perguruan tinggi dari Indonesia yang masuk dalam jajaran Top 500 dunia. Sebagai *outcome*, pada akhirnya nanti pendidikan tinggi Indonesia akan mampu memberikan pendidikan tinggi yang berkualitas. Agar skenario ini dapat dicapai secara optimum maka perlu diperhatikan kembali kriteria pembangunan SDM yang diinginkan oleh visi Indonesia maju 2045. Seperti yang sudah dirumuskan pada Nawa Cita kedua pembangunan yang SDM yang diinginkan adalah menghasilkan manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung kerjasama industri dan talenta global. Terminologi *global talent* didefinisikan sebagai SDM dengan kualifikasi kelas dunia. Hal inilah yang harus diperhatikan pendidikan tinggi di Indonesia. Kata kunci yang diberikan disini dapat dibagi atas 3 kelompok yaitu: karakter dasar terdiri dari pekerja keras yang dinamis dan produktif, kompetensi dasar yang terdiri dari terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompetensi pendukung kerjasama industri dan talenta global. Berdasarkan pembagian kata kunci ini, maka disusun tiga strategi dasar dan utama yang perlu diperhatikan pada peta jalan pengembangan pendidikan tinggi Indonesia 2020 – 2035.

#### 4. Tindak Lanjut

Ketiga strategi dasar dan utama itu dijabarkan sebagai berikut:

a. Strategi 1: Bangun Karakter dasar sebagai pekerja keras yang dinamis dan produktif

Salah satu strategi sukses pendidikan di Korea Selatan adalah terciptanya para siswa pekerja keras dan produktif. Pada akhir tahun 1950 kualitas pendidikan di Korea Selatan termasuk yang sangat rendah. Tetapi negara ini perlahan membangun sistem pendidikannya dengan memperbesar investasi membangun sistem pendidikan dan wajib belajar dimulai dari tingkat yang paling dasar. Semakin tinggi tingkatannya seleksi masuknya semakin ketat. Sistem pendidikan mereka berhasil menciptakan atmosfer yang memaksa setiap peserta didik untuk bekerja keras mencapai kemampuan terbaiknya. Seleksi penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi di Korea Selatan termasuk yang sangat ketat. Persiapan menuju seleksi ini sangat menyita waktu pelajar di Korea Selatan. Secara rata-rata siswa Korea Selatan menghabiskan waktu 16 jam untuk belajar, selain di sekolah tetapi juga di tempat les luar sekolah yang dikenal dengan

*Hagwons*. Berdasarkan sebuah laporan tahun 2014 disebutkan 53% pelajar disana tidak cukup jam tidurnya karena belajar malam. Sementara, 90% menyatakan hanya tidur kurang dari 2 jam. Hasil dari kerja keras ini membuat Siswa dan Mahasiswa Korea Selatan dikenal memiliki kemampuan Kognitif (numerasi, literasi, dan sains) yang sangat tinggi di dunia. Belajar dari fakta ini, sebaiknya Indonesia tidak boleh menurunkan standard kelulusan sebuah sistem pembelajaran. Kelulusan harus merupakan suatu *pride* yang harus dicapai oleh seorang siswa. Standar kelulusan selalu menjadi polemik dan menjadi bahan diskusi politik. Hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi, kelulusan itu harus memiliki standard. Strategi yang disarankan dalam menjalankan peta jalan pendidikan ini adalah menjaga standar kelulusan. Pada tahap awal syarat kelulusan ini bisa saja dinaikkan secara gradual. Alasan yang selalu dijadikan untuk menolak standard ini adalah ketimpangan kualitas pendidikan di pusat dan daerah. Pada ketimpangan inilah pemerintah harus hadir untuk menjaga kesamaan kualitas. Pemerintah sebaiknya tidak perlu ikut dalam menciptakan ketimpangan, misalnya dengan menginisiasi kelas kelas internasional di kota kota besar. Ini sebaiknya diserahkan ke pihak swasta karena memiliki nilai ekonomi. Pemerintah cukup mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk menjaga meratanya kualitas sistem pendidikan milik negara.

b. Strategi 2: Bangun Penguasaan ilmu dan teknologi

Menguasai ilmu dan teknologi adalah kompetensi wajib SDM Indonesia maju 2045. Penguasaan ilmu dan teknologi dikalangan akademisi masih dirasakan cukup rendah. Diperlukan suatu usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah agar penguasaan iptek dan teknologi ini mengalami akselerasi. Penguasaan ilmu dan teknologi memerlukan laboratorium pendukung yang harus standard dan dapat diandalkan. Hal ini memiliki dua fungsi yang saling terkait. Sempurna dan canggihnya laboratorium pendukung akan memberikan rasa percaya diri dan kebanggaan melakukan riset. Kebanggaan ini juga akan memberikan akselerasi pada penguasaan ilmu dan teknologi. Hal ini pasti akan mendorong para peneliti Indonesia untuk menghasilkan inovasi yang lebih banyak. Fasilitas pendukung pendidikan (laboratorium, alat peraga, dll) akan memberikan akselerasi dalam hal penguasaan ilmu dan teknologi.

c. Strategi 3: Bangun Kerjasama Industri dan Talenta Global

Orientasi melakukan riset dapat dibagi atas alasan menambah pengetahuan (*science-oriented*) dan menghasilkan inovasi (*technological-oriented*). Untuk mengejar ketertinggalan, sebaiknya pendidikan tinggi Indonesia mengarahkan kebijakannya kepada *technological-oriented*. Untuk mendukung hal ini, perlu dibuat jalan agar institusi pendidikan dan industri bisa saling terhubung. Kedua institusi ini sebaiknya saling membuka diri atau tidak menaruh kecurigaan satu dengan lainnya. Proses internasionalisasi pendidikan juga sudah harus dilakukan untuk membuka

kesempatan institusi pendidikan Indonesia terhubung dengan Talenta global.

d. Strategi utama: Guru haruslah merupakan capaian tertinggi

Pada pembangunan pendidikan Singapura ada hal menarik menempatkan posisi guru pada sistem pendidikan. Laporan McKinsey [3] menunjukkan bahwa sistem pendidikan harus menempatkan guru pada posisi puncak. Harus dibangun mekanisme yang efektif untuk pemilihan guru atau menjadi guru haruslah orang yang tepat. Sistem pendidikan yang baik menjadikan guru berada pada kualifikasi tertinggi yang mungkin dicapai sistem itu. Proses seleksi guru ini mensyaratkan kualitas sistem pendidikan yang dibangun tidak akan melebihi kualitas gurunya. Indonesia harus memperbaiki sistem pemilihan para guru. Menjadi guru harus merupakan orang-orang terbaik dari komunitas yang ada. Hal ini diharapkan akan memberikan contoh bagi murid bagaimana seharusnya bersikap.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana pembanguna menuju Indonesia maju 2045. Khusus bidang SDM direncanakan terciptanya Manusia Indonesia yang Unggul dan Berdaya Saing diharapkan memiliki ciri antara lain pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global. Untuk tujuan ini telah disusun Peta Jalan pembangunan Pendidikan Indonesia 2020-2035. Pada tulisan ini telah disusun masukan strategi yang sebaiknya dipertimbangkan pada peta jalan ini. Strategi itu adalah membangun karakter dasar sebagai pekerja keras yang dinamis dan produktif, membangun penguasaan ilmu dan teknologi, membangun kerjasama Industri dan Talenta Global, dan mensyaratkan bahwa Guru haruslah merupakan capaian tertinggi dari sistem yang ada.



## Daftar Pustaka

- [1]. Ministry of Education Malaysia, Malaysia Education Blueprint 2013-2025 (Preschool to –Post Secondary Education), Putrajaya, 2013
- [2]. Tan, C., Koh, K. & Choy, W. (2016). The education system in Singapore. In Juszczuk, S. (Ed.), Asian Education Systems (pp. 129-148). Toruń: Adam Marszalek Publishing House.
- [3]. McKinsey& Co. (2007), <https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/how-the-worlds-best-performing-school-systems-come-out-on-top#> (Diakses 23 Mei 2021)
- [4]. <https://internationaleducation.gov.au/international-network/china/PolicyUpdates-China/Pages/China%27s-education-modernisation-plan-towards-2035-.aspx> (Diakses 23 Mei 2021)
- [5]. Lee J.W., ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF KOREA, 1945-1992
- [6]. Bappenas, Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024.

## Biodata Penulis



**Prof. Dr. Eng. Ir. Himsar Ambarita, S.T., M.T.,** lahir di Simalungun 10 Juni 1972 anak pertama dari 7 bersaudara dari pasangan suami istri Bonar S. Ambarita dan Ruslina Saragih. Pendidikan SD dan SMP diselesaikan di Kabupaten Simalungun dan SMA di Kota Pematangsiantar. Beliau menyelesaikan S1 di Teknik Mesin USU pada tahun 1997, S2 di Teknik Mesin ITB tahun 2001, dan S3 dari Muroran Institute of Technology Jepang pada tahun 2007. Sejak tahun 2000, Penulis bertugas sebagai staff pengajar di Fakultas Teknik USU dengan matakuliah yang diasuh antara lain

Matematika Teknik, Termodinamika Teknik, Perpindahan Panas, Metode Perhitungan Dinamika Fluida (CFD), Energi Surya dan Alat Penukar Kalor, Penulisan Karya Ilmiah di Program S1, S2, dan S3 Teknik Mesin USU. Jabatan yang pernah diembannya adalah Wakil Kepala Kantor Urusan Internasional USU dan saat ini masih menjabat sebagai Ketua Program Studi S2 dan S3 Teknik Mesin USU, ketua Tim Afirmasi Publikasi Ilmiah USU serta ketua Talenta Publisher USU. Penulis juga termasuk pendiri dan pembimbing pertama Tim Horas USU yang telah menyabet beberapa penghargaan tertinggi di level nasional dan internasional. Bersama Tim Horas USU penghargaan yang diraih antara lain Juara I Nasional Kontes Mobil Hemat Energi kategori Motor Bakar berbahan bakar Gasoline Tahun 2012, Medali Emas (Juara I) Kompetisi Mobil Hemat Energi Tingkat Asia Pasifik Tahun 2014 di Manila untuk Kategori Urban Konsep Etanol, dan beberapa medali Perak dan Perunggu pada jenis Lomba yang sama. Sebagai Peneliti, Penulis kerap melakukan kerjasama baik tingkat nasional dan internasional. Kersama yang dilakukan antara lain dengan Kementerian ESDM, Bappenas, PT. PLN, Pertamina, UNDP Indonesia, UNIDO, Energy Centre for the Netherlands (ECN), Muroran Institute of Technology, FH-Joanneum, Polytechnic University of Hauts-de-France, dan institusi lainnya. Beliau juga aktif mempublikasikan tulisan ilmiah pada jurnal nasional dan internasional bereputasi serta buku. Saat ini sudah ada 127 judul karya ilmiah beliau yang terindeks di Scopus dengan jumlah sitasi 597 (h-indeks = 14). Buku yang diterbitkannya ada dua, yaitu Perpindahan Panas dan Massa serta buku Termodinamika Teknik. Memiliki dua Paten yang terdaftar di Jepang dan masih aktif melakukan presentasi karya-karya penelitiannya pada konferensi tingkat nasional dan internasional baik sebagai presenter maupun sebagai Keynote speaker.

# Implementasi Merdeka Belajar Pada Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan Peta Pembangunan Pendidikan Indonesia

Kiking Ritarwan

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

## 1. Latar Belakang

Pendidikan di era Revolusi Industri 4.0 di gambarkan dari berbagai cara terintegrasi teknologi *cyber*, penciptaan teknologi manufaktur, penciptaan kerangka kebijakan strategis, *biotechnology*, *internet of things*, robot, *artificial intelligence* dalam pembelajaran. Pendidikan era Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum baru sesuai situasi pandemi Covid-19 saat ini (*aan anshori*). Revolusi industri 4.0 telah melahirkan pergeseran pendidikan. *Education 4.0* adalah pendekatan yang diharapkan dapat menyesuaikan pendidikan dengan kemunculan revolusi industri 4.0. *Education 4.0 sebenarnya* mengusung beberapa konsep yang sudah dikenal, yaitu *self-directed learning* dan *long-life learning*. Sehingga dunia pendidikan mau tidak mau secara konsisten harus terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan yang terjadi di dunia saat ini.<sup>1</sup>

Pandemi Covid-19 ini sebenarnya mampu mendorong percepatan implemetasi pendidikan jarak jauh berbasis teknologi informasi.<sup>2,3,4</sup> Wabah pandemi Covid-19 ini, menjadi momentum penting bahwa pendidikan jarak jauh harus sudah diijaki secara serius.<sup>5,6</sup> Berdasarkan survei yang dilakukan DitJen DIKTI, 98 persen perguruan tinggi telah melakukan pembelajaran secara daring.<sup>5</sup> Sampai saat ini, pembelajaran daring/ *on line* ini berjalan cukup efektif seperti halnya yang dilakukan oleh Program Studi Neurologi FK USU. Bedasarkan kurikulum SNPK dan SNPT Program studi Neurologi FK USU, yang didukung oleh 14 staf biasa dan 4 staf pengajar tidak tetap dan tenaga kependidikan berjumlah 2 orang serta jumlah peserta didik PPDS Neurologi FK USU saat ini berjumlah 50 orang, membawahi 85 SKS ini, telah melaksanakan metode pembelajaran secara daring ini di tengah era pandemi Covid-19 ini, berupa laporan jaga, sari pustaka, *Journal reading*, laporan kasus, refarat, *joint conference*, penelitian, simposium, *workshop* dan kongres dengan melibatkan semua peserta didik beserta staf yang Guru Besar maupun Non Guru Besar secara daring secara berkesinambungan.<sup>7,8</sup>

Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), yang bertujuan mendorong mahasiswa mahasiswi untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Adapun pelaksanaan Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.<sup>5</sup> Kampus Merdeka telah mencona konsep pembelajaran

secara mandiri. Pembelajaran di masa yang akan datang memungkinkan terbentuk sebuah normal baru di mana akan sangat bergantung pada penggunaan gawai dan layar komputer alih-alih tatap muka, kita harus mampu menghadapinya secara konsisten.<sup>1,5,6</sup>

## 2. Masalah

Seperti diketahui, tujuan utama dari penulisan ini adalah secara umum, untuk memberikan konsep strategi yang sesuai dengan SNPT dalam upaya peningkatan Departemen di USU dalam konsep kampus merdeka, merdeka belajar di era industri 4.0.

Pada saat ini, pelaksanaan pendidikan Merdeka Belajar bagi Peserta Program Pendidikan Spesialis (PPDS) Neurologi di Fakultas kedokteran USU dilaksanakan melalui daring dan biasanya melibatkan para dokter ahli sebagai penanggung jawab pelaksanaannya lebih kurang setahun sejak PANDEMI COVID-19 ini.<sup>5,6</sup>

Tabel 1. Strategi Pengembangan Pendidikan PPDS berdasarkan RENSTRA FK USU 2020- 2024 serta RIP dan PKM Prodi Neurologi 2021-2025<sup>7,8</sup>

Keadaan Semula	Strategi	Keadaan yang diharapkan
Kurikulum Prodi	1. Kurikulum yang diterapkan di FK USU mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) untuk pendidikan akademik maupun pendidikan profesi.	Kurikulum pendidikan profesi spesialis disusun oleh masing-masing Kolegium sebagai pengampu keilmuan bidang terkait dan disesuaikan dengan kurikulum kekhususan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran USU.
Belajar sebagai kewajiban	2. Menerapkan kolaborasi dan pembinaan PPDS berkelanjutan berdasarkan stratifikasi staf pengajar	Stratifikasi staf pengajar Program Studi Neurologi FK USU. Saat ini bertambahnya kualifikasi Guru Besar bertambah 2 orang, stratifikasi Doktorat bertambah 6 orang dan Sp-2 konsultan bertambah 9 orang.
tata Pamong	3. Menyelenggarakan tata pamong yang berpedoman pada prinsip-prinsip <i>good university governance</i> dengan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi para pemangku kepentingan.	Upaya USU dalam mengoptimalkan <i>good university governance</i> dilakukan dengan membangun komitmen pimpinan, civitas academica, dan tenaga kependidikan di lingkup universitas untuk menegakkan peraturan,

Keadaan Semula	Strategi	Keadaan yang diharapkan
		menyempurnakan sistem secara berkesinambungan, dan mengembangkan deskripsi kerja dan tugas pokok dan fungsi yang jelas dan terukur.
Sarana dan Prasarana	4. Fasilitas laboratorium yang mendukung	Pembelajaran berkelanjutan yang memanfaatkan teknologi Laboratorium Terpadu di FK USU
Capaian Kinerja	5. Tercapainya Akreditasi A PRODI NEUROLOGI FK USU pada tahun 2018 yang merupakan suatu capaian yang sangat signifikan untuk menuju target USU	USU menjadi Universitas berstandar Internasional berciri keunggulan TALENTA

### 3. Strategi pemecahan masalah

Indikator kinerja utama USU dalam Tridharma lebih berfokus pada penelitian dan luarannya berupa publikasi pada jurnal internasional bereputasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan prototipe, serta *outcome* berupa pengindeksan oleh lembaga sitasi internasional dan sitasi.<sup>9</sup>

Adapun strategi pemecahan masalah yang dilakukan:

- 3.1. Kewajiban untuk melakukan penelitian dan diajukan sebagai bahan tesis bagi PPDS Prodi Neurologi serta staf pengajar yang ada. untuk ikut juga melakukan penelitian.<sup>7,8</sup>
- 3.2. Diwajibkan mahasiswa PPDS Prodi Neurologi menyelesaikan penelitian baik itu untuk magister, tesis spesialis serta untuk ditampilkan secara oral/ poster pada tingkat Nasional maupun Internasional.<sup>7,8</sup>
- 3.3. Adanya dukungan insentif publikasi baik jurnal terindeks Scopus, buku, produk dan review dari USU sebagai bentuk apresiasi terhadap disseminasi hasil penelitian dan PKM<sup>9</sup>
- 3.4. Adanya laboratorium terpadu FK USU yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian biologi molekuler.<sup>7,8</sup>
- 3.5. Terjalinnya kerjasama yang baik dengan Rumah Sakit Pendidikan utama dan jejaring, sehingga memanfaatkan teknologi, kolaboratif, kreatif, dan sistem belajar berbasis "*Center of Excellent*"<sup>7,9</sup>

#### 4. Rencana tindak lanjut

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi serta tujuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Program Studi (PRODI) Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU) apalagi selama PANDEMI COVID-19 ini, maka berdasarkan hasil analisa Evaluasi Diri dan SWOT, penelitian di PRODI Neurologi FK USU selama 5 tahun ke depan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran berikut ini, yaitu:<sup>8</sup>

4.1. Meningkatnya jumlah, kualitas karya dan publikasi ilmiah, termasuk di antaranya manuskrip jurnal, buku monograf, referensi, ajar, model/modul, paten, produk yang mendukung perbaikan kesehatan dan pencegahan penyakit.

4.2. Bertambahnya jumlah dan frekuensi dosen PRODI Neurologi FK USU yang mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat di jurnal internasional bereputasi dan quartil terbaik, mempresentasikan hasil pemikirannya dalam forum ilmiah bermutu baik pada tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional, dalam kapasitas sebagai pemakalah biasa, pembicara utama/ undangan maupun sebagai dosen tamu atau *visiting lecturer/ professor* serta mendukung program USU menuju *World Class University* (WCU).

4.3. Meningkatnya perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) berupa paten dan hak cipta baik nasional dan internasional

4.4. Meningkatnya jumlah karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertindak lanjut pada dihasilkannya produk, pembuatan model/prototype, teknologi tepat guna maupun rekayasa sosial yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat

4.5. Meningkatnya jumlah kegiatan penelitian, penelitian kolaboratif, dan angka partisipasi staf pengajar dan mahasiswa/peserta didik yang terlibat dalam kegiatan penelitian

4.6. Meningkatnya jumlah dana yang diserap untuk kegiatan penelitian, baik dari sumber dana internal universitas maupun eksternal, baik di dalam negeri, maupun dari sumber dana di luar negeri.

4.6. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan staf pengajar PRODI Neurologi FK USU dalam meneliti, mengabdikan kepada masyarakat, dan mempublikasikan karya ilmiah baik bersifat regional, nasional, dan internasional

4.7. Meningkatkan pemanfaatan internet dan sarana lain (website, portofolio, scientific repository, e-journal) sebagai sarana penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pemanfaatan, penyebaran dan publikasi hasil karya ilmiah dari staf pengajar PRODI Neurologi FK USU

## 5. Kesimpulan dan saran

Kampus Merdeka telah mencoba konsep pembelajaran secara mandiri. Pembelajaran pada masa yang akan datang memungkinkan terbentuk sebuah normal baru di mana akan sangat bergantung pada penggunaan gawai dan layar komputer alih-alih tatap muka, kita harus mampu menghadapinya secara konsisten. Pandemi Covid-19 ini sebenarnya mampu mendorong percepatan implemetasi pendidikan jarak jauh berbasis teknologi informasi. Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan sinkronisasi dan kontinuitas topik penelitian dari seluruh elemen PRODI Neurologi FK USU dan dilakukan dengan pendekatan multidisipliner. Sehingga nantinya dana penelitian yang didapat akan dapat memberikan hasil yang optimal untuk mencapai hilirisasi penelitian sesuai dengan yang direncanakan. Untuk mencapai semua ini maka pengembangan Pusat Unggulan dan Kajian Iptek di dalam kerangka penguatan Sistem Inovasi Nasional sebagai “*Center of Excellent*” adalah prioritas dilakukan.

## Daftar Pustaka

1. Pratidhina, Elisabeth. “Education 4.0: Pergeseran pendidikan sebagai konsekuensi revolusi industri 4.0”. Humanika. 2020,20 (1). Avaliable from : <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/29290/pdf>.
2. Yamin ,M, Syahrir. Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran). Jurnal Ilmiah Mandala Education, 2020; 6(1):126-136.  
Avaliable from:<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/ Index>.
3. Hasnul N. Kurikulum Internasional Pendidikan. Perspektif Ilmu Pendidikan, 2011;25, tahun XV.
4. Mardiana, D., Umiarso. Merdeka Belajar di tengah Pandemi Covid-19:Studi DI Sekolah Menengah Pertama di Indonesia. Julnal Ilmu Kependidikan.AI-TA'DIB,2020:13(2):78-91. E-ISSN: 2598-3873.
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Buku Pendidikan Tinggi Di Masa Pandemi COVID-19. 2020. ISBN: 978-602-9290-20-2
6. Ansori, A, Sari, A.F. Inovasi Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara, 2020; 1(2):133-148.
7. Fakultas Kedokteran USU.2020. Rencana Strategis FK USU 2020-2024.
8. Fakultas Kedokteran USU.2021.Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2021- 2025.
9. Universitas Sumatera Utara, 2020. Rencana Strategis Universitas Sumatera 2020- 2024. Medan : Universitas Sumatera Utara.

## Biodata Penulis



**Prof. Dr. dr. Kiking Ritarwan, Sp.S(K), MKT**, Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Penyakit Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Lahir di Medan pada tanggal 17 November 1968, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Alm. Bapak Prof.dr. H. Rusdidjas, SpA(K) dan Ibu Prof dr. Hj. Rafita Ramayati Siregar SpA(K). Menjalani pendidikan dasar di SD Bhayangkari Medan (1981), SMP Negeri 1 Medan (1984), SMA Negeri 6 Medan (1987). Pendidikan S1 dan Profesi Dokter diselesaikan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada tahun 1991. Spesialis

Ilmu Penyakit Saraf pada tahun 2003 di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Program S2 Ilmu Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada tahun 2007. Meraih Brevet Konsultan dalam Bidang Neuroinfeksi pada tahun 2010 dan gelar Doktor (S3) dalam Ilmu Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada tahun 2015. Memperoleh jabatan Guru Besar pada Juli 2020.

Jabatan yang diemban saat ini adalah Ketua Program Studi Neurologi FK USU (2017-2022) dan Ketua GKM Prodi (S2) Kedokteran Tropis Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (2017-2022). Aktif sebagai Seksi Ilmiah PERDOSSI cabang Medan 2019-2023, Anggota Kolegium Neurologi Indonesia PP PERDOSSI (2019-2023), anggota MKEK IDI SUMUT (2017-2020) dan menjabat Seksi Ilmiah Perhimpunan Thrombosis Hemotasis Cabang Medan dari tahun 2010 hingga saat ini. Ketua Satgas COVID-19 PERDOSSI cabang Medan hingga saat ini.

Penulis juga mengikuti beberapa program pendidikan Workshop Biologi Molekuler (2004), workshop Internasional Standards for TB (2006), workshop Neurobehaviour (2007), workshop Evidence Base Medicine (2008), workshop video EEG Monitoring (2009), workshop Advanced Neurological Life Support (ANLS) pada tahun 2009, workshop Good Clinical Practice, KNEPK-KEPK FK USU tahun 2014, Research Review dari Quantum HRM Internasional dan Komite Akreditasi Nasional pada tahun 2017

Aktif melaksanakan penelitian-penelitian, publikasi ilmiah dan mengikuti seminar-seminar, menjadi pembicara ilmiah Nasional maupun Internasional dalam bidang Neurologi terutama mengenai Neuroinfeksi dan Neuroimunologi. Pernah mendapat pemakalah terbaik bidang Science pada Dies USU ke-63 (2015) serta menerima Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya satya 10 tahun (2010) dan 20 tahun (2018). Juga pernah mendapat penghargaan Program Studi Sp.1 Ilmu Penyakit Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara meraih Akreditasi A LAMPTKes periode 2018-2023.



# **Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing Sesuai Perubahan Zaman**

**Noverita Sprinse Vinolina**

Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

## **1. Latar Belakang**

Peta jalan Pendidikan Nasional merupakan rangkaian kegiatan dalam membangun manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Kebijakan Pendidikan haruslah berkesinambungan. Visi Pendidikan Indonesia 2035 adalah membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebhinekaan(1).

Sistem pendidikan adalah strategi atau metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya. Perubahan ini dapat dilihat dari perubahan sistem pendidikan yang terdiri dari pembelajaran, pengajaran, kurikulum, perkembangan peserta didik, cara belajar, alat belajar sarana dan prasarana dan kompetensi lulusan dari masa kemasa.). Pendidikan merupakan aktivitas manusia yang amat penting. Melalui pendidikan manusia dapat dididik menjadi manusia yang berperilaku mulia. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kerangka pembelajaran ditujukan untuk membantu negara memikirkan pembangunan kompetensi agar dapat maju dan sejahtera pada tahun 2030. Pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia sangat ditentukan oleh keluarga, guru, Institusi Pendidikan, dunia usaha/industri, masyarakat, organisasi penggerak, perusahaan teknologi edukasi dan lainnya. Peta jalan Pendidikan perlu diselaras karena berbagai faktor antara lain munculnya jenis pekerjaan baru, tenaga kerja multi-generasi dan beragam, tidak dibatasi struktur dan tempat, pekerja memiliki kontrol yang lebih besar akan perjalanan kariernya, Teknologi menyederhanakan pekerjaan sehari-hari dan menghubungkan pekerja dengan efisien serta akses dan pengolahan data semakin massif.

## 2. Masalah

Kajian Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI dan masalah aspek kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Kendala saat ini adalah kurikulum yang kaku, kurangnya keterlibatan industri dalam kaitannya dengan kurikulum, adanya peraturan dan persyaratan yang ketat, kesenjangan dalam kompetensi dosen, perlu revitalisasi Sistem Pendidikan Nasional melalui kebijakan yang tegas, kebijaksanaan, kepemimpinan, partisipasi, implementasi yang berakar pada budaya unggulan nusantara.

## 3. Strategi Pemecahan Masalah

Sesuai dengan perkembangan zaman saat ini maka kemampuan memecahkan masalah, sosial, proses dan sistem adalah keterampilan yang paling dicari sebagai keterampilan utama ditempat kerja pada masa mendatang. Kebanyakan pekerjaan akan mengalami perubahan dalam keterampilan. Konsep Pendidikan karakter khas unggulan nusantara harus tetap dipertahankan, diperkaya, dan disempurnakan agar menjadi acuan Pendidikan generasi Indonesia.

Saat ini, dunia pendidikan dituntut mampu membekali para peserta didik dengan ketrampilan abad 21 yaitu dapat berfikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan inovatif serta ketrampilan komunikasi dan kolaborasi. Selain itu ketrampilan lainnya adalah mampu mencari, mengelola dan menyampaikan informasi sertaampil menggunakan informasi dan teknologi. Beberapa kemampuan yang harus dimiliki di abad 21 ini meliputi : *leadership, communication, digital literacy, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizenship, problem solving, team-working*. Tiga isu Pendidikan di Indonesia saat ini adalah pendidikan karakter, pendidikan vokasi, dan inovasi (2).

Selain peserta didik, guru dan dosen pun harus siap menghadapi dan menguasai ketrampilan abad 21, dengan demikian guru atau pengajarnya juga memiliki ketrampilan abad 21. Ketrampilan abad 21, trend pembelajaran harus disesuaikan. Salah satunya adalah melalui pembelajaran terpadu atau *blended learning*. *Blended learning* adalah cara mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang memungkinkan pembelajaran yang sesuai bagi masing-masing siswa dalam kelas. *Blended learning* memungkinkan terjadinya refleksi terhadap pembelajaran. Berkaitan dengan peran guru dan dosen di Era Revolusi Industri 4.0, guru dan dosen harus memiliki kompetensi yang kuat, memiliki *softskill* antar lain : berpikir kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif. Peran guru dan dosen sebagai teladan karakter, menebar passion dan inspiratif, peran ini yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Memiliki kompetensi edukasi, kompetensi dalam penelitian, kompetensi dalam dunia usaha 4 digital, kompetensi dalam era globalisasi, interaksi dalam pembelajaran. Interaksi pembelajaran, guru dan

dosen pada fungsinya, harus mampu membangun atmosfir yang dapat memenuhi kebutuhan psikologis peserta didik, yang meliputi kebutuhan akan kompetensi. Setiap peserta didik butuh merasa bisa, ininteraksi pembelajaran harus mampu membuat mahasiswa merasa bisa. Pengejar perlu memberikan penghargaan atas hasil belajar mahasiswa. Needs for Autonomy, Setiap mahasiswa butuh merasa 'otonom' dengan mendapatkan kebebasan kepercayaan. Setiap pembelajar yang otonom tidak akan selalu bergantung pada dosen dalam belajar. Setiap mahasiswa membutuhkan merasa dirinya bagian dari suatu kelompok, dan berinteraksi dalam kelompok. Proses pembelajaran harus mampu memupuk interaksi kolegalitas dan saling support. Pembelajaran harus mampu membekali kemampuan '*sustainable learning*', sehingga mahasiswa dapat melewati era disrupsi, dan memasuki era baru yang disebut abundant era atau era yang serba melimpah, terutama informasi, media dan sumber belajar(2) .

### **Perlu keterlibatan industri dalam kaitannya dengan kurikulum**

Pengembangan kurikulum pendidikan sangat penting untuk dikaitkan dengan kebutuhan industri dan penguatan kompetensi mahasiswa baiknya disesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan industri yang ada. Perlu dikembangkan program magang lebih intensif pada industri-industri atau perdagangan baik nasional maupun internasional. Program magang dibuat lebih terstruktur dan diatur sedemikian rupa dalam pelaksanaannya sehingga dihasilkan alumni-alumni yang siap pakai dengan pengalaman semasa pendidikan.

### **Ada peraturan dan persyaratan yang ketat serta implementasinya**

Seorang Staf Pengajar pada Pendidikan tinggi harus melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan harus terus memperbaharui ilmu dan pengetahuannya melalui berbagai pelatihan dan mengikuti berbagai seminar-seminar baik nasional maupun internasional. Sebaiknya ini dapat dimodifikasi sesuai fesyen dari sang pendidik tersebut. Staf pengajar dapat memberi pilihan fokus pada riset atau pada pembelajaran di kelas.

### **Kurikulum yang dibaharui**

Kurikulum baiknya dikembangkan sesuai zaman untuk mempersiapkan SDM yang unggul. Dosen dimotivasi dan diarahkan untuk beraktivitas di luar kampus dan memahami persoalan pada masyarakat serta dapat memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan yang ada. Kurikulum perlu ditinjau secara berkala dan dibaharui disesuaikan dengan permintaan pasar dan pengalaman industri, pentingnya kompetensi dosen.

### **Kesenjangan dalam kompetensi dosen**

Tidak bisa dipungkiri banyaknya perguruan tinggi di Indonesia baik PTN maupun PTS memiliki kesenjangan dalam kompetensi dosen. Total jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia sekitar 2.694 Perguruan tinggi. PTS

dengan kondisi Yayasan dalam menyelenggarakan Pendidikan kadang sangat jauh dari penyelenggaraan pendidikan yang ideal. Wilayah juga sangat mempengaruhi kesenjangan tersebut. Dalam hal perlu untuk dilakukan pelatihan dan penelitian kolaborasi dari berbagai perguruan tinggi tersebut untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Penting adanya control dalam penyelenggaraan Pendidikan dalam pelaksanaannya pada kampus. Harus benar-benar jeli dalam melihat polemik ini. Ketimpangan kualitas ini dapat juga disebabkan oleh keterbatasan pemerintahan, peraturan dan kondisi demografis. Pelatihan bagi para guru dan dosen menjadi suatu hal yang penting dan berkesinambungan. Rata-rata penghasilan yang rendah menjadi faktor pembatas dalam merekrut SDM yang unggul atau kegiatan rekrutmen guru berkualitas karena pekerjaan lainnya lebih menjanjikan gajinya.

#### **4. Rencana Tindak Lanjut**

Perlu adanya kontribusi dunia industri dan swasta untuk bekerja sama dan terbuka pada pemerintah dan penyelenggara pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum dalam mempersiapkan SDM unggul yang dibutuhkan. Dunia industri dan swasta juga memberi persentase pendapatan untuk kegiatan Pendidikan yang dikelola secara terkoordinasi dan Indonesia perlu meningkatkan kontribusi tersebut dari sektor industri dan swasta untuk pendidikan. Sebaiknya kita dapat memperoleh komparasi dari berbagai negara lain. Upaya untuk mengembangkan talenta siswa semerdekanya.

Revolusi industri saat ini memasuki fase keempat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Banyak kemudahan dan inovasi yang diperoleh dengan adanya dukungan teknologi digital. Layanan menjadi lebih cepat dan efisien serta memiliki jangkauan koneksi yang lebih luas dengan sistem online. Hidup menjadi lebih mudah dan murah. Namun demikian, digitalisasi program juga membawa dampak negatif. Peran manusia setahap demi setahap diambil alih oleh mesin otomatis. Akibatnya, jumlah pengangguran semakin meningkat. Hal ini tentu saja akan menambah beban masalah lokal maupun nasional. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan peluang dan menjawab tantangan revolusi industri 4.0, para pemangku kepentingan (stake holders) wajib memiliki kemampuan literasi data, teknologi dan manusia. Literasi data dibutuhkan oleh pemangku kepentingan untuk meningkatkan skills dalam mengolah dan menganalisis big data untuk kepentingan peningkatan layanan public dan bisnis. Literasi teknologi menunjukkan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital guna mengolah data dan informasi. Sedangkan literasi manusia wajib dikuasai karena menunjukkan elemen softskill atau pengembangan karakter individu untuk bisa berkolaborasi, adaptif dan menjadi arif di era “banjir” informasi. Dalam penerapannya pemerintah Indonesia telah memiliki konsentrasi dan target dalam menyikapi perkembangan industri Revolusi

industri 4.0 ini. Khususnya bidang pendidikan, Namun dalam implementasinya pemerintah masih banyak menemui hambatan dan masih perlu usaha keras dalam mewujudkan roadmap making Indonesia 4.0. Beberapa tantangan dalam implementasi Revolusi Industri bidang pendidikan di 15 Indonesia adalah terdapat kendala antara lain belum meratanya infrastruktur, belum berubahnya mindset para pelaku khususnya para incumbent. Sehingga perlunya dukungan kaum regulator. Namun kaum regulator juga harus belajar mengikuti juga tentang perubahan di era disrupsi ini yaitu tentang strategi disruption untuk menciptakan lapangan kerja baru dan daya saing yang hanya bisa di bangun dengan cara cara baru juga. Untuk itu mari bersama kita menghadapi era disrupsi ini dengan semangat dan niat yang positif bagi kemajuan pendidikan, ekonomi dan bangsa ini.

### **Peta Jalan Pendidikan di Pendidikan Tinggi**

Indonesia dapat mengembangkan kebijakan dan peta jalan pendidikan tinggi yang komprehensif untuk memperkuat Perguruan Tinggi teratasnya.

Studi Kasus: Diferensiasi Pendidikan Tinggi Tiongkok Pemerintah Tiongkok mendorong diferensiasi misi yang selanjutnya memungkinkan Institusi Pendidikan Tinggi memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Lembaga penelitian perguruan tinggi "985" ~ 39 perguruan tinggi Lembaga penelitian dan pengajaran perguruan tinggi "211" ~112 perguruan tinggi Institusi pengajaran terutama mengajar dengan sedikit penelitian ~1.090 perguruan tinggi Perguruan tinggi kejuruan terutama yang menyediakan gelar associate 2/3 tahun ~1.327 perguruan tinggi 2 3 4 Statistik Institusi Pendidikan Tinggi Tiongkok >30 Juta mahasiswa 48% angka partisipasi kasar (2018) 60.000 lulusan doktor (2018) 428.000 publikasi penelitian 11 perguruan tinggi masuk dalam Top 100 QS World (3).

Kolaborasi yang lebih intens antara para sarjana yang berfokus pada merger universitas di Cina dan mereka yang bekerja pada merger dalam konteks pendidikan tinggi lainnya. Merger perguruan tinggi, diharapkan dapat mempercepat proses menjembatani kesenjangan penelitian di bidang studi. Misalnya, penelitian di Cina menyiratkan bahwa beberapa peran kunci (seperti otoritas, pemimpin universitas dan bahkan anggota staf individu) mungkin memainkan peran kunci dalam mempengaruhi hasil merger. Juga belum ada banyak penelitian tentang topik seperti itu dalam literatur merger internasional. Merger universitas di Cina, bersama dengan pengalaman di tempat lain, akan pasti membantu untuk memverifikasi konseptualisasi teoretis. Juga wawasan dari para sarjana internasional dapat membantu memahami dan mengevaluasi hasil merger dalam pendidikan tinggi Tiongkok, yang memiliki banyak ruang untuk perbaikan. (4)

## **5. Kesimpulan dan Saran**

Pengembangan kurikulum Pendidikan sangat penting untuk dikaitkan dengan kebutuhan industri dan penguatan kompetensi mahasiswa baiknya disesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan industri.

### **Daftar Pustaka**

1. Kemendikbud. Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 Mei 2020. 2020;75.
2. Wibawa SC, Cholifah R, Utami AW, Nurhidayat AI. Creative Digital Worksheet Base on Mobile Learning. IOP Conf Ser Mater Sci Eng. 2018;288(1).
3. Cai Y, Yan F. Chinese Higher Education and University. 2017;(January 2017).
4. Cai Y, Yang X. Mergers in Chinese higher education: lessons for studies in a global context. Eur J High Educ. 2016;6(1):71–85.

## Biodata Penulis



**Noverita Sprinse Vinolina** lahir di Padang Halaban dan besar di Medan. Staf Pengajar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Republik Indonesia sejak 1993 sampai sekarang. Saat ini bertugas di Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Gelar Insinyur Pertanian (S1) diperoleh dari Fakultas Pertanian, Jurusan Budidaya Pertanian Universitas Sumatera Utara (1992). Gelar Magister Pertanian (S2) diperoleh dari Program Studi Agronomi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (1997), Gelar Doktor (S3) diperoleh dari Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara (2014). Pendidikan S1, S2, dan S3 telah selesai dilaksanakan dengan didanai oleh Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Tahun 2011 memperoleh kesempatan untuk mengikuti Sandwich-like Program yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Departemen Biologi / Biologi Molekuler dan Farmasi di Auburn University, USA. Tahun 2006, 2014 dan 2015 memperoleh pencapaian sebagai Dosen Berprestasi, di Kopertis Wilayah I. Penulis tertarik untuk menulis tentang Peta Jalan Pendidikan di Indonesia untuk memberi opini dalam mempersiapkan generasi muda unggul sesuai perkembangan zaman dan kita semua harus tetap optimis untuk mewujudkan Indonesia Maju. Berkaitan dengan hal tersebut, Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara, atas ide untuk kemajuan Bangsa dan semangat untuk mewujudkan Indonesia Maju. Bersama kita bisa.

# **Peranan Agama Dan PKN Dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia yang Beriman dan Bertakwa**

**Pujiati**

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara

## **1. Latar Belakang**

Agama merupakan faktor penting bagi pendidikan bangsa Indonesia. Karena itu semua level pendidikan di Indonesia dirancang sejak Indonesia merdeka hingga kini bertujuan untuk menciptakan para murid, siswa, pelajar dan mahasiswa Indonesia menjadi orang yang beriman, berakhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peta jalan pendidikan di Indonesia menjadi perbincangan hangat apakah perlu pendidikan agama dimasukkan dalam kurikulum nasional atau tidak? Tentunya ini perlu kajian mendalam berkaitan nilai dasar Negara Pancasila Indonesia baik historis dan kontekstual masa depan.

Pentingnya mata kuliah agama dan PKN di Perguruan Tinggi dalam pembangunan peta jalan pendidikan sangat dibutuhkan dalam rangka membentuk karakter bangsa (*nation character building*). Sejatinya rancu Pancasila tanpa agama, Karena Pancasila dirumuskan bersumber dari nilai-nilai agama. Penegasan sila pertama Pancasila bahwa Indonesia merupakan bangsa dan negara yang religius, bukan sekular, tidak mungkin bangsa Indonesia mengeluarkan agama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara etimologi bahasa bahwa pendidikan berasal dari kata dasar didik, yang bermakna bina; kemudian memperoleh imbuhan awal “pe” dan akhir “an”. Pendidikan termasuk kategori dalam klasifikasi kata sifat yang artinya perbuatan membina, mengajar, mendidik, dan melatih. Oleh karena itu pendidikan merupakan satu proses pembinaan, pembimbingan, pelatihan dan pengajaran serta segala bentuk usaha manusia untuk meningkatkan intelektualitas dan skill setiap orang. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa pendidikan adalah upaya serius dan sadar, terencana, sistematis untuk mewujudkan kondisi dan situasi proses pembelajaran supaya peserta didik dapat aktif dalam mengembangkan potensi dirinya dan mempunyai kekuatan kerohanian dan keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, akhlak mulia, kecerdasan serta keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia (Mustaghfiroh, 2020).

Hakikat pendidikan merupakan usaha sistematis yang direncanakan secara sadar untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan baik (Widoyoko, 2009). Tujuannya agar peserta didik/mahasiswa dapat



mengembangkan potensinya dalam hal kerohanian dan keagamaan, kepribadian, kecerdasan, pengendalian diri dan ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan (Rohman, 2019). Aspek penting untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut salah satunya yaitu pengelolaan pendidikan yang bermutu dan baik. Pengelolaan pendidikan dalam satuan pendidikan diserahkan kepada kepemimpinan sekolah ataupun kampus (Hidayat & Machali, 2012).

Walaupun realitasnya, selama ini telah terabaikan aspek kemanusiaan non-kognitif oleh pendidikan di Indonesia, dampaknya banyak mahasiswa yang pintar pengetahuannya namun disayangkan sangat rendah moral dan budi pekertinya, atau dengan kata lain tinggi dalam kualitas akalunya namun pintar ngakal-ngakali karena tidak berbudi pekerti dengan yang baik (Sudarto, 2014) Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa pusat pendidikan meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing. serta harus ada sosok panutan pendidik yang berkualitas dari aspek keilmuan maupun kepribadian. Disamping itu untuk mewujudkan dan membentuk mahasiswa/peserta didik yang bermutu perlu dipilih/dilaksanakan melalui multiintelligensi dan metode yang tepat dan sesuai dalam mengajar serta adanya pemberian materi pendidikan yang sesuai menurut tingkatannya. Esensinya pendidikan budi pekerti mempunyai cakupan; yaitu kepada Allah, sesama manusia, dan terhadap lingkungan masyarakatnya yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. (Dewantara, 2009;2011)

Pendidikan dan pembelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti jika dijadikan sebagai mata pelajaran wajib di pada semua level pendidikan, *khususnya di SD sampai Perguruan Tinggi, tentunya* memiliki peranan penting dalam mewujudkan pendidikan yang ada kaitannya dengan Pancasila dan agama. Hal ini berguna untuk menangkak terjadinya di Indonesia berkaitan paham anti-pancasila (Achadi, 2020).

*Penegasan Ki Hadjar Dewantara bahwa* pendidikan Agama di Indonesia harus mengedepankan prinsip-prinsip Pancasila, sebagaimana dalam UU Sisdiknas dinyatakan bahwa Pendidikan Agama tidak hanya memberikan materi saja, namun harus menjadikan mahasiswa dan peserta didik secara mendalam mengamalkan nilai ketuhanan Yang Maha Esa, yakni: menghormati orang lain meskipun berbeda agama dan etnis, toleransi dan kerukunan hidup beragama dan bersuku bangsa, menjunjung tinggi persatuan, demokrasi dan keadilan sosial karena Pancasila merupakan landasan Pendidikan Agama. Pemahaman nilai Pancasila perlu digali untuk menjawab permasalahan bangsa dewasa ini, serta menginisiasi Pendidikan Agama yang efektif dan tepat. di Indonesia (Dewantara, 2018: 642). Sebagaimana Pendapat Einstein yang masyhur tentang agama adalah 'ilmu tanpa agama buta; agama tanpa ilmu lumpuh' (<https://www.hops.id/kerap-singgung-tuhan-apa-sebenarnya-agama-albert-einstein>)

Adapun dasar hukum pentingnya mata kuliah agama dan PPKN tentunya bersumberkan pada UUD 1945 dan yang kemudian telah diperbaharui dengan UU Sisdiknas No.20/2003, Kurikulum Pendidikan Tinggi

wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Selanjutnya PP 19 / 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 9 ayat (2) menetapkan bahwa kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Pendidikan. Agama Pendidikan. Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Bhs Inggris, seterusnya diperbaharui lagi pada Keputusan Dirjen Dikti .Diknas RI No. 43//DKTI/ Kep ./2006. pasal 4 ayat (2) susunan dan substansi PKN dan Surat Edaran N0. 407/D/T/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan.

Kemajuan teknologipun yang semakincanggih di era revolusi industry 4.0., namun ajarannilai-nilai agama bukan mengalami peningkatan bahkan pemerosotan. Ajaran nilai agamabukan hanya mencakup ajaran dalam beribadah, bahkan sopan santun; bertata krama; bersikap sesuai ajaran agama untuk memiliki akhlak yang sholeh. Ini merupakanbagian penting darinnilai-nilai agama akhir-akhir ini kurang mendapat perhatian. Nilai- nilai agama harus sudah mulai diajarkan sejak dini walaupun banyak faktor yang akan mempengaruhinya (Mustaghfiroh, 2020).

Urgensi model pendidikan agama Islam (Yusuf, 2013: 36). dapat dikaji pada ungkapan ayat alquran yang menyatakan bahwa "*Wa yata'allamuna minhuma ma yadhurruhum wala yan fa'uhum* (sesuatu yang dipelajari, haruslah sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia),Jika objek yang dipelajari tersebut membawa mudarat, maka Islam melarang untuk mempelajari hal tersebut, karena mengakibatkan sesuatu kerusakan dan sesuatu yang tidak baikbagi penuntut ilmu itusendiri dan bagi orang lain.

Rakyat dan negara Indonesia harus bersyukur kepada Allah swt atas karunia-Nya kekayaan alam tanah air Indonesia yang indah ini dan berterimakasih kepada para pendiri republik telah menetapkan pancasila sebagai dasar untuk masyarakat dan bernegara Indonesia. Terdapat lima prinsip Pancasila yang amat luhur yang terkandung dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar 1945, prinsip ini mampu melandasi persatuan nasional bangsa Indonesia dari Sabang sampai Maruke dan terpenting lagi, prinsip-prinsip itu dapat menjadi pangkal tolak pembangunan pemikiran kenegaraan Indonesia modern.

## 2. Masalah

Ada ketidak sinkronan antara tujuan pendidikan nasional dengan praktek pendidikan itu sendiri merupakan problematika yang serius. Amanat tujuan pendidikan nasional jelas menegaskan bahwa pendidikan harus membentuk manusia yang sempurna dan utuh dengan segala aspek kemanusiaanya yaitu berpengetahuan tinggi, beriman , bermoral,, berbudi pekerti luhur, bermasyarakat dan lain-lain. Walaupun realitasnya, selama ini telah terabaikan aspek kemanusiaan non-kognitif oleh pendidikan di Indonesia, dampaknya banyak mahasiswa yang pintar pengetahuanya namun disayangkan sangat rendah moral dan budi pekertinya, atau dengan kata lain *tinggi dalam kualitas akal nya namun pintar ngakal-ngakali karena*

*tidak berbudi pekerti dengan yang baik* (Sudarto, 2014). Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa peran agama penting dalam pembangunan peta jalan pendidikan nasional ?
2. Mengapa peran PKN penting dalam pembangunan peta jalan pendidikan nasional ?

SKB 3 Menteri menjadi polemik, karena Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 menuai protes pada awalnya, karena frasa agama, sama sekali tidak tertulis pada visi pendidikan Indonesia. Sementara frasa budaya tertulis bergandengan dengan Pancasila (<https://www.republika.co.id/berita/qppdsx423/menyoal-peta-jalan-pendidikan-indonesia-20202035>).

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara menempati posisi *staatsfundamentalnorm*. Dicantumkan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 *bahwa* setiap produk hukum, maupun produk turunan pada peta jalan pendidikan Indonesia, yang disusun negara tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Setiap sila Pancasila sebagai nilai dasar atau prinsip, sedangkan hukum merupakan nilai instrumental atau penjabaran nilai dasar. Karenanya, dalam merumuskan hukum dan peraturan negara mesti/wajib/harus bernafaskan dan bersumberkan pada dasar dan sila-sila dalam Pancasila.

Peta jalan pendidikan Indonesia harus mengacu pada nilai-nilai keagamaan, bukan mengacu kepada kepentingan industri dan pasar. Jika merujuk pada sila pertama Pancasila, pendidikan bukan hendak memproduksi manusia-manusia yang mengikuti arah dan selera pasar seperti robot.

Cita-cita pendidikan nasional bertujuan untuk melahirkan manusia-manusia Indonesia yang beriman, berilmu dan bertakwa, serta berakhlak mulia. Berbekal iman, takwa, ilmu, dan akhlak mulia itulah manusia Indonesia akan mampu dan dapat membangun bangsa dan negaranya menuju tatanan yang beradab dan berbudipekerti, yang bersumberkan dari nilai religious semua agama bagi para pemeluknya. Karena itu, semestinya frasa agama bergandengan dengan Pancasila tertulis eksplisit dalam visi pendidikan Indonesia 2035. Hal ini pun ditegaskan dalam pasal 31 ayat 3 dan 5 UUD 1945. (<https://nasional.tempo.co/read/1440958/nadiem-revisi-draf-peta-jalan-pendidikan-2020-2035-frasa-agama-dipastikan-ada>).

### **3. Strategi Pemecahan Masalah**

#### **3.1 Desain revisi kebijakan pemerintah**

Pemerintah mendesain, mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.” (ayat 3). Pemerintah berusaha memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama untuk mencapai peradaban maju serta kesejahteraan umat.

Dalam rangka menjawab amanah pasal 31 UUD 1945 di atas, lahirlah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, mandiri, kreatif dan warga negara yang Pancasila, demokratis serta bertanggung jawab.

Setelah terjadi polemik yang keras antara pemerintah dan ormas Islam tentang wacana penghapusan agama dari mata pelajaran dan mata kuliah disemua jenjang pendidikan yang ada di Indonesia baik mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi akhirnya masyarakat mendapatkan kabar yang menggembirakan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim menyebutkan bahwa sudah ada kabar gembira berkaitan polemik frasa agama. Kemendikbud akan merevisi draf Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 dan menegaskan frasa agama akan tetap dimuat secara eksplisit dalam Visi Pendidikan Indonesia. Kemendikbud menghargai setinggi-tingginya atas kontribusi pemikiran dan masukan serta atensi berbagai golongan dan kelompok masyarakat bahwa kata 'agama' perlu ditulis secara eksplisit untuk memperkuat tujuan Peta Jalan tersebut. Jadi, dipastikan bahwa kata ini akan termuat pada revisi Peta Jalan Pendidikan selanjutnya," ini dinyatakan pada Rabu, 10 Maret 2021. Sebelumnya sejumlah Ormas Islam mengkritik masalah tidak tertera frasa agama. Visi pendidikannya yaitu membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan budaya Indonesia yang mulia dengan nilai-nilai Pancasila," Kemendikbud menyatakan dan menjelaskan, meskipun secara eksplisit tidak ada kata 'agama' dalam visi tersebut, Agama dan Pancasila tetap ada dalam Peta Jalan Pendidikan 2020-2035. Hal tersebut sudah tercantum dalam tujuan membangun profil Pelajar Pancasila sebagai sumber daya manusia unggul dengan upaya mewujudkan pelajar yang bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak dengan akhlak yang mulia.

### **3.2. Desain Kampus dan Implementasinya Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama dan PKN Melalui Multiple Intelligence**

Desain kampus dan Implementasinya mempertahankan kualitas pendidikan agama dan PKN, melalui penyeragaman para dosen USU yang mengajar mata kuliah tersebut yang dikelola oleh LIDA USU. Para dosen agama perlu berkoordinasi untuk mata kuliah agama dan PKN dengan penyeragaman materi ajar dan buku referensi yang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester.

Situasi covid 19, mata kuliah agama tetap diajarkan melalui daring dengan menggunakan teknologi digital dan sistem informasi yang tersedia di USU seperti e learning, WIFI dan sebagainya. Situasi Work from home menjadikan para dosen mengajarkan kedua mata kuliah tersebut diajarkan

lewat daring baik melalui zoom, google classromm, what's app dan sebagainya.

Peningkatan kompetensi dosen dalam mengajar agama Islam, salah satunya melalui asosiasi pengajar dosen-dosen agama Islam secara nasional dan internasional sebagaimana USU telah mengirim 4 orang dosen USU dari 18 orang dosen seluruh Indonesia dari berbagai kampus untuk mengikuti shortcourse di Mesir yang dikelola oleh KBRI Cairo, ADPISI dan makhad Alquran dan lughah arabbiyah di Ghiza Mesir pada 8 Januari 2020- 8 Februari 2020. Sangat disayangkan jika ke 4 potensi dosen Sastra Arab tersebut tidak diberi peluang atau diberdayakan mengajar mata kuliah agama Islam karena selama ini kekosongannya diisi oleh para dosen UIN saja, seharusnya semuanya bersama-sama dosen UIN dan dosen Sastra Arab yang memiliki kompetensi tersebut dan bergabung dalam ADPISI (Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Indonesia), siapa lagi yang membangun kualitas USU kalau bukan bersama-sama dosen internal USU juga ikut diberdayakan.

Hakikat pendidikan merupakan usaha sistematis yang direncanakan secara sadar untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan baik (Widoyoko, 2009). Tujuannya agar peserta didik/mahasiswa dapat mengembangkan potensinya dalam hal kerohanian dan keagamaan, kepribadian, kecerdasan, pengendalian diri dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan (Rohman, 2019). Aspek penting untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut salah satunya yaitu pengelolaan pendidikan yang bermutu dan baik. Pengelolaan pendidikan dalam satuan pendidikan diserahkan kepada kepemimpinan sekolah ataupun kampus (Hidayat & Machali, 2012).

Multiple intelligences (kepelbagaian kecerdasan) merupakan satu teori kecerdasan yang dinyatakan oleh Howard Gardner, seorang psikolog berasal dari Harvard University, bahwa setiap peserta didik / anak mempunyai kecenderungan kecerdasan dari kesembilan kecerdasan, yaitu cerdas linguistik (bahasa), cerdas visual-spasial (gambar dan ruang), cerdas logis kognitif (matematis), cerdas kinestetik (gerak), cerdas interpersonal (cerdas bergaul), cerdas intrapersonal (cerdas diri), cerdas alam, dan cerdas eksistensi, cerdas musik (Chatib, 2016).

Model pembelajaran di era revolusi industri 4.0 sangat diperlukan Multiple Intelligences. Bagi kompetensi dosen yang profesional sangat terbantu dimudahkan dalam proses pembelajarannya jika dapat melihat kecerdasan yang dimiliki setiap siswa. Eman Relvan mengatakan terdapat beberapa implikasi multiple intelligences dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam, diantaranya yaitu (1) tujuan dan rumusannya lebih mengarah dalam mendorong mahasiswa untuk dapat belajar secara baik dan optimal sehingga bakat dan potensi (fitrah) memungkinkan diarahkan pada kesempurnaan. (2) Pemahaman lebih dari satu kecerdasan menimbulkan metode belajar kreatif, yakni penggunaan masing-masing kecerdasan melalui metode belajarnya (3) materi pelajaran atau bahan ajar mesti terdiri dari seperangkat kemampuan yang dapat

berorientasi kepada perilaku afektif dan psikomotorik dengan dukungan kognitif dalam rangka memperkuat dan mengokohkan keimanan serta ketakwaan terhadap Allah SWT (4) Evaluasi penilaian untuk menguji pemahaman dan kemampuan mahasiswa tentang penguasaan materi pelajaran secara kontinu dan lebih menyeluruh (Relvan,2005)

Menyadari pentingnya tujuan Pendidikan Agama Islam maka pembelajaran mesti disusun dalam berbagai model pembelajaran yang dapat mengakomodasi bermacam-macam kecerdasan yang dimiliki siswa. Dosen/pendidik harus mewujudkan pembelajaran dengan beraneka kreasi sehingga mahasiswa merasa tertarik sehingga kecerdasan yang mereka miliki dapat berkembang dengan baik dan optimal. Apabila kecerdasan majemuk (multiple intelligence) dapat dioptimalkan dengan baik, maka dapat berdampak pada mahasiswa dalam hasil belajar dan tujuan pembelajarannya (Hofur, 2020).

Tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan potensi seluruh peserta didik untuk dapat mempunyai kecerdasan, kepribadian, serta akhlak mulia. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan di Indonesia tidak hanya sekedar membentuk kecerdasan peserta didik dari segi intelektualnya, namun harus memiliki kepribadian berakhlak baik dan sehingga nantinya diharapkan terwujudnya generasi penerus bangsa di masa depan yang mempunyai kepribadian sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan agama (Bafirman, 2016).

### **3.3 Peranan Agama dalam Rangka Memberhasilkan Pembangunan Nasional**

Peranan Agama dalam rangka memberhasilkan pembangunan Nasional memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, dan bertakwa. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan yang memprioritaskan pembangunan ekonomi yang tentunya sumber potensinya adalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Mengingat jumlah terbesar penduduk Indonesia beragama Islam maka jumlah mayoritas sumber daya manusia tersebut harus diberdayakan menjadi potensi ummat Islam yang berkualitas. Dibutuhkan pemahaman tentang penguasaan bahasa Arab sebagai bahasa utama dalam membaca dan memperdalam sumber ajaran Agama Islam. Bahasa Arab menjadi bahasa komunikasi hubungan Internasional di PBB, dunia Timur Tengah, bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan seperti bahasa kebudayaan dan bahasa nilai ekonomis dikaitkan dengan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara-negara di Arab dan Timur Tengah. Kemampuan penggunaan bahasa asing perlu ditingkatkan dan dikembangkan untuk memperlancar komunikasi dengan bangsa lain di segala aspek kehidupan terutama penyerapan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping memperluas cakrawala pandang bangsa sejalan dengan kebutuhan pembangunan.

Sebagai negara yang paham dengan falsafah Pancasila, bangsa Indonesia harus mempunyai kepercayaan bahwa agama adalah karunia Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kepada segenap bangsa Indonesia. Sebab, dengan agama seorang manusia mengetahui keberadaannya dalam sistem alam jagad

raya ini, dengan agama pula dapat diketahui darimana, bagaimana, dan kemana hidup ini. Agamalah yang menjawab pertanyaan, mengapa seorang berada di dunia, oleh siapa dan kemana pergi. Dengan kata lain, agama memberi tujuan hidup yang menyadarkan bahwa tidak sepotongpun dari perbuatan sehari-hari dan jadi pengawasan melekat yang tidak pernah terpisahkan dari roda kehidupan seorang manusia berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan, yang memperlihatkan betapa ia konsisten melaksanakan ajaran agamanya. \*Fungsi pendidikan agama Islam untuk membimbing dan mengarahkan perkembangan peserta didik/mahasiswa dari satu tahap ke jenjang atau tahap yang lain untuk memperoleh tahap optimal. Tujuan pendidikan Islam untuk mewujudkan individu yang sempurna (*al-insanul kamil*) dan orang yang soleh/baik (*al-insan al-shalih*). Sesuai dengan visi misi Rasulullah saat di utus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak dan karakter manusia. Tentu saja, pendidikan yang baik perlu dikelola secara serius dengan baik (Palahudin.2020)

Hal ini menunjukkan bagi kita bahwa peranan agama demikian besarnya, dan lebih jauh diuraikan sebagai berikut :

1. Pembangunan merupakan kegiatan yang berorientasi kepada tujuan maupun kepada nilai, yang ditujukan kepada peningkatan martabat manusia sampai sampai ketinggian yang setinggi-tingginya dalam semua dimensinya salah satunya pemahaman dan pengamalan keagamaan. Oleh karena itu keseimbangan moral dan material, tetap dibutuhkan satu sama lain.
2. Pembangunan dalam tatanan Islam tidak sekedar diketahui secara multi-dimensional. Semua sinergitas dilaksanakan bersamaan dalam segala dimensinya, maka teori dan metodologi salah satu faktor kunci pendukung kebenaran.
3. Pembangunan melibatkan berbagai macam perubahan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Keterlibatan dalam perubahan kuantitatif. Keterlibatan keterlibatan dalam perubahan kuantitatif, yang di absahkan dan dianggap penting itu, sayang sekali telah mengakibatkan terabaikanyaa aspek-aspek kualitatif dari pembangunan itu khususnya dan bahkan pembangunan kehidupan secara keseluruhan.
4. Prinsip-prinsip kehidupan sosial yang dinamik, Islam secara khusus menekankan pada dua prinsip : pertama, pendayagunaan secara maksimal sumber-sumber yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia dan juga lingkungan alamnya ; dan kedua, pemanfaatan, pemerataan serta peningkatan hubungan-hubungan kemanusiaan secara menyeluruh atas dasar kebenaran dan keadilan.

### **3.4 Peranan PKN Dalam Membangun Identitas Persatuan NKRI dan Memberhasilkan Pembangunan Nasional**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dikonsolidasikan untuk mampu menerima dan mengarahkan beban dinamika politik seraya terus melandasi proses demokratisasi dan reformasi

berkelanjutan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ada lima kesepakatan dasar perubahan tersebut, yang ditetapkan oleh MPR yaitu tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mempertegas sistem pemerintahan presidensial; Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh); dan melakukan perubahan dengan cara amandemen. Melakukan perubahan dengan cara amandemen artinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahan diletakkan melekat pada naskah asli

Era merebut untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, dilandasi kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa. Perjuang bangsa yg selalu tumbuh dan berkembang dalam jiwa bangsa Indonesia dan tekad serta semangat kebangsaan. Semangat keimanan dan ketakwaan yang berdasarkan ikhlas berkorban sebagai kekuatan spiritual yang melahirkan sikap perilaku heroik yang menumbuhkan kekuatan dan kesanggupan serta kemauan luar biasa. Landasan perjuangan yg pasang surut perlu digali karena pengaruh globalisasi. Pengaruh perkembangan internasional dari negara-negara maju ikut mengatur perpolitikan, perekonomian, sosial budaya dan pertahanan global, yg mungkin terjadinya tarik menarik kepentingan antar negara berkembang dengan negara maju serta lembaga International disamping isu HAM dan Demokrasi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan informasi, komunikasi, transportasi, tanpa batas globalisasi dan memasuki masa covid di era revolusi industri 4.0 dapat menciptakan struktur struktur global baru dalam mempengaruhi kehidupan pola pikir, sikap, tindakan masyarakat serta berlanjut yang berpengaruh pada mental spiritual bangsa.

### **Tujuan Utama pembelajaran PKN yaitu:**

1. Menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para Mahasiswa calon sarjana, menguasai IPTEK dan Seni.
2. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif sehat jasmani dan rohani

Adapun Visi pembelajaran PKN ialah : (1) PPKN sebagai sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi untuk pengamalan Pancasila, UUD 45, kesadaran kewarganegaraan Indonesia (2). mengantarkan memantapkan kepribadian mahasiswa sebagai manusia Indonesia seutuhnya



Sedangkan Misi pembelajaran PKN yakni : (1). membantu Mahasiswa memantapkan kepribadian agar konsisten (2) Mewujudkan nilai-nilai dasar agama dan kebudayaan (3). Rasa kebangsaan. (4) Cinta tanah air (5) Menguasai, menerapkan dan mengembangkan Ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dengan rasa tanggung jawab

#### **4. Rencana Tindak Lanjut**

##### **Reformasi sosialisasi Bela Negaradan Pemantapan Nilai-Nilai PKN dan keagamaan yang bersumberkan Pancasila**

Kesiapan kesadaran berbangsa Indonesia untuk bela Negara dalam Indonesia yang telah merdeka selama 75 tahun ini, (1945-2020) perlu direformasi konstruksi pemikiran baru yaitu dengan memperkuat segala cadangan nasional kita khususnya *human resources* (SDM Indonesia) merupakan satu langkah strategis jika dibuat reformasi bela Negara dalam bentuk regulasi wajib bela Negara dari pusat hingga desa.

Sistem Bela Negara perlu dikaji dan dibuat satu sistem yang tepat dan komprehensif dalam pembinaan kesadaran berbangsa dengan pelatihan-pelatihan berbangsa disetiap institusi Negara, lembaga eksekutif Negara, lembaga yudikatif, lembaga legislatif di semua institusi pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan Tinggi, semua profesi; PNS, pengusaha, petani dan nelayan dsb dengan terencana dan terjadwal secara sistematis. Problematika disintegrasi bangsa dapat diatasi seperti di Papua, terorisme, radikalisme dalam masyarakat Indonesia dan masyarakat miskin bisa diantisipasi dan bersama-sama diberdayakan dalam bingkai kesejahteraan, korupsi dibasmi keakar-akarnya, tidak taat hukum diadili, kecerdasan dan kemakmuran bangsa diwujudkan dalam tatanan kehidupan rakyat dan ancaman dari dalam Negara dan luar Negara dapat bersatu mengatasinya dengan jiwa nasionalisme bela Negara.

Setiap jenjang pendidikan seperti SD untuk mengambil ijazahnya wajib ikut bela Negara dimasa liburnya dan mendapat sertifikatnya sebelum dapat mengambil ijazah SD-nya misalnya selama 2 minggu- 1bulan selepas ujian Kls 6 menunggu kelulusannya. Begitu juga ditingkat SMP, Tingkat SMA dan tingkat Perguruan Tinggi dan semua profesi untuk diberikan izin sertifikasi usaha dan profesinya disetiap lini kehidupan berbangsa. Materi yang diberikan pelatihan nilai kebangsaan dalam bentuk keilmuan, latihan fisik dan ilmu bela diri seperti silat dan sebagainya yang merupakan pertahanan jati diri bangsa..

Malaysia tetangga kita sudah menyiapkan bela Negara bagi setiap pelajarnya wajib ikut begitu juga di masa liburannya, setiap pekerja sipil/swasta dan pekerja profesional dapat mengikuti program bela Negara. Mengapa kita tertinggal ? Apakah semuanya kita karena banyak rakyatnya harus bergerilya kembali dalam segala hal termasuk dalam mempertahankan dan membela negara? Lain lagi masalah alutista kita yang out of date jika dibanding negara-negara tetangga kita, Australia, Malaysia dan Negara

lainnya. Alangkah ironisnya kita jika tidak mempersiapkan diri dengan Ilmu pengetahuan dan Teknologi canggih untuk membela Negara dalam sistem hankamrata rakyat semesta? Apakah ini hanya tinggal wacana saja ?. Dunia globalisasi menuntut profesionalisme dalam segala hal yang bermuara pada karakter bangsa yang kuat termasuk bela Negara yang diregulasi dan dilaksanakan sehingga menjadi habituasi karakter bangsa untuk mengeliminir kerusakan moral bangsa dan kehancuran bangsa secara sistematis. Kenapa kemungkinan orang luar bisa menghancurkan kita secara sistematis dari aspek ekonomi, budaya, politik dan lainnya ? mengapa kita tidak mempersiapkan diri juga secara sistematis. Sebagaimana slogan pendiri bangsa kita : “Bersatu kita teguh bercerai kita rubuh”

Terdapat tiga nilai dalam Undang-undang dasar 45 yaitu demokrasi, kesamaan derajat dan ketaatan hukum. Penulis ingin melihat bela Negara dari sudut pandang kesamaan derajat, demokrasi dan ketaatan hukum. Selama ini bela Negara diartikan dan diwujudkan hanya melalui cadangan militer dengan istilah wajib militer, padahal cadangan sipil juga sangat strategis untuk direformasi sebagai bagian wajib bela Negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945 pada pasal 30 yang tertera tentang bela Negara. Pasal 30 : 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. 2. Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

Amerika serikat menganggarkan anggaran negaranya yang terbesar adalah pada pertahanan dan keamanan dengan mengalokasikan alutista yang besar, mengapa itu dilakukan ? perkembangan geopolitik dan ekspansi pengaruh adikuasa ingin terus dikembangkan dan diperkuat keseluruhan negara yang dapat mengancam kepentingannya sebagai polisi lalu lintas kuasa dunia. Indonesia memang tidak menganggarkan seperti hal yang demikian karena tidak ada ambisi untuk menjadi polisi adikuasa dunia namun perlu dipikirkan ketahanan nasional sistem hankamrata Indonesia melalui bela Negara dengan satu sistem kesatuan dan persatuan dalam demokrasi, kesamaan derajat dan ketaatan hukum dalam wawasan nusantara.

Permasalahan internal Negara kita disamping masalah kesiapan kesadaran berbangsa Indonesia untuk bela Negara dalam kemerdekaan yang perlu diperkuat segala cadangan nasional kita khususnya human resources (SDM Indonesia) merupakan satu langkah strategis jika dibuat reformasi bela Negara dalam bentuk regulasi wajib bela Negara dari pusat hingga desa.

Bela Negara perlu dikaji dan dibuat satu sistem yang tepat dan komprehensif dalam pembinaan kesadaran berbangsa dengan pelatihan-pelatihan berbangsa di setiap institusi Negara, lembaga eksekutif Negara, lembaga yudikatif, lembaga legislative, di semua institusi pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, semua profesi; PNS, pengusaha, petani dan nelayan dsb, maka masalah-masalah disintegrasi bangsa dapat diatasi, masyarakat miskin diberdayakan, korupsi dibasmi keakar-akarnya, tidak taat hukum diadili, kecerdasan dan kemakmuran bangsa diwujudkan dalam

tatanan kehidupan rakyat dan ancaman dari dalam Negara dan luar Negara dapat bersatu mengatasinya dengan jiwa nasionalisme bela Negara.

Bela Negara dalam wajah Demokrasi Pancasila yang mengutamakan kesamaan derajat, kebebasan dan taat hukum perlu digali dan hubungannya dengan 13 nilai kebangsaan untuk kepentingan nasional dan ketahanan nasional. Bela Negara bukan hanya untuk kalangan militer saja namun lebih luas bela Negara yang bersumberkan dari kekuatan rakyat. Jika rakyat dibiarkan saja maka nilai-nilai nasionalisme kita akan luntur dan akan pupus dan mungkin akan hancur Negara kita Indonesia, tumpah darah kita.

Secara umum bela negara dapat diartikan secara fisik dan non-fisik, secara fisik dengan mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh, secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara, kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan rasa nasionalisme, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.

Landasan pembentukan membela negara adalah wajib militer. Bela negara adalah pelayanan oleh seorang individu atau kelompok dalam tentara atau milisi lainnya, baik sebagai pekerjaan yang dipilih atau sebagai akibat dari rancangan tanpa sadar (wajib militer). Sebagian kebijakan negara seperti Israel dan Iran meminta sipil untuk mengikuti dinas militer. Ada juga yang meminta relawan atau sepenuhnya ditangani keamanan negara melalui militer, hal ini tentunya tidak membutuhkan layanan dari wajib militer warganya, kecuali dihadapkan dengan krisis perekrutan selama masa perang. Sebagai cadangan militer, relawan sipil yang merupakan kelompok tidak berkomitmen untuk pertempuran sehingga mereka dipersiapkan untuk menangani situasi tak terduga memperkuat dalam keamanan negara.

Tujuan bela negara untuk menjaga dan mempertahankan kekuatan negara dan bangsa dari berbagai gangguan dan ancaman. Ancaman tersebut datang dari dalam Negara Indonesia dan luar Negara. Berikut contoh ancaman-ancaman dari dalam maupun dari luar. Adapun ancaman dari dalam yaitu : 1. Korupsi 2. Kemiskinan. 3. Kepemimpinan nasional. 4. Rendahnya pendidikan 5. Keadilan dan kemakmuran 6. Keamanan dan ketahanan nasional. Beberapa ancaman dari luar yaitu : 1. pengambilan wilayah Indonesia 2. Ancaman budaya asing 3. Ancaman ekonomi asing yang mendominasi 4. Ancaman ideology dan politik asing 5. DLL

## **5. Kesimpulan Dan Saran**

Kualitas sumber daya manusia didorong saling memperkuat, dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang pendidikan agama, PKN dan bela negara serta semua bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi dengan keberhasilan di semua bidang untuk mencapai kesejahteraan. Penataan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang harmonis, yang tercermin dalam semakin meningkatnya keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

semakin meningkatnya toleransi, kerukunan kehidupan umat beragama dan penganut terhadap Tuhan yang Maha Esa, semakin meningkatnya peran serta umat dalam pembangunan melalui pendidikan di lingkungan keluarga, di masyarakat, dan di sekolah, bersamaan dengan perluasan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk menunaikan ibadah masing-masing.

Upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia pada umumnya melalui peningkatan kualitas pendidikan, agama dan PKN, budi pekerti serta bela negara dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi rakyat yang berkeadilan sosial, kualitas produksi dan industri, oleh karena itu dibutuhkan manusia yang berfikir dan berwawasan maju kedepan yang dimiliki akhlakul-karimah, budi pekerti yang mulia yang di aplikasikan sebagai amal sholeh dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional.

Peranan pendidikan agama sangat besar pada semua level pendidikan dari SD sehingga Perguruan Tinggi dari segi :1. pembangunan sumber manusia yang berorientasi kepada peningkatan martabat manusia kepada tingkat yang setinggi-tingginya dalam semua dimensinya. Melalui pendidikan agama terbangun aspek moral dan material, semangat membangun ekonomi, sosial, mental spiritual yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 2. Pendidikan agama harus multi-dimensional Karena semua upaya harus dilakukan secara bersamaan dalam segala dimensinya, maka metodologi dan teoritis harus menjadi pendukung faktor kunci keberhasilan. Pendidikan agama Islam bertujuan menciptakan keseimbangan hidup lahir dan batin 3. Pembangunan pendidikan agama dan PKN melibatkan berbagai macam perubahan, baik kuantitatif maupun kualitatif dalam kehidupan sosial yang dinamik, Islam secara khusus menekankan pada pendayagunaan secara maksimal sumber-sumber yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia dan juga lingkungan alamnya

Mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan (PKN) berperan; 1. Menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa calon sarjana, menguasai IPTEK dan Seni 2. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa, berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif sehat jasmani dan rohani (3) Menumbuhkan nilai-nilai dasar agama dan kebudayaan (3). Rasa patriotisme, nasionalisme dan mendahulukan cinta negara dan tanah air di atas kepentingan pribadi dan golongan (5) Menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dengan rasa tanggung jawab

Adat tiga nilai dalam Undang-undang dasar 45 yaitu demokrasi, kesamaan derajat dan ketaatan hukum. Bela Negara dari sudut pandang kesamaan derajat, demokrasi dan ketaatan hukum. Selama ini bela Negara diartikan dan diwujudkan hanya melalui cadangan militer dengan istilah wajib militer, padahal cadangan sipil juga sangat strategis untuk direformasi sebagai bagian wajib bela Negara. Sistem Bela Negara perlu dikaji dan dibuat satu

sistem yang tepat dan komprehensif dalam pembinaan kesadaran berbangsa dengan pelatihan-pelatihan berbangsa disetiap institusi negara, lembaga eksekutif negara, lembaga yudikatif, lembaga legislative, di semua institusi pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan Tinggi, semua profesi; PNS, pengusaha, petani dan nelayan dsb, maka masalah-masalah disintegrasi bangsa dapat diatasi, masyarakat miskin diberdayakan, korupsi dibasmi keakar-akarnya, tidak taat hukum diadili, kecerdasan dan kemakmuran bangsa diwujudkan dalam tatanan kehidupan rakyat dan ancaman dari dalam negara dan luar Negara dapat bersatu mengatasinya dengan jiwa nasionalisme bela Negara.

## Daftar Pustaka

- Achadi, Muh. Wasith dan Noor Laila Fithriyana. 2020. *Integration of Pancasila Values in Student Books of Islamic Religious Education and Character at High School Level*. *Jurnal Pendidikan AgamaIslam*. Vol. 17, No. 2, Desember2020. ISSN: 1829-5746|EISSN:2502-2075. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
- Bafirman. 2016. *Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pembelajaran Penjasorkes*. Jakarta: Kencana.
- Chatib, M., 2016. *Orangtuanya manusia: melejitkan potensi dan kecerdasan dengan menghargai fitrah setiap anak*. Bandung: Kaifa.
- Dewantara, A. (2018). *Pancasila sebagai Pondasi Pendidikan Agama di Indonesia* [Preprint]. INA-Rxiv. <https://doi.org/10.31227/osf.io/5cxbm>
- , 2011 *Ki Hadjar. Bagian Pertama Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Cet. IV,
- , 2011 *Bagian Kedua Kebudayaan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Cet. III,
- , 2009 *Menuju Manusia Merdeka*. Yogyakarta: Leutika, Cet. I, 2009.
- Hidayat, A., & Machali, I. (2012). *Pengelolaan pendidikan: Konsep, prinsip, dan aplikasi dalam mengelola sekolah dan madrasah*.Kaukaba.
- Hofur, 2020. *konsep multiple intelligences perspektifal-quran/hadis dan implikasinya terhadap pembelajaran pendidikan agam aislam*. *Jurnal Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam* Vol.17. No.2.Juli-Desember 2020 p-ISSN: 2088-3102; e-ISSN: 2548-415X. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mustaghfiroh, Heni dan AshifAzZafi. 2020. *Membina sikap keagamaan pad apeserta didik melalui Pendidikan agama islam*. *Jurnal Tarbawi:JurnalPendidikanIslam*Vol.17.No.2.Juli-Desember2020p-ISSN: 2088-3102; e-ISSN: 2548-415X. Kudus : Institut Agama Islam Negeri Kudus

- Palahudin., dkk. 2020. *Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Islam*. *J-PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 7 No. 1 Juli-Desember2020 P-ISSN 2355-8237 |e-ISSN2503-300X.. Malang : UIN Malang.  
<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpaiDOI:10.18860/jpai.v7i1.9776>
- Relvan, E., 2005. Pendekatan Multi Kecerdasan Menurut Gardner dan Implikasinya Bagi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta
- Rohman, A. N. (2019). *Pengaruh model pembelajaran Role Playing terhadap partisipasi siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam: Penelitian pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kasokandel Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung DjatiBandung.
- Sudarto, Wandu. 2014. *Pendidikan Budi Pekerti Ki Hadjar Dewantara Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Akhlak Di Sekolah Menengah Atas (Sma)Taman Madyalbu Pawiyatan Yogyakarta*. Tesis. Malang : Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Widoyoko, E. P. (2009). Evaluasi program pembelajaran. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 238.
- Yusuf, Kadar M. 2013. *Tafsir tarbawi*. Pesan-pesan alquran tentang pendidikan. Jakarta : penerbit amzah.

## Biodata Penulis



**Prof. Pujiati, M.Soc. Sc., Ph.D**, Bidang ilmu dan Fakultas Guru Besar tetap bidang Ilmu Telaah Pranata Sosial Masyarakat Arab, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara Riwayat pendidikan, S1 Sastra Arab USU lulus pada tahun 1986. S2 di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang tamat tahun 1996. S3 di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang tamat tahun 2007. Riwayat pekerjaan, Diterima PNS sebagai staf pengajar Sastra Arab USU di Fakultas Sastra/FIB Universitas Sumatera Utara sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang dan menjadi guru besar USU terhitung mulai tanggal 1 Desember 2016 yang ditetapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia.

DII yang dianggap perlu : Peneliti Hibah Bersaing DIKTI untuk tahun 2009 dan 2010, Mengikuti *Program Academic Recharging* (PAR - B) DIKTI dalam penulisan buku selama 3 bulan di Nanyang Technological University, Singapore pada tahun 2009. Kemudian memperoleh Hibah DIKTI Program IBIK pengabdian Masyarakat pada tahun 2011. Pembicara pada *the 16 th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)* 2016 atas biaya Kementerian Agama Republik Indonesia yang dihadiri oleh berbagai peneliti kajian Islam baik dari Timur Tengah, Amerika, Eropah, Australia, Asia dan Asia Tenggara pada tanggal 1-4 November di IAIN Raden Intan Lampung. Ketua Prodi Sastra Arab pada tahun 2011-2015 dan PRODI Sastra Arab USU dengan tim borang kali kedua memperoleh dan mempertahankan akreditasi A pada BAN PT tahun 2015-2020, memperoleh sertifikat internasional ISO pada tahun 2016, melaksanakan tugas-tugas edukatif di FIB USU baik strata S1, S2 dan S3; Sastra Arab USU (S1), Linguistik (S2 dan S3), Ilmu Sejarah (S2), Sosiologi (S2) Fisip USU, dan Antropologi Sosial (S2) UNIMED serta tugas-tugas penelitian dan Pengabdian masyarakat. Penghargaan yang diterima antara lain; Dosen Teladan II USU pada tahun 1997, Dosen Teladan II pada tahun 2008, Ketua Prodi berprestasi II Tingkat USU pada tahun 2015 serta memperoleh kehormatan Satyalancana Karya Satya X tahun dari Presiden RI pada tahun 1999. Sebagai reviewer penelitian dan pengabdian masyarakat USU sejak tahun 2017 sampai sekarang dan peneliti DRPM DIKTI untuk skema PTUPT tahun 2018, serta pengurus UMM USU tahun 2019 sampai sekarang dan sekretaris Dewan Guru Besar komisi B sejak tahun 2019- sekarang. Peserta *shortcourse* Mesir selama sebulan 8 Januari 2020 – 8 Februari 2020. Agustus 2020 mendapat gelar kehormatan adat Melayu Gelar Datuk “Baiduri Eka Danta” dari Kesultanan Negeri Serdang.

# **Peta Perubahan Implementasi Pendidikan Kedokteran di Indonesia**

**Sarma N Lumbanraja**

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

## **1. Latar Belakang**

Pendidikan kedokteran berbasis kompetensi (KBK) telah diadopsi secara luas di negara-negara. Selama lima dekade terakhir, KBK telah menjadi diskusi teratas di konferensi-konferensi. Pada awal 1978, WHO menerbitkan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam Pendidikan Kedokteran.<sup>1</sup> Hal ini dipicu oleh gerakan berbasis kompetensi pada pendidikan tinggi pada tahun 1960-an di mana premisnya adalah bahwa pendidikan berbasis kompetensi minimal secara eksplisit akan mendorong akuntabilitas pendidikan<sup>2</sup> sebagai pemangku kepentingan terkait memiliki tingkat harapan yang sama terhadap kemampuan lulusan. Pendidik kedokteran di negara-negara maju utama, yaitu Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Kanada telah mendukung adopsi pendidikan kedokteran berbasis kompetensi.<sup>3</sup>

Publikasi kunci yang jumlahnya terus bertambah meningkat secara signifikan.<sup>4</sup> Laporan tentang implementasi KBK juga dipasang di tingkat percontohan serta di tingkat skala penuh di seluruh kurikulum.<sup>5</sup> Ada upaya untuk memperjelas definisi, konstruksi dan karakteristik kompetensi dan KBK.<sup>6</sup> Albanese dkk berpendapat bahwa definisi kompetensi yang jelas diperlukan, karena kerangka kompetensi sekarang digunakan untuk sertifikasi dan pemeliharaan sertifikasi. Mereka mengusulkan definisi berikut: 'kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap dan kualitas pribadi yang penting untuk praktik kedokteran'. Mereka juga merumuskan karakteristik kompetensi, seperti 'fokus pada kinerja pada akhir tahap tertentu, penguasaan kompetensi tercermin dalam penerapan dalam konteks perawatan pasien, penggunaan standar kinerja yang mengacu pada kriteria'.<sup>7</sup> Tuning Struktur Pendidikan di Eropa mendefinisikan kompetensi sebagai 'kombinasi dinamis dari pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kemampuan.' Kompetensi diperoleh atau dikembangkan selama proses pembelajaran. Perbedaan dapat dibuat antara kompetensi umum (yaitu kompetensi yang dapat dialihkan di seluruh wilayah studi) dan kompetensi khusus subjek (yaitu kompetensi khusus untuk bidang subjek).<sup>8</sup>

Epstein dan Hundert mengusulkan definisi kompetensi profesional sebagai 'penggunaan yang biasa dan bijaksana dari komunikasi, pengetahuan, keterampilan teknis, penalaran klinis, emosi, nilai-nilai dan refleksi dalam praktik sehari-hari untuk kepentingan individu dan komunitas yang dilayani'.<sup>9</sup> Dokter' kompetensi bersifat multidimensi, dinamis, kontekstual



dan perkembangan. Ini terdiri dari beberapa domain kemampuan. Untuk setiap domain kompetensi, ada spektrum kemampuan yang sesuai dari pemula hingga master, kontekstual dan selalu berubah. Dokter memiliki konstelasi kemampuan yang unik setiap saat dan dalam konteks apa pun.<sup>6</sup> Pengembangan kompetensi membutuhkan kondisi dan konteks tertentu. Peserta didik perlu mengamati model dan contoh yang menggambarkan proses dan hasil yang akan dipelajari. Mereka perlu diberi kesempatan untuk melakukan latihan terfokus dan melatih keterampilan khusus, sambil menerima umpan balik langsung dan informatif dalam pengaturan yang ditentukan. Mereka harus didorong untuk melakukan keterampilan ini di lingkungan yang berbeda-beda. Mereka juga harus merefleksikan kinerja mereka.<sup>10</sup> Inti pengembangan kompetensi adalah proses pengamatan langsung longitudinal dengan scaffolding. Guru memberikan tingkat dukungan yang memungkinkan siswa untuk mencapai tingkat pemahaman dan perolehan keterampilan yang lebih tinggi secara berturut-turut selama waktu ini.

Terlepas dari keragaman definisi dan pemahaman kompetensi, dalam pendidikan profesi kedokteran dan kesehatan, kerangka kompetensi telah digunakan sebagai acuan dalam perancangan dan perencanaan kurikulum di tingkat sekolah. Sejumlah negara telah mempublikasikan kerangka kompetensi mereka, seperti Standar Kompetensi Dokter Indonesia,<sup>11,12</sup> Hasil Lulusan,<sup>12</sup> Kerangka Kerja Kompetensi Dokter *CanMEDS* 2015,<sup>6</sup> dan enam kompetensi inti ACGME di Amerika Serikat.<sup>13</sup> Semua kerangka kompetensi ini terdiri dari beberapa domain atau bidang kompetensi, seperti keterampilan komunikasi, praktik berbasis sistem, profesionalisme, dll. Setiap domain kompetensi dipecah menjadi beberapa komponen kompetensi. Setiap komponen kompetensi dirinci lebih lanjut menjadi hasil pembelajaran yang lebih spesifik. Identifikasi domain kompetensi dan komponen kompetensi yang berkorelasi mempertimbangkan peran dan fungsi dokter dalam sistem pelayanan kesehatan.

Namun, ada kritik mengenai konsep model kompetensi yang diterapkan untuk profesi medis, baik di tingkat sarjana atau pascasarjana. Talbot berpendapat bahwa model kompetensi mungkin tidak paling tepat untuk mendidik profesi medis. Model kompetensi tersebut adalah konstruksi yang diambil dari industri di AS dan diadopsi di Inggris untuk pelatihan kejuruan, kemudian oleh banyak negara. Model ini didasarkan pada paradigma perilaku dan kognitif. Dalam model ini, tugas dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil dan dinilai sesuai dengan keberhasilan penyelesaian setiap unit kompetensi.<sup>14</sup> Cara memandang tugas ini terlalu sederhana dan reduksionisme. Squires mengembangkan praktik medis yang menunjukkan kompleksitas obat.<sup>15</sup> Praktisi medis harus melampaui kompetensi. Malone dan Supri berpendapat bahwa kompetensi itu kompleks dan tidak dapat direduksi menjadi elemen yang terisolasi, pendekatan berbasis kompetensi tidak sesuai untuk profesi yang sangat terampil seperti kedokteran. Mereka menjelaskan bahwa pendidikan berbasis kompetensi lebih dapat diterapkan untuk pekerjaan tingkat rendah yang melibatkan tugas

rutin dan keterampilan sederhana yang dapat diuji.<sup>3</sup> Terlepas dari semua kontroversi seputar pendidikan berbasis kompetensi, pendekatan pendidikan ini masih yang paling populer. Bukti penerapan kurikulum berbasis kompetensi selama empat puluh tahun di seluruh dunia mengungkapkan bahwa pendekatan pendidikan ini secara filosofis dipertanyakan, kompleks secara metodologis, dan sangat kontroversial.<sup>3</sup>

Reformasi kurikulum utama telah diupayakan untuk pendidikan kedokteran dan pascasarjana berdasarkan kerangka kompetensi. Contohnya ada di Kanada. *Royal College of Physicians and Surgeons of Canada* telah memulai perubahan besar dalam pendidikan kedokteran. Pendidikan kedokteran berbasis kompetensi dianggap sebagai pendekatan terpadu, memanjang, dan berfokus pada peserta pelatihan “untuk mempersiapkan dokter untuk praktik yang secara fundamental berorientasi pada kemampuan hasil lulusan dan diatur berdasarkan kompetensi yang diperoleh dari analisis kebutuhan masyarakat dan pasien. Ini tidak menekankan pelatihan berbasis waktu dan menjanjikan akuntabilitas yang lebih besar, fleksibilitas, dan keterpusatan pada peserta didik.<sup>8</sup> Nousiainen dkk menyoroti tiga aspek utama dari implementasi yang akan ditemui ketika sebuah sekolah kedokteran memutuskan untuk menerapkan KBK, yaitu mengatur perubahan struktural yang akan diperlukan untuk menyampaikan kurikulum dan metode penilaian baru; memodifikasi proses pengajaran dan evaluasi; dan membantu mengubah budaya pendidikan sehingga paradigma KBK diterima. Sembilan pertimbangan diidentifikasi sebagai pendukung untuk perubahan untuk dua aspek kunci.<sup>16</sup> Untuk aspek kunci ketiga, Ferguson dkk mengidentifikasi hambatan budaya untuk mengadopsi KBK ada dalam budaya institusi pendidikan kedokteran. Oleh karena itu, perubahan budaya pendidikan harus dianut oleh seluruh komponen hierarki pendidikan kedokteran. Penelitian sangat penting untuk memberikan bukti yang meyakinkan tentang manfaat KBK.<sup>17</sup> Empat tantangan menyeluruh harus dipertimbangkan ketika memulai penerapan KBK di semua tingkatan, yaitu: “(1) menyelaraskan pemangku kepentingan peraturan untuk mendukung pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; (2) mengintegrasikan upaya desain ulang pendidikan dan klinis untuk menyelaraskan tujuan kurikulum dengan pelatihan pengalaman; (3) menetapkan hasil yang ditentukan yang mencerminkan kebutuhan pasien dan populasi di mana individu, program, dan institusi dapat diukur; (4) memastikan akuntabilitas di antara semua pemangku kepentingan untuk pencapaian hasil yang ditentukan”.<sup>18</sup> Namun, masih dapat diperdebatkan apakah pendekatan berbasis kompetensi terhadap kurikulum kedokteran akan memenuhi tujuan yang dimaksudkan ini.<sup>3</sup>

Di Indonesia, UU Praktik Kedokteran No.29 / 2004 mengadopsi pendekatan berbasis kompetensi dalam pendidikan profesi kedokteran. Undang-undang ini mengamanatkan Konsil Kedokteran Indonesia untuk menerbitkan Standar Kompetensi Dokter pada tahun 2006, yang terdiri dari tujuh bidang kompetensi sebagai berikut: (1) komunikasi efektif, (2) keterampilan klinis, (3) dasar ilmiah pengetahuan kedokteran, (4) penanganan masalah kesehatan, (5) pengelolaan informasi, (6) kesadaran diri

dan pengembangan diri, (7) etika, moral, mediko-legal, profesionalisme, dan keselamatan pasien.<sup>19</sup> Konsil Kedokteran Indonesia juga mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran sebagai pedoman bagi fakultas kedokteran tentang bagaimana mengembangkan KBK. Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara juga menerapkan kompetensi berbasis kompetensi sejak 2006 mengikuti reformasi kurikulum kedokteran secara nasional. Fakultas kedokteran Universitas Sumatera Utara secara bertahap berusaha untuk mengadopsi KBK berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Medis. Namun demikian, terdapat variasi proses perubahan dari mata pelajaran menjadi KBK di antara enam puluh fakultas kedokteran dengan kondisi yang beragam, demikian juga dengan penerapan KBK itu sendiri. Setiap sekolah kedokteran memiliki otonomi untuk mengembangkan kurikulum mereka sendiri, menghasilkan model KBK yang bervariasi.

## **2. Masalah**

Penerapan konsep model kompetensi yang diterapkan untuk profesi medis, baik di tingkat sarjana atau pascasarjana dirasa kurang tepat. Talbot berpendapat bahwa model kompetensi mungkin tidak paling tepat digunakan untuk mendidik profesi medis. Model kompetensi tersebut adalah konstruksi yang diambil dari industri di Amerika Serikat dan diadopsi di Inggris untuk pelatihan kejuruan, kemudian diaplikasikan dinegara-negara. Model ini didasarkan pada paradigma perilaku dan kognitif. Dalam model ini, tugas dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil dan dinilai sesuai dengan keberhasilan penyelesaian setiap unit kompetensi.<sup>14</sup> Cara memandang tugas ini terlalu sederhana dan reduksionisme. Squires mengembangkan praktik medis yang menunjukkan kompleksitas obat.<sup>15</sup> Praktisi medis harus melampaui kompetensi. Malone dan Supri berpendapat bahwa kompetensi itu kompleks dan tidak dapat direduksi menjadi elemen yang terisolasi, pendekatan berbasis kompetensi tidak sesuai untuk profesi yang sangat terampil seperti kedokteran. Pendidikan berbasis kompetensi lebih dapat diterapkan untuk pekerjaan tingkat rendah yang melibatkan tugas rutin dan keterampilan sederhana yang dapat diuji.<sup>3</sup> Terlepas dari semua kontroversi seputar pendidikan berbasis kompetensi, pendekatan pendidikan ini masih yang paling populer. Bukti penerapan kurikulum berbasis kompetensi selama empat puluh tahun di seluruh dunia mengungkapkan bahwa pendekatan pendidikan ini secara filosofis dipertanyakan, kompleks secara metodologis, dan sangat kontroversial.<sup>3</sup>

Kurikulum Berbasis Kompetensi yang diimplementasikan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara sejak tahun akademik 2006 dipandang perlu dilakukan analisis mendalam untuk menemukan kelemahan-kelemahan serta penyesuaian dengan perkembangan. Selanjutnya dijadikan dasar untuk peninjauan dan perbagian sebagai bagian dari perbaikan mutu kurikulum secara berkesinambungan

### **3. Strategi Pemecahan Masalah**

#### **Peran otoritas pusat**

KBK membutuhkan peran yang kuat dari otoritas pusat untuk mengkoordinasikan semua departemen dan unit yang terlibat dalam menjalankan kurikulum, karena desain KBK melibatkan integrasi konten di seluruh domain pembelajaran.<sup>24</sup> Dalam kutipan berikut, ditekankan bahwa membuat pilihan konten yang beralasan tidak dapat diserahkan kepada masing-masing departemen, tetapi membutuhkan kepemimpinan pusat yang kuat.

Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar staf fakultas kedokteran USU sekali lagi meninjau mata pelajaran yang diajarkan dan membuat pilihan yang masuk akal tentang apa yang harus disimpan, apa yang harus dibuang, dan apa yang akan diperkenalkan. Jelas bahwa pembahasan tersebut tidak bisa diserahkan kepada masing-masing jurusan tetapi harus melibatkan fakultas secara keseluruhan. Kepemimpinan harus memainkan peran panduan dalam hal ini. Keputusan pemerintah untuk mengubah kurikulum inti nasional dari kurikulum berbasis mata pelajaran menjadi kurikulum berbasis kompetensi dapat memberikan peluang yang baik untuk melakukan hal itu. Tidak hanya pada tahap akademik, di KBK peran dekan meluas ke tahap klinis. Otoritas pusat di tingkat fakultas harus menyediakan peta kurikulum dan panduan terkait dengan pelatihan klinis yang memadai. Hal ini sejalan dengan temuan Harris dkk yang menjelaskan bahwa diperlukan rotasi longitudinal untuk memungkinkan kontinuitas yang lebih besar antara dokter dan pasien, fakultas dan peserta pelatihan, serta peserta pelatihan dan anggota lain dari tim perawatan kesehatan. Ini dapat meningkatkan pengembangan profesional yang efektif serta meningkatkan pelatihan dukungan dan umpan balik.<sup>18</sup> Idealnya, dekan bertanggung jawab atas desain program kepaniteraan, sedangkan ketua jurusan harus bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kualitas kepaniteraan di jurusannya. Apa yang dirasakan sangat dibutuhkan adalah pengembangan standar oleh departemen pendidikan kedokteran yang mencantumkan persyaratan dasar untuk pelatihan klinis yang memadai.

### **4. Rencana Tindak Lanjut**

#### **Komite multidepartemen**

Salah satu implikasi dari adanya pusat koordinasi dalam KBK adalah membentuk komite / unit / tim multidepartemen. Ini jelas berimplikasi pada perubahan struktur organisasi. Saat memulai penyusunan KBK, segera disadari bahwa hal pertama yang perlu diubah adalah struktur organisasi. Ini telah disoroti oleh Nousiainen dkk.<sup>16</sup> Sejumlah komite multidepartemen dibentuk, seperti yang dijelaskan berikut ini. Daftar komite / unit / tim yang telah dibentuk selama Proyek NPT: tim blok, tim koordinasi tahun, tim rotasi

perencanaan klinis, tim rotasi klinis, tim liaison officer, tim perencanaan lab keterampilan, komite penilai, komite kurikulum. Dua komite utama dibentuk, yaitu Komite Kurikulum dan Komite Penilai. Tugas utama Komite Kurikulum adalah memastikan bahwa buku blok yang dikembangkan sesuai dengan kurikulum makro dan meso. Tugas utama Komite Penilai adalah merumuskan peraturan penilaian dan menjaga agar peraturan tersebut dipatuhi. Selain itu, Komite Penilai juga menjaga agar prosedur penjaminan mutu dalam penilaian dilakukan, seperti review item.

### **Agen perubahan yang berkomitmen**

Untuk menjalankan proyek inovasi ini, diperlukan sekelompok staf akademik yang berkomitmen sebagai agen perubahan - yang bersedia bekerja keras, menerima ide-ide KBK dan siap menjalankan rencana strategis. Departemen Pendidikan Kedokteran yang baru didirikan. Melalui departemen ini, sepuluh staf akademik muda dan antusias direkrut dan dikirim ke Sekolah Kedokteran yang telah menerapkan KBK untuk menyelesaikan Magister Pendidikan Profesi Kesehatan. Staf akademik senior juga direkrut dari departemen ilmu dasar dan klinis. Ketua Departemen ini - diangkat sebagai Manajer Proyek NPT dari pihak USU.

### **Prosedur pengambilan keputusan**

Sedangkan untuk anggota Senat Fakultas dan Dewan Fakultas, serangkaian lokakarya kepemimpinan yang diselenggarakan oleh para ahli dari FK USU dilakukan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip KBK dan membuat mereka berkomitmen untuk mengadopsi pendekatan pendidikan ini. Untuk menghindari kebingungan siapa melakukan apa karena seluruh institusi sedang dalam proses perubahan, sistem manajemen ISO dipasang dan ratusan prosedur operasi standar (SOP) dikembangkan melalui serangkaian lokakarya. Ini untuk memastikan prosedur pengambilan keputusan dipatuhi. Kutipan berikut menjelaskan lokakarya kepemimpinan.

Upaya ini menegaskan Ferguson dkk untuk menyelaraskan pemangku kepentingan regulasi untuk mendukung KBK dan untuk memastikan akuntabilitas diantara semua pemangku kepentingan untuk pencapaian hasil yang ditentukan.<sup>18</sup> Dalam hal ini, pemangku kepentingan internal yang diintervensi melalui peraturan internal, seperti kebijakan akademik. Pada level blok, proses pengambilan keputusan dalam pemilihan konten dilakukan melalui musyawarah mufakat, seperti teknik pengelompokan nominal untuk menghindari gap dan tumpang tindih konten di seluruh blok. Proses pengambilan keputusan di tingkat blok membutuhkan otorisasi dari tingkat yang lebih tinggi, seperti senat fakultas.

### **Desain Kurikuler, Implementasi dan Evaluasi**

Harris et al menyoroti bahwa KBK melibatkan desain kurikulum yang mengakomodasi berbagai kegiatan, yang masing-masing harus berkontribusi pada pencapaian hasil yang disepakati secara eksplisit. Setelah hasil ini ditetapkan dengan jelas, komponen kurikuler dirancang untuk mendorong

perolehan " keterampilan yang memungkinkan " dan pengetahuan. Ini harus disusun dalam urutan yang logis.<sup>25</sup> Dalam sistem KBK, kurikulum dan penilaian didorong oleh hasil atau kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya. Peserta didik diharapkan untuk menunjukkan pencapaian hasil ini sebelum pindah ke tahap pelatihan berikutnya. KBK tidak mengamanatkan strategi atau filosofi pengajaran tertentu, dan banyak metode (misalnya, pembelajaran berbasis masalah, pengajaran berbasis kasus) dapat dilanjutkan dalam pendekatan KBK.

Sejalan dengan reorganisasi dan perubahan struktural, dilakukan perancangan kurikulum. Dikeluarkannya Standar Kompetensi Dokter oleh Konsil Kedokteran Indonesia pada tahun 2006 merupakan waktu yang tepat untuk dimulainya proyek. Pada tahap awal disepakati bahwa pendidikan kedokteran berbasis kompetensi akan diadopsi. FKUSU telah melaksanakan sebagian pembelajaran berbasis masalah pada tahun 1992, dan secara bertahap pada tahun 2002 mencapai skala penuh. Ketika kesepakatan untuk mengadopsi KBK diambil, narasi yang digunakan adalah proses yang masih sama - yaitu pembelajaran berbasis masalah sebagai tulang punggung, tetapi kami hanya mengubah hasil lulusan kedokteran agar sesuai dengan Standar. Oleh karena itu, sejumlah penyesuaian struktur dan isi kurikulum, dengan menitikberatkan pada pendidikan klinis, serta sistem penilaian perlu dilakukan. Sejalan dengan Harris dkk seperti yang telah dijelaskan di atas, KBK cukup fleksibel untuk mengakomodasi setiap strategi pembelajaran yang ada.

Merancang kurikulum di tingkat makro dilaksanakan oleh komite kurikulum yang bekerja sama dengan para ahli. Sejumlah lokakarya untuk mengembangkan peta kurikulum selama bertahun-tahun mulai dari tahap akademik hingga klinis dan juga studi banding ke senter pendidikan lain. Dapat dilakukan workshop untuk membahas mengenai filosofi KBK dan bagaimana menerjemahkan Standar Kompetensi ke dalam peta kurikulum. Prosesnya cukup ketat dan berulang ketika peserta membagikan ratusan komponen kompetensi dan hasil belajar, termasuk tujuh ratus penyakit, dua ratus keterampilan klinis, ratusan masalah - berdasarkan tanda dan gejala ke setiap blok untuk membuat blok cetak biru atau meso. tingkat. Setiap cetak biru berusaha untuk menyeimbangkan antara standar nasional dan konten lokal. Untuk mencapai integrasi penuh kurikulum , baik integrasi horizontal maupun vertikal serta garis bujur, peta kurikulum baru disepakati. Setelah peta kurikulum dan cetak biru blok untuk setiap blok disetujui, setiap tim koordinasi blok membuat buku blok untuk tutor dan siswa. Pada pohon topik tingkat mikro dikembangkan dan pemicu masalah diidentifikasi. Kemudian, desain instruksional mingguan dikembangkan. Penilaian cetak biru tiap blok juga diplot untuk menilai pencapaian hasil belajar blok. Di tingkat makro, strategi penilaian juga dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa penilaian terhadap komponen pencapaian kompetensi dan hasil pembelajaran dari berbagai domain dimasukkan. Misalnya, untuk domain pengetahuan, tes tertulis di akhir blok diperkenalkan. Keterampilan klinis dinilai menggunakan metode OSCE. Di akhir tahap akademik, dilakukan penilaian keterampilan terintegrasi menggunakan OSCE. Namun, menurut Hawkins et al, ada

ketidaknyamanan bahwa pendekatan penilaian yang ada terhadap kompetensi mungkin menekankan atau mengurangi domain penting untuk kompetensi dalam kaitannya dengan ketersediaan berbagai metode penilaian yang valid untuk kompetensi individu.<sup>26</sup> Proses pengembangan penilaian sistematis adalah digambarkan dalam kutipan berikut Norman et al berpendapat bahwa domain dalam kerangka kompetensi seperti humanisme, profesionalisme, altruisme dan beasiswa sulit diukur, dan akibatnya mungkin kurang ditekankan dalam penilaian dan kemudian dalam kegiatan pendidikan.<sup>27</sup> Dalam studi ini, perilaku profesional dinilai selama diskusi tutorial. Ini mungkin tidak mencakup keseluruhan komponen profesionalisme. Reformasi besar dilakukan dengan rotasi klinis. Ini dimulai dengan mengembangkan peta kurikulum, diikuti dengan distribusi konten di seluruh departemen klinis, berdasarkan hasil pembelajaran. Jumlah rotasi klinis berkurang. Setiap rotasi klinis departemen memiliki hasil belajar - terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berasal dari komponen kompetensi. Berdasarkan hasil belajar tersebut, kegiatan pembelajaran selama rotasi klinis dipetakan. Dengan cara ini, rotasi klinis menjadi lebih sistematis dan tepat sasaran. Setiap departemen klinis mengembangkan pedoman rotasi klinis yang menjelaskan keterlibatan langsung perawatan pasien di bawah pengawasan tertutup, umpan balik, dan penilaian sistematis. Meskipun kurikulum klinis telah dipikirkan matang-matang, KBK mendorong pengajaran klinis selama rotasi klinis menjadi kegiatan yang lebih terstruktur, seperti tutorial klinis, pengajaran di samping tempat tidur, dll. Dengan semakin banyaknya siswa, kegiatan terstruktur tersebut seolah menyediakan kegiatan belajar bagi semua siswa, tetapi hal ini mengakibatkan berkurangnya kesempatan untuk praktik aktual dan keterlibatan langsung dalam perawatan pasien. Gagasan ini menegaskan Caccia dkk yang menawarkan prinsip-prinsip dasar dalam pengajaran klinis yang mendasari KBK. Mereka berpendapat bahwa selama pertemuan klinis, harus ada pengamatan langsung terhadap komunikasi, kolaborasi, keterampilan teknis, keterampilan diagnostik, pengambilan keputusan, dan penilaian klinis oleh pengawas klinis.

### **Sumber Belajar**

Sehubungan dengan perkembangan lainnya, komite sumber belajar mengidentifikasi peralatan laboratorium keterampilan yang harus dibeli dengan dana hibah ini, tidak hanya untuk laboratorium keterampilan di FKUSU, tetapi juga untuk rumah sakit pendidikan penjangkauan. Dibantu oleh para ahli dari supervisi, tata letak lab keterampilan dirancang ulang. Materi pembelajaran seperti referensi literatur, pedoman pelatihan keterampilan, dan buku blok juga dikembangkan. Rumah sakit pendidikan yang berafiliasi juga dilengkapi dengan peralatan pelatihan keterampilan. Idennya adalah agar para siswa selalu dapat mempraktikkan keterampilan klinis dasar mereka, meskipun mereka ditempatkan di rumah sakit pendidikan yang jauh dari kampus utama. Penempatan mahasiswa kedokteran di rumah sakit pendidikan direncanakan dengan baik berdasarkan perhitungan rasio mahasiswa-pasien.

## **Penerapan**

Pelaksanaan KBK dimulai dengan angkatan 2006 Semester 1, sedangkan semester lainnya masih menggunakan kurikulum berbasis mata pelajaran lama. Pelaksanaannya di semester 1 bisa dilihat sebagai 'tahap uji coba'. Selama semester 1 berjalan, seluruh panitia mempersiapkan semua komponen yang dibutuhkan untuk menjalankan semester 2. Di akhir setiap blok tim evaluasi melakukan evaluasi blok dan hasilnya langsung diumpankan kembali ke blok berikutnya.

## **Program Pengembangan Fakultas**

Selama proses perancangan dan pengembangan berlangsung, panitia yang bertanggung jawab atas pengembangan fakultas merancang program pengembangan fakultas berdasarkan peran dan fungsi staf akademik. Selama fase ini, pelatihan dan lokakarya tentang KBK: tantangan dan jebakan' paling penting untuk membuat semua orang memahami alasan di balik keseluruhan proses perubahan. Pelatihan tutor dan instruktur serta pelatihan pengembangan blok dan pedoman rotasi klinis juga diprioritaskan. Hal ini sejalan dengan Dath dan lobst yang mengemukakan pentingnya pengembangan fakultas dalam transisi ke KBK, baik pada level sistem maupun level individu guru.<sup>28</sup>

## **Monitoring dan Evaluasi**

Kualitatif Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh evaluator eksternal. Proyek ini mempekerjakan ahli internasional terkenal untuk melakukan evaluasi eksternal secara kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa kurikulum baru lebih menarik. Para siswa menjadi lebih penasaran, mereka memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik dan lebih percaya diri. Penilai eksternal juga mengamati bahwa siswa memiliki kompetensi klinis yang lebih tinggi dan lingkungan belajar yang menyenangkan. Mereka berkomentar bahwa diskusi tutorial berhasil, karena mereka beranggapan bahwa dalam budaya Asia di mana kekuasaan jauh tinggi, diskusi tutorial mungkin tidak berfungsi sebaik di negara-negara barat dengan budaya yang lebih egaliter.<sup>29</sup>

Dari sudut pandang siswa, siswa dianggap memiliki pemahaman yang lebih dalam, lebih banyak kesempatan untuk berdiskusi tentang masalah, integrasi yang lebih baik antara keterampilan dasar dan klinis. Mereka juga memiliki lebih banyak kesempatan untuk langsung mengaplikasikan ilmunya. Mereka juga merasa lebih dekat dengan para staf. Dari sudut pandang tutor, mereka merasa bahwa pendekatan pendidikan baru mendorong mereka untuk memperbarui pengetahuannya.

## **5. Kesimpulan dan Saran**

Tulisan ini mengeksplorasi perubahan yang terjadi selama reformasi kurikuler dari kurikulum berbasis mata pelajaran menjadi KBK di fakultas



kedokteran dari tiga aspek. Perubahannya rumit dan melibatkan keseluruhan sistem. Pada aspek pertama, yaitu perubahan organisasi dan struktur, teridentifikasi empat tema yang terdiri dari peran otoritas pusat, komite multidepartemen, agen perubahan yang berkomitmen dan prosedur pengambilan keputusan. Terkait aspek kedua, yaitu desain kurikuler, implementasi dan evaluasi, muncul lima tema yaitu desain kurikulum pada level makro, meso dan mikro, program pengembangan fakultas, sumber belajar, implementasi dan monitoring serta evaluasi kualitatif. Adapun aspek ketiga - perubahan budaya, diidentifikasi empat tema, yaitu faktor pendukung, faktor penghambat, paradoks kurikulum baru, dan penjaminan mutu.

Jenis-jenis perubahan yang terjadi selama perancangan dan implementasi KBK telah dijabarkan berdasarkan bukti-bukti empiris. Perubahan ini dapat digunakan sebagai referensi, inspirasi, atau perencanaan oleh sekolah kedokteran mana pun yang akan memulai penerapan KBK yang dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Perubahan ini juga dapat dirujuk oleh universitas atau pemerintah nasional untuk memberikan dukungan bagi sekolah kedokteran yang mengadopsi KBK.

## Daftar Pustaka

1. McGaghie WC, Miller GE, Sajid AW, Thelder TV. *Competency-based Curriculum Development in Medical Education: An Introduction*. Geneva: WHO; 1978.
2. Spady WG. Competency Based Education: A Bandwagon in Search of a Definition. *Educ. Res.* 1997; 6: 9–14.
3. Malone K, Supri S. A critical time for medical education: The perils of competence-based reform of the curriculum. *Adv Health Sci Educ.* 2012; 17: 241–6.
4. Carraccio C, Wolfsthal SD, Englander R, Ferentz K, Martin C. Shifting paradigms: From flexner to competencies. *Acad Med.* 2002; 77: 361–7.
5. Harden RM, Crosby JR, Davis MH. AMEE guide no. 14: Outcome-based education : Part 1-- an introduction to outcome. *Med Teach.* 1999; 21: 7–14.
6. Frank JR, et al. Competency-based medical education: Theory to practice. *Med Teach.* 2010; 32: 638–45.
7. Albanese MA, Mejicano G, Mullan P, Kokotailo P, Gruppen L. Defining characteristics of educational competencies. *Med Educ.* 2008; 42: 248–55.
8. Caccia N, Nakajima A, Kent N. Competency- Based Medical Education: The Wave of the Future. *J Obstet Gynaecol Canada.* 2015; 37: 349–53.
9. Epstein RM, Hundert EM. Defining and assessing professional competence. *J Am Med Assoc.* 2002; 287, 226–35.
10. Swing SR. Perspectives on competency-based medical education from the learning sciences. *Med Teach.* 2010; 32.

11. Konsil Kedokteran Indonesia. Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia; 2006.
12. GMC. Outcomes for graduates. GMC Publ. 2018; 1: 8.
13. Eno C, et al. ACGME Milestones Guidebook for Residents and Fellows. Chicago: ACGME; 2020.
14. Talbot M. Monkey see, monkey do: A critique of the competency model in graduate medical education. *Med Educ.* 2004; 38: 587–92.
15. Squires G. Modelling Medicine. *Med Educ.* 2002; 36: 1077–82.
16. Nousiainen MT, Caverzagie KJ, Ferguson PC, Frank JR. Implementing competency-based medical education: What changes in curricular structure and processes are needed? *Med Teach.* 2017; 39: 594–8.
17. Ferguson PC, Caverzagie KJ, Nousiainen MT, Snell L. Changing the culture of medical training: An important step toward the implementation of competency-based medical education. *Med Teach.* 2017; 39: 599–602.
18. Caverzagie KJ, et al. Overarching challenges to the implementation of competency-based medical education. *Med Teach.* 2017; 39: 588–93.
19. Konsil Kedokteran Indonesia. Standar Kompetensi Dokter. Jakarta: KKI; 2006.
20. Denzin NK, Lincoln YS. *The Sage Handbook of Qualitative Research.* Thousand Oaks: Sage Publications Inc; 2005.
21. Bowen GA. Document analysis as a qualitative research method. *Qual Res J.* 2009; 9: 27–40.
22. O'Leary Z. *Doing Your Research Project.* Thousand Oaks: Sage Publishing; 2017.
23. Clarke V, Braun V. Thematic analysis. *J Posit Psychol.* 2017; 12: 297–8.
24. Biggs J. What the student does: Teaching for enhanced learning. *High Educ Res. Dev.* 2012; 31: 39–55.
25. Harris P, Snell L, Talbot M, Harden RM. Competency-based medical education: Implications for undergraduate programs. *Med Teach.* 2010; 32: 646–50.
26. Hawkins RE, et al. Implementation of competency-based medical education: Are we addressing the concerns and challenges? *Med Educ.* 2015; 49: 1086–102.
27. Norman G, Norcini J, Bordage G. Competency- Based Education: Milestones or Millstones? *J Grad Med Educ.* 2014; 6: 1–6.
28. Dath D, Iobst W. The importance of faculty development in the transition to competency-based medical education. *Med Teach.* 2010; 32: 683–6.
29. Chuenjitwongsa S, Oliver RG, Bullock AD. Competence, competency-based education and undergraduate dental education: a discussion paper. *Eur J Dent Educ.* 2018; 22(1): 1–8.
30. Griffiths J, Dalgarno N, Schultz K, Han H, van Melle E. Competency-Based Medical Education implementation: Are we transforming the culture of assessment? *Med Teach.* 2019; 41: 811–8.
31. Scheele F, et al. Introducing competencybased postgraduate medical education in the Netherlands. *Med Teach.* 2008; 30: 248–53.

### Biodata Penulis



**Prof. Dr.dr. Sarma Nursani Lumbanraja, M. Ked (OG), Sp. OG(K)-KFM**, Lahir di Pakpahan pada tanggal 30 Juli 1959. Pada Tahun 1978 hingga 1985 mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Tahun 1994 hingga 1997 menjalani pendidikan dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi di FK USU. Selanjutnya, pada tahun 2000 hingga 2002 melanjutkan pendidikan sub spesialis fetomaternal di FK UI kemudian menjalani program pendidikan Doktor di FK USU pada tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 1986 hingga 1993, bertugas sebagai

dokter di Puskesmas dinas Kesehatan Kotamadya Medan. Menjabat sebagai staf SMF Obgyn di RSUD Pirngadi Medan pada tahun 1998 hingga 2009 dan kini aktif bertugas sebagai sekretaris program studi di SMF/Departemen Obgin RSUP H Adam Malik Medan.